





TIM PENYUSUN

Pengarah

Aminah Asminingtyas
Deny Rachmat Bachtiar
Izzudin Fuad Fathony
Muhammad Toyib
Nur Zaini Wikan Utomo

Penanggung Jawab

Muhamad Sailendra

Produksi

Denny M.

Penulis

Tim KPU Kota Malang
Ajun Nimbara

Desain

Petik Std.

Sumber Foto

Dokumentasi KPU Kota Malang

Penerbit

KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Malang
Jl. Bantaran No.6, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota
Malang, Jawa Timur 65126 | (0341) 408898

website: <http://kpu.malangkota.go.id/>

 @kpu kotamalang.official

 @kpumalangkota

 Kpu Makota

Bekerja sama dengan
Penerbit Pelangi Sastra

ISBN: 978-623-7283-38-6

jdih.kpu.go.id

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

**GAK NYOBLOS
GAK MBOIS KERRR!!!**

DAFTAR ISI

Pengantar Ketua KPU Kota Malang	v	Tujuh Prinsip Penataan dan Penetapan Dapil	42
Pengantar Ketua KPU Provinsi Jawa Timur	vii	Proses Pelaksanaan Penyusunan Dapil	43
Pendahuluan	viii	Simulasi Pemetaan Dapil di Kota Malang	44
Visi dan Misi.....	xi	Simulasi Penghitungan Kursi Tiap Dapil di Kota Malang Pemilu Tahun 2019	45
Tugas dan Wewenang	xii		
KPU Kota Malang dari Masa ke Masa	2		
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	8		
Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019		Pencalonan Anggota DPRD Kota	
A. Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu.....	16	Proses Kegiatan Pelaksanaan Pencalonan	
B. Pendaftaran Calon Perseorangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).....	18	Anggota Legislatif DPRD Kota Malang	48
Permasalahan dan Penyelesaian	19	A. Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang	49
Partai Politik Pemilihan Umum 2019	20	B. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Malang Pemilu 2019	49
Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc PPK, PPS dan KPPS		Pengadaan dan Pendistribusian Logistik	
A. Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS).....	26	Tahapan Penerimaan	68
B. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).....	30	Tahapan Penyimpanan	68
C. Penggantian Antar Waktu (PAW) Badan Ad Hoc Pemilu 2019	33	Tahapan Penyortiran	68
Permasalahan dan Solusi	34	Tahapan Pengepakan	68
Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih		Tahapan Penyaluran	69
Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu di Kota Malang 2019	36	7 Langkah Proses Pengadaan dan Pendistribusian Surat Suara dan Logistik Pemilu 2019	70
A. Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS)	37	Pengadaan Logistik.....	71
B. Mekanisme Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilu 2019	37	Pengelolaan Logistik.....	74
Penataan dan Penetapan Dapil Pemilu 2019		Pendistribusian Logistik	75
		Permasalahan dan Solusi	78
		Kampanye	
		Landasan Hukum	80
		Asas Penyelenggaraan Kampanye	80
		Pelaksana Kampanye Pilpres	81
		Pelaksana Kampanye Legislatif (DPR).....	82
		Pelaksana Kampanye Legislatif (DPRD Provinsi)	83
		Pelaksana Kampanye Legislatif (DPRD Kabupaten/Kota)....	84
		Pelaksana Kampanye Anggota DPD	85



Larangan bagi pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu.....	86	Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 di Kota Malang.....	118
Proses Kegiatan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2019.....	88	Perolehan Suara Calon Anggota DPD Pemilu 2019 di Kota Malang.....	124
Audit Dana Kampanye		Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pemilu 2019 di Kota Malang.....	125
Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Laporan dan Audit dan Kampanye.....	92	Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Malang Pemilu 2019 di Kota Malang.....	132
A. Pelayanan Informasi.....	93	Data Pengguna Hak Pilih di Kota Malang Pemilu 2019.....	146
B. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).....	94	Partisipasi Masyarakat Pemilu Serentak 2019 Kota Malang.....	146
C. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).....	96	Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi DPRD Kab/Kota serta Keterwakilan Perempuan di Tiap Dapil Kota Malang Pemilu 2019.....	149
D. Fasilitasi Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP).....	96	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu	
E. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit.....	98	Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	154
Pemungutan dan Penghitungan Suara		Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif.....	156
A. Jadwal Kegiatan.....	100	Permasalahan dan Solusi.....	157
B. Ketentuan-Ketentuan dalam Penyelenggaraan dan Penghitungan Suara.....	100	Penetapan dan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih.....	160
C. Pelaksanaan Pemungutan Suara.....	102		
D. Penghitungan Suara.....	105	Penutup.....	173
E. Pengumuman Penghitungan Suara.....	109		
F. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.....	111		
Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Data Pemilih di Kota Malang 2019			
Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Malang.....	118		



PENGANTAR KETUA KPU KOTA MALANG



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, inayah dan rahmatNya, sehingga kita semua mampu menunaikan tugas dan kewajiban secara maksimal.

Sholawat dan Salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh Rasul Tuhan Semesta Alam, semoga kita termasuk golongan yang selalu mendapatkan syafaatnya. Aamiin.

Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 di Kota Malang telah berjalan dengan aman, damai dan demokratis.

KPU Kota Malang menyusun buku yang berisi informasi dan dokumentasi tentang penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dengan judul: **Demokrasi di Kota Malang, Jejak Pemilu Serentak 2019**

Buku informasi ini dibuat dengan harapan dapat menjadi referensi bagi para pihak yang berkepentingan (stake holder)

Di samping itu juga sebagai salah satu upaya pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Malang.

Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 perlu di kilas balik untuk evaluasi di setiap taha-

pannya. Dalam hal ini KPU Kota Malang berkepentingan dan perlu melaporkan kepada masyarakat tentang realitas seluruh tahapan penyelenggaraan, sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat yang telah memberikan amanahnya kepada KPU Kota Malang.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu menyusun dan menyelesaikan buku ini. Kami menyadari bahwa sajian dalam buku ini masih jauh dari sempurna.

KPU Kota Malang terbuka menerima masukan, saran dan kritik untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Semoga keberadaan buku ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tertanda

Ketua KPU Kota Malang

AMINAH ASMININGTYAS



PENGANTAR KETUA KPU PROVINSI JAWA TIMUR



Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak dalam satu waktu antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan pengalaman baru bagi Bangsa Indonesia sejak 74 Tahun kemerdekaannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu 2019 memiliki banyak potret dinamika dalam tahapan pelaksanaannya. Dalam setiap tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 mulai dari Tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu, Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Tahapan Pencalonan, Tahapan Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik, Sosialisasi, Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Suara semua memiliki dinamikanya masing-masing.

Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di samping merupakan pelaksanaan Pemilu paling rumit karena menggabungkan dua Pemilu dalam satu Pemilu, juga merupakan pelaksanaan Pemilu dengan keterlibatan masyarakat sebagai penyelenggara yang sangat besar. Bahkan bisa dikatakan bahwa Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 merupakan pemilu terbesar, tersulit dan termegah dalam sejarah Pemilu di Indonesia, bahkan mungkin dunia. Betapa tidak, dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 melibatkan banyak sekali sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial yang sangat luar biasa besar.

Keterlibatan dan antusiasme masyarakat tidak hanya terlibat sebagai penyelenggara secara langsung, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Pemilu, yaitu sebagai pemilih. Walaupun demikian, dengan segala kesulitan dan dinamika penyelenggaraannya, serta dengan profesionalitas para penyelenggara, Pemilu 2019 telah sukses dan berhasil dilaksanakan dengan baik, bahkan tercatat sebagai Pemilu dengan tingkat kehadiran dan partisipasi pemilih yang melebihi ekspektasi dari target nasional 77.5%. Oleg karena itu, besar harapan kita bahwa hasil Pemilu yang sudah terlaksana dengan baik ini menghasilkan para wakil rakyat, baik di tingkat lokal maupun nasional yang peduli dan mengutamakan kepentingan masyarakat menuju Indonesia maju.

Dengan dinamika penyelenggaraan Pemilu 2019 yang begitu luar biasa tersebut, penting untuk memastikan bahwa apa yang sudah terlaksana dengan baik mampu menjadi pelajaran dan evaluasi. Buku ini menjadi sangat penting bagi keberlangsungan kesuksesan pelaksanaan Pemilu di masa mendatang agar semua pelajaran dalam penyelenggaraannya tidak hanya menjadi ungkapan lesan tanpa makna, melainkan senantiasa abadi dalam tulisan dan menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang.

Tertanda
Ketua KPU Provinsi Jawa Timur

CHOIRUL ANAM

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 merupakan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Pertama dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. Perhelatan pesta demokrasi tersebut dilaksanakan dalam satu waktu, yakni Rabu Pahing, 17 April 2019, yang menggabungkan dua jenis Pemilihan yaitu:

1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
2. Pemilihan Anggota Legislatif, di tingkat pusat (DPR RI), DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Peraturan tersebut kemudian diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut menjelaskan bahwa tahapan pemilihan Umum Tahun 2019 terdiri dari :

1. Perencanaan program dan anggaran
2. Penyusunan Peraturan KPU
3. Sosialisasi
4. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
5. Pembentukan Badan Penyelenggara Ad-Hock
6. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
7. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL)
8. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
9. Penyelesaian sengketa penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
10. Logistik
11. Kampanye Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota serta Calon Presiden dan Wakil Presiden
12. Laporan dan Audit Dana Kampanye
13. Masa tenang
14. Pemungutan dan Penghitungan Suara

15. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
16. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota
17. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
18. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih
19. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih
20. Penyampaian Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Terpilih Kepada Instansi terkait
21. Pengucapan sumpah atau janji

Seluruh tahapan tersebut telah dapat dilaksanakan oleh KPU Kota Malang pada Pemilu Tahun 2019 sesuai porsinya dan setiap tahapan berjalan lancar dengan hasil sesuai target. Namun demikian, praktek di lapangan masih banyak permasalahan yang dihadapi KPU Kota Malang. Misalnya tentang regulasi yang sering berubah sehingga membingungkan pada tataran pelaksanaan di tingkat bawah. Juga tentang tenggat waktu yang sangat sempit untuk menyelesaikan target untuk kapasitas kerja yang sangat besar.

Dengan adanya buku ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi untuk perbaikan sistem kerja KPU dalam pelaksanaan Pemilu Serentak di masa yang akan datang. Catatan khusus perlu dikemukakan tentang strategi pengadaan dan format logistik. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan distribusi dan penanganan di tingkat bawah (Ad Hock). Demikian pula tentang penanganan data pemilih. Proses penyusunan DPT di masa akan datang semoga lebih memberi landasan aturan yang lebih pasti.

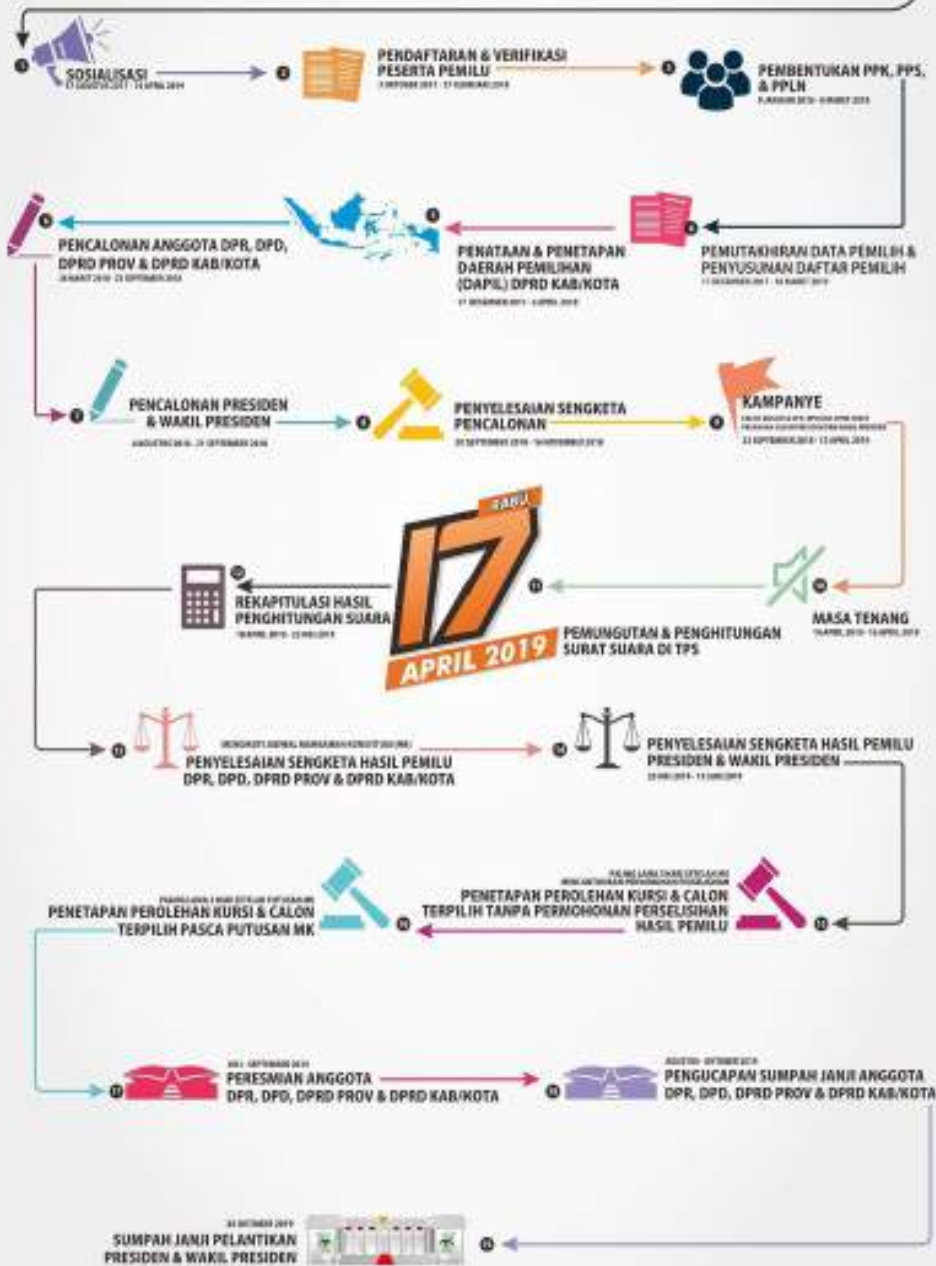
Semoga sajian infografis dalam buku ini menjadi dokumen yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber wawasan sekaligus referensi bagi pembaca dan pihak terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan datang.

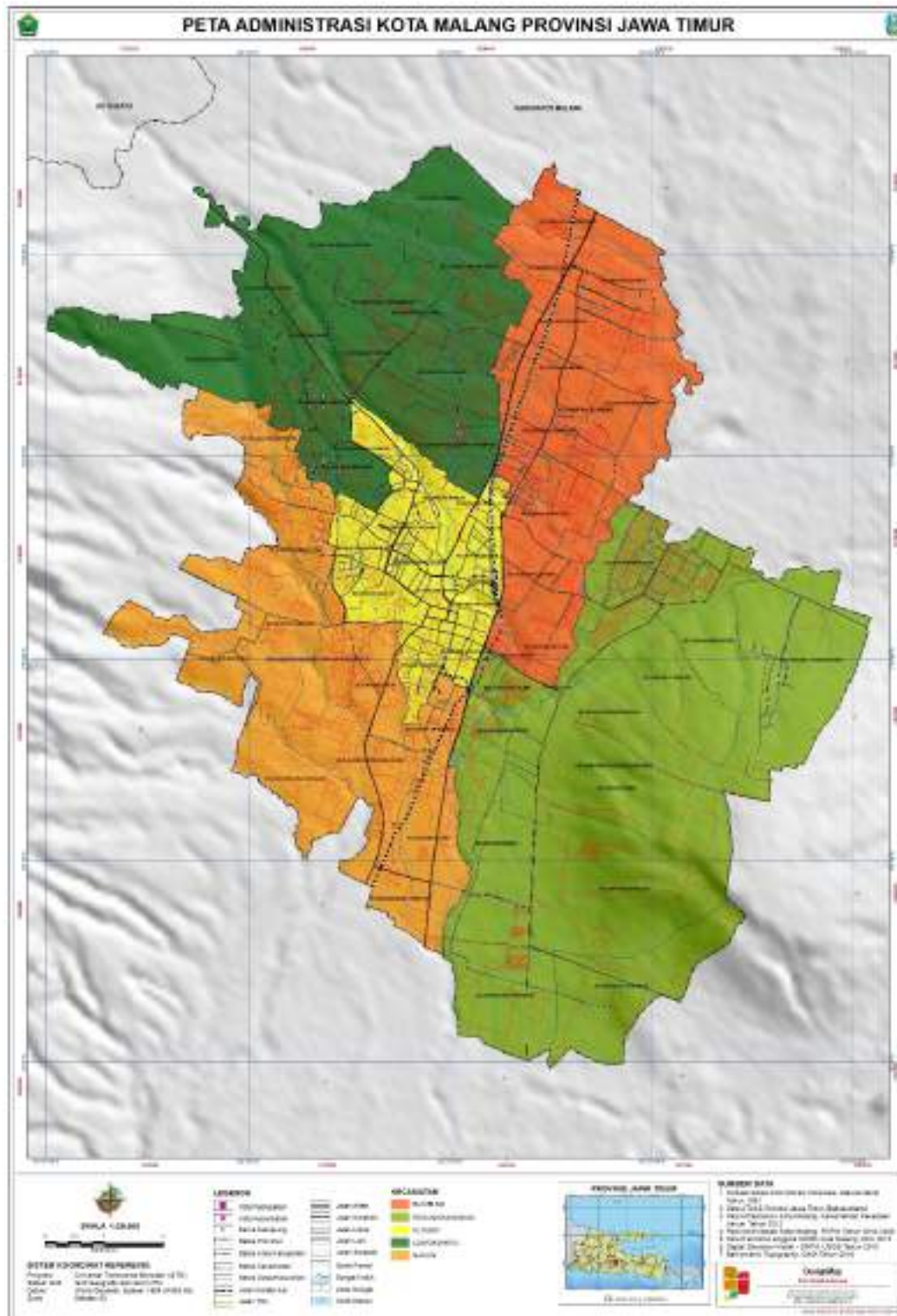
Salam,

KPU Kota Malang

Gak nyoblos, gak mbois Ker...

TAHAPAN PEMILU 2019







KPU KOTA MALANG

VISI

Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang *luber dan jurdil*

MISI

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

TUGAS DAN WEWENANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum KPU Kabupaten / Kota bertugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
4. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajibmenyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten / Kota berwenang untuk:

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan mengumumkannya
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota,dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU RI
PERIODE 2017-2022



Arief Budiman

Ketua KPU



Evi Novida G.M.

Anggota KPU



Hasyim Asy'ari

Anggota KPU







Ilham Saputra

Anggota KPU



KPU RI

 Jl. Imam Bonjol No.29, Jakarta, 10310
 Telepon/Fax: (021) 31937223 / 3157759
 Email: info@kpu.go.id
 Website: www.kpu.go.id



Pramono Ubaid Tanthowi

Anggota KPU



Viryan Aziz

Anggota KPU



Wahyu Setiawan

Anggota KPU







Arif Rahman Hakim

Sekjen KPU

KPU PROV. JAWA TIMUR
PERIODE 2019-2024



KPU PROV. JAWA TIMUR

 Jl. Raya Tenggilis No. 1-3, Surabaya, 60242
 Telepon/Fax: (031) 8484827, 8484828/8484826
 Email: kpujatim@gmail.com
 Website: www.kpujatim.go.id



Choirul Anam

Ketua KPU



Gogot Cahyo Baskoro

Anggota KPU



Muh. Arbayanto

Anggota KPU



Rochani

Anggota KPU



Insan Qoriawan

Anggota KPU



Miftahur Rozaq

Anggota KPU



Nurul Amalia

Anggota KPU



Muh. Eberta Kawima

Sekretaris KPU

KPU KOTA MALANG
PERIODE 2019-2024



Aminah Asminingtyas

Ketua KPU



Deny Rachmat Bachtiar

Anggota KPU



Izzudin Fuad Fathony

Anggota KPU



Muhammad Toyib

Anggota KPU



Nur Zaini Wikan Utomo

Anggota KPU



Muhamad Sailendra

Sekretaris KPU



KPU KOTA MALANG



Jalan Bantaran No 6, Malang, 65122



Telepon/Fax: (0341) 408898 / 409909



Email: kpudmalangkota@gmail.com



Website: www.kpu.malangkota.go.id

jdih.kpu.go.id

KPU KOTA MALANG DARI MASA KE MASA





KPU KOTA MALANG
PERIODE 2003-2009



Hendry

Ketua KPU



M. Fatich

Anggota KPU



Mut'mainah

Anggota KPU



Suwarno

Anggota KPU



Nurudin Hadi

Anggota KPU



Wahyu Ida

Anggota Pengganti Antar Waktu, menggantikan Nurudin yang mengundurkan diri



KPU KOTA MALANG
PERIODE 2009-2014



Hendry

Ketua KPU



M. Fatich

Anggota KPU



Alim Mustofa

Anggota KPU



Zaenudin

Anggota KPU



Rusmifahrizal

Anggota KPU



KPU KOTA MALANG
PERIODE 2014-2019



Zaenudin
Ketua KPU



Ashary Husen
Anggota KPU



Deny Rachmat Bachtiar
Anggota KPU



Asminah Asminingtyas
Anggota KPU



Fajar Santoso
Anggota KPU



KPU KOTA MALANG
PERIODE 2019-2024



Aminah Asminingtyas
Ketua KPU



Deny Rachmat Bachtiar
Anggota KPU



Izzudin Fuad Fathony
Anggota KPU



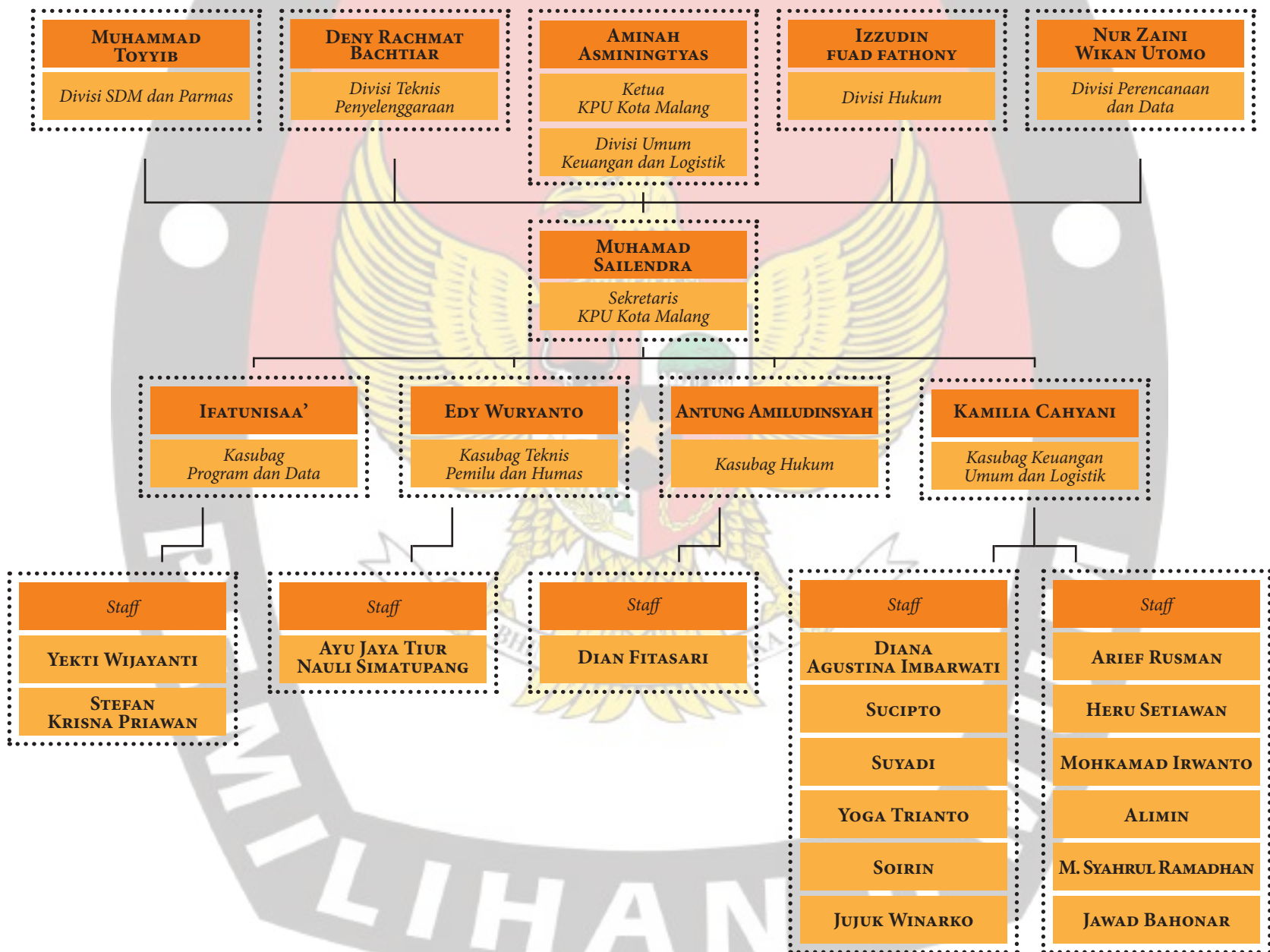
Muhammad Toyib
Anggota KPU



Nur Zaini Wikan Utomo
Anggota KPU

STRUKTUR ORGANISASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG



**Komisioner, Sekertaris,
Staff dan Karyawan**





KPU KOTA MALANG

📍 Jalan Bantaran No 6, Malang, Jawa Timur 65122

☎ Telepon/Fax: (0341) 408898 / 409909

✉ Email: kpudmalangkota@gmail.com

🌐 Website: www.kpu.malangkota.go.id

📷 @kpu kotamalang.official

🐦 @kpumalangkota

📘 Kpu Makota





**SOSIALISASI,
PENDIDIKAN PEMILIH,
DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT**

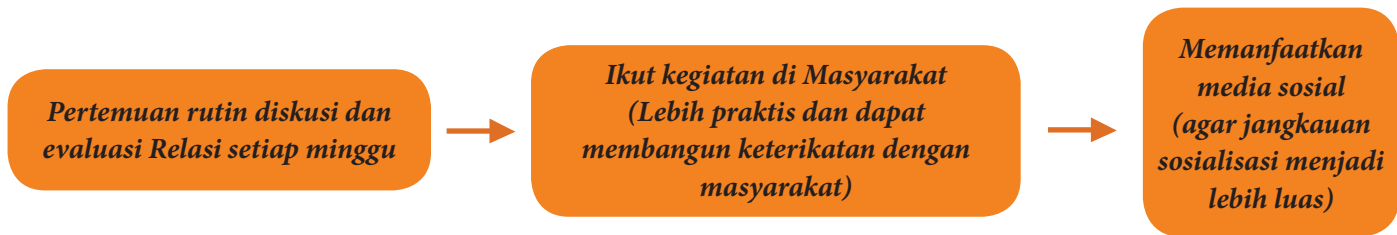
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bentuk dan Jenis Kegiatan yang Telah Dilaksanakan:

1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Penyuluhan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD
2. Sosialisasi Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Pasca Terbitnya PKPU No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD
3. Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05.Kpt/03/KPU/I/2018 dalam Pemilihan Umum 2019
4. Pagelaran Seni Budaya Menyongsong 1 Tahun Jelang Pemilu 2019 “Melalui Pagelaran Seni Budaya Membangun Pemilih Berdaulat Guna Menyukseskan Pemilu 2019”
5. Sosialisasi Pencalonan Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum 2019
6. Pendidikan Politik dan Sosialisasi Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilih Pemula
7. Diskusi Publik KPU Kota Malang bersama KNPI Kota Malang tentang Kampanye Berkualitas Menuju Pemilihan Umum 2019
8. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum 2019
9. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Bagi Masyarakat di Kecamatan
10. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula (Generasi Muda) dalam Pemilihan Umum 2019
11. Pendidikan Pemilih “Memilih Itu Juara – Pemilih Cerdas Untuk Pemilu yang Berintegritas”
12. Sosialisasi Masyarakat Marjinal di Kampung Pemulung, Sidomulyo “Sidomulyo Melu Pemilu”
13. Pembuatan akun media sosial KPU Kota Malang seperti Instagram, Twitter, konten YouTube Garudeya TV, dan Facebook
14. Pengoptimalan website kpud-malangkota.go.id. Penyebaran informasi selain melalui media sosial juga melalui website yang dimiliki oleh KPU Kota Malang
15. Sosialisasi lewat event Pemilu Run Malang Mbois
16. Event Konser Musik 105 Unity in Harmony
17. Lomba selfie dan vlog di TPS. Lomba selfie dan vlog di TPS Kota Malang diselenggarakan oleh KPU Kota Malang dengan tema ayas nyoblos, ayas mbois
18. Dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu 2019 KPU Kota Malang membentuk Relawan Demokrasi (RELASI) yang berjumlah 55 orang dari berbagai elemen masyarakat untuk membantu sosialisasi di 10 basis sasaran partisipasi masyarakat. Ada pun 10 basis sasaran tersebut, sebagai berikut:
 - a. Basis Keluarga
 - b. Basis Pemilih Pemula
 - c. Basis Pemilih Muda
 - d. Basis pemilih Perempuan
 - e. Basis Penyandang Disabilitas
 - f. Basis Keagamaan
 - g. Basis Marginal
 - h. Basis Komunitas
 - i. Basis Pemilih Berkebutuhan
 - j. Basis Warga Internet

Bagan ragam kegiatan RELASI adalah sebagai berikut:



Tahapan sosialisasi diakhiri di masa tenang, yaitu 3 hari menjelang hari pemungutan suara (17 April 2019)



Sosialisasi Relasi bersama Santri Pondok Pesantren



Sosialisasi Relasi bersama Jamaah Gereja GPIB Betsemani



Sosialisasi Relasi kepada perwakilan Mahasiswa se-Kota Malang



Sosialisasi Relasi kepada siswa SMAN 6 Kota Malang

Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Penyuluhan PKPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD



Sosialisasi Penyusunan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi DPRD Kota Malang dalam Pemilihan Umum 2019



Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05.Kpt/03/KPU/I/2018 dalam Pemilihan Umum 2019



Sosialisasi Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Pasca Terbitnya PKPU 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD



Pagelaran Seni Budaya Menyongsong 1 Tahun Jelang Pemilu 2019 "Melalui Pagelaran Seni Budaya Membangun Pemilih Berdaulat Guna Menyukseskan Pemilu 2019"



Sosialisasi Pencalonan Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum 2019



Pendidikan Politik dan Sosialisasi Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilih Pemula



Diskusi Publik KPU Kota Malang bersama KNPI Kota Malang tentang Kampanye Berkualitas Menuju Pemilu 2019



Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bersama Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019



Pendidikan Pemilih Muda "Voters Cerdas Indonesia Emas"



Seminar Menggagas Kampanye Multikulturalisme di Indonesia



Seminar Manajemen Kepemiluan di Kota Malang



Pendidikan Pemilih "Memilih Itu Juara - Memilih Cerdas untuk Pemilu yang Berintegritas"



Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula (Generasi Muda) Pemilu 2019



Sosialisasi Masyarakat Marjinal di Kampung Pemulung, Sidomulyo "Sidomulyo Melu Pemilu"



Sosialisasi & Pendidikan Pemilih bagi Masyarakat di Kecamatan



Konferensi Pers Pemilu Run



Pemilu Run di CFD



Rapat koordinasi konser musik



Event Konser Musik 105 Unity in Harmony

**PENDAFTARAN
DAN VERIFIKASI
PESERTA PEMILU
TAHUN 2019**



KPU Kota Malang memulai tahapan kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu.

Salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh KPU Kota Malang sebagai penyelenggara Pemilu berperan pada saat tahapan pendaftaran dan verifikasi.

KPU Kota Malang melaksanakan penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu. Penetapan Partai Politik peserta pemilu dilakukan oleh KPU melalui Keputusan KPU yang didasarkan pada Berita Acara Penetapan Partai Politik yang berisi tentang hasil Verifikasi persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu. Pada pasal 6 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Partai Politik wajib mendaftar kepada KPU dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam UU, untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu. Untuk itulah Komisi Pemilihan Umum Kota Malang melaksanakan tugasnya pada saat pendaftaran partai politik dan verifikasi peserta pemilu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Laporan prosedur pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2019 bertujuan untuk:

1. Melaksanakan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Menghimpun seluruh proses dan menyajikan seluruh dokumen Tahapan Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Malang.
3. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Malang.
4. Wujud pertanggungjawaban KPU Kota Malang dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Malang.

Adapun ruang lingkup laporan ini meliputi:

1. Semua tahapan pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Malang.
2. Semua kegiatan dalam bentuk dokumentasi Tahapan pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 62, Tambahan
lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633)

01

UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109)

03

Dasar hukum Pendaftaran,
Verifikasi, dan Penetapan
Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

UU Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4801) sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 2
Tahun 2011 tentang perubahan
atas UU Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran
Negara RI Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5189)

02

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)
sebagaimana diubah terakhir kalinya
dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2019

04

Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran, Verifikasi, dan
Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

05

PROSES PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD

Jadwal pendaftaran Partai Politik calon peserta pemilu dan penyerahan syarat pendaftaran oleh Partai Politik kepada KPU Kota Malang dimulai sejak Tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 16 Oktober Tahun 2017

Dalam melaksanakan tahapan pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan, KPU Kota Malang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam pelaksanaan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dilakukan di Kantor KPU Kota Malang JL. Bantaran No. 6 Purwantoro, Blimbing, Kota Malang pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, dengan tahapan sebagai berikut:

A. Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu

1. Pengumuman pendaftaran dan pengambilan formulir partai politik calon peserta pemilu melalui media massa, website, papan pengumuman Kantor KPU Kota Malang mulai tanggal 1-3 Oktober 2017.
2. Penerimaan pendaftaran partai politik dibuka mulai tanggal 3 sampai 16 Oktober 2017, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menerima salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Kota Malang melalui Petugas Penghubung
 - b. Menerima daftar nama dan alamat anggota Partai Politik yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Kota Malang melalui Petugas Penghubung menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL
 - c. Meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dengan daftar nama dan alamat yang terdapat dalam Sipol
 - d. Memberikan tanda terima penyerahan dokumen menggunakan formulir MODEL TT.KPU/KIP KABUPATEN/KOTA-PARPOL kepada Pengurus

Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat Kota Malang

- e. Apabila terdapat kekurangan dokumen hardcopy yang telah diserahkan, KPU Kota Malang mengembalikan dokumen pemenuhan persyaratan keanggotaan dan meminta Partai Politik untuk melengkapi dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

• Dokumen Persyaratan Pendaftaran yang Wajib Diserahkan Kepada Kpu Kota Malang

1. Daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah Kota Malang dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:
 - a. Softcopy melalui Sipol
 - b. Hardcopy
2. Salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk dalam bentuk hardcopy yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik untuk setiap kelurahan dalam satu kecamatan

3. Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU Kota Malang dilakukan selama waktu pendaftaran
4. Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan, KPU Kota Malang menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL
5. Partai Politik yang tidak kembali mendaftar tidak dapat mengikuti tahap Penelitian Administrasi.

- **Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu**

Verifikasi dilakukan untuk penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai politik calon peserta pemilu. Terdapat dua tahapan verifikasi, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian Administrasi

KPU Kota Malang melakukan penelitian administrasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran.

- a. Tahapan selanjutnya, adalah KPU Kota Malang melakukan penelitian administrasi yang meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran sesuai dengan Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam penelitian administrasi juga dilakukan penelitian terhadap dugaan keanggotaan ganda partai politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota partai politik dalam wilayah Kota Malang, serta daftar nama anggota partai politik yang telah dimasukan melalui Sipol. Tahap penelitian administrasi dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober s/d 15 November 2017.

- b. Selanjutnya KPU Kota Malang mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tanggal 17 November 2017.
- c. Tahapan selanjutnya adalah perbaikan penelitian administrasi partai politik calon peserta pemilu. Terdapat 12 partai politik yang melakukan perbaikan. Perbaikan administrasi dilaksanakan pada tanggal 18 November 2017 s/d 1 Desember 2017.
- d. KPU Kota Malang melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen perbaikan partai politik, dan dilaksanakan pada tanggal 2-11 Desember 2017.
- e. Pada tahap selanjutnya adalah pengumuman hasil penelitian administrasi perbaikan dilaksanakan pada tanggal 12-15 Desember 2017.

2. Verifikasi Faktual

Pada tahapan ini, KPU Kota Malang melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan dan keanggotaan. Tujuan verifikasi faktual adalah untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta pemilu yang meliputi:

- a. Jumlah dan susunan Pengurus Partai Politik di tingkat pusat
- b. Pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
- c. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan Pemilu.
- d. Keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/ kota.
- e. Verifikasi faktual KPU Kota Malang dilaksanakan pada tanggal 15 desember 2017-4 Januari 2018.

Hasil verifikasi faktual adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Keterangan	
		MS	BMS
1	Partai Amanat Nasional	√	
2	Partai Berkarya	√	
3	Partai Bulan Bintang	√	
4	PDI Perjuangan	√	
5	Partai Demokrat	√	
6	Partai Gerindra	√	
7	Partai Garuda	√	
8	Partai GOLKAR	√	
9	Partai HANURA	√	
10	Partai PKPI	√	
11	Partai PKS	√	
12	Partai PKB	√	
13	Partai NASDEM	√	
14	Partai PPP	√	
15	Partai PSI	√	
16	Partai PERINDO	√	

B. Pendaftaran Calon Perseorangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

Pendaftaran Calon Peserta perseorangan DPD diawali tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sedangkan verifikasi faktual dilakukan di KPU Kab/Kota seluruh Jawa Timur.

Adapun verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kota Malang terhadap calon perseorangan tersebut secara urut dimulai dari klarifikasi tahap awal, klarifikasi perbaikan sampai klarifikasi faktual, dengan hasil akhir sebagai berikut:

Hasil Akhir Verifikasi

No	Nama Calon	Ket.	Status Klarifikasi
1	Abdul Qadir Amir H	Data lengkap	Sudah selesai
2	Ahmad Mujahid A	Data lengkap	Sudah selesai
3	Misbahul Munir	Data lengkap	Sudah selesai
4	Muhammad Trijanto	Data lengkap	Sudah selesai
5	Supriasto	Data lengkap	Sudah selesai
6	Mashudi	Data lengkap	Sudah selesai
7	Achmad Nurul Ilmi	Data lengkap	Sudah selesai
8	Pudjo Basuki	Data lengkap	Sudah selesai
9	Harbiah Salahuddin	Data lengkap	Sudah selesai
10	Rachmat Harsono	Data lengkap	Sudah selesai
11	Purwo Ali	Data lengkap	Sudah selesai
12	Imam Khodri TF	Data lengkap	Sudah selesai
13	A Syaiful Ismail	Data lengkap	Sudah selesai
14	Nadjib Hamid	Data lengkap	Sudah selesai
15	Muhamad Koderi	Data lengkap	Sudah selesai
16	Adila Azis	Data lengkap	Sudah selesai
17	AA la nyalla Mahmud M	Data lengkap	Sudah selesai
18	Zaiful Anam	Data lengkap	Sudah selesai
19	Andi Yuwono	Data lengkap	Sudah selesai
20	Fairouz Huda	Data lengkap	Sudah selesai
21	Evi Zainal Abidin	Data lengkap	Sudah selesai
22	H. Suhandoyo	Data lengkap	Sudah selesai
23	H. Ahmad Nawardi	Data lengkap	Sudah selesai

Permasalahan

Dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu tahun 2019 beberapa kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, kendala-kendala tersebut antara lain yaitu:

1. Verifikasi pendaftaran peserta pemilu data yang kurang lengkap seperti Surat Keputusan Data Diri Keanggotaan Peserta Pemilu
2. Verifikasi langsung ke lapangan yang di maksud adalah verifikasi kepada keanggotaan peserta pemilu yang di berikan kurang jelas dengan data dan alamat keanggotaan peserta pemilu.
3. Alamat kantor peserta pemilu masih ada yang kurang jelas domisilinya dan ada yang berdomisili di Kabupaten malang

Penyelesaian

1. Untuk data kelengkapan peserta pemilu yang kurang di lakukan perbaikan dan melengkapi berkas yang kurang dengan tahapan selanjutnya.
2. KPU Kota Malang menghubungi peserta pemilu untuk mendatangkan anggota yang alamatnya kurang jelas yang sudah di verifikasi ke lapangan tetapi tidak bertemu dengan anggota peserta pemilu.
3. Menghubungi LO peserta pemilu untuk memberikan alamat kantor yang ada di lingkup kota malang



PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM 2019

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

1



PKB

PARTAI PKB

2



GERINDRA

PARTAI GERINDRA

3



PDI PUSKAWAN

PARTAI PDI-P

4



PARTAI GOLKAR

PARTAI GOLKAR

5



Partai NasDem

PARTAI NASDEM

6



PARTAI GARUDA

PARTAI GARUDA

7



PARTAI BERKARYA

PARTAI BERKARYA

8



PKS

PARTAI PKS

9



PARTAI PERINDO

PARTAI PERINDO

10



PPP

PARTAI PPP

11



PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

PARTAI PSI

12



PAN

PARTAI PAN

13



HANURA

PARTAI HANURA

14



PARTAI DEMOKRAT

PARTAI DEMOKRAT

19



PARTAI HUKUM ADIL

PARTAI PBB

20



PKPI

PARTAI PKPI

Keterangan:

Ada empat partai lokal Aceh:

15. Partai Aceh, 16. Partai Sira, 17. Partai Daerah Aceh, 18. Partai Nahru Aceh



1
PARTAI
KEBANGKITAN
BANGSA

2
PARTAI
GERAKAN
INDONESIARAYA



3
PARTAI
DEMOKRASI
INDONESIA
PERJUANGAN

4
PARTAI
GOLONGAN
KARYA





5
PARTAI
NASIONAL
DEMOKRAT

6

PARTAI
GERAKAN
PERUBAHAN
INDONESIA



7
PARTAI
BERKARYA

8

PARTAI
KEADILAN
SEJAHTERA





9
PARTAI
PERSATUAN
INDONESIA

10
PARTAI
PERSATUAN
PEMBANGUNAN



11
PARTAI
SOLIDARITAS
INDONESIA

12
PARTAI
AMANAT
NASIONAL





13

**PARTAI
HATI NURANI
RAKYAT**

14

**PARTAI
DEMOKRAT**



19

**PARTAI
BULAN
BINTANG**

20

**PARTAI
KEADILAN DAN
PERSATUAN
INDONESIA**





**PEMBENTUKAN
BADAN PENYELENGGARA
AD HOC PPK, PPS
DAN KPPS**

PROSES PEMBENTUKAN BADAN AD HOC: PPK, PPS DAN KPPS DALAM PEMILU 2019

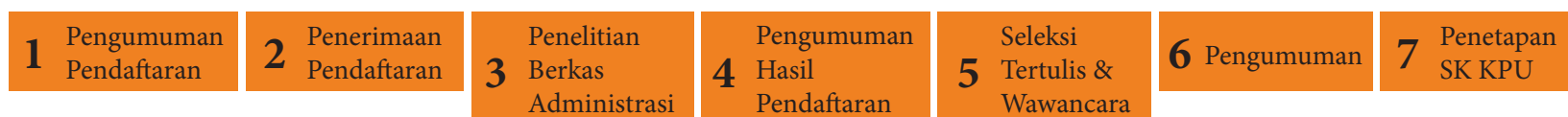
Pembentukan badan Ad Hoc diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan

dan Tata Kerja panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) berjumlah 5 (lima) orang, Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang dan anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang. Terdiri dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

A. Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS)

Mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)



Mekanisme pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)



Dalam pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS, pendaftaran dilakukan di Kantor KPU Kota Malang
Jl. Bantaran No. 6 Purwantoro, Blimbing, Kota Malang pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB



Proses Pendaftaran Anggota PPK dan PPS di Kantor KPU Kota Malang



Tes Tulis Calon Anggota PPS Kota Malang



Tes Wawancara & Tulis Calon Anggota PPK Kota Malang



Tes Wawancara & Tulis Calon Anggota PPK Kota Malang

Pengumuman Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) di 5 (lima) Kecamatan dalam Pemilu 2019

No	Nama	Kecamatan
1	Gusti Kaharudin	Kedungkandang
2	Muhammad Hatif	
3	Sofiansyah Yusron	
4	Isqu Makbullah	
5	Mecky Abdurrahman	
1	Afrida Nurmalasari	Sukun
2	Mualimin	
3	Sukirno	
4	Amin Tohari	
5	Susiyanto	
1	Ahmad Muhaimin	Klojen
2	Nur Aini	
3	Wahyu Isoni, SPI, MP	
4	Wedhanta Pralampita WP	
5	Saiful Akbar	
1	Hidayatur Rokhman	Lowokwaru
2	Hamdan Akbar Safara	
3	Sudari, S.Ag., M.Pd.	
4	Faddol Tukum	
5	Na'ilatul Muinah A.	
1	Januari Triwahjudi	Blimbing
2	Nenny Roostianawati	
3	Sabila Rosyadi	
4	Krismanto	
5	M. Ramadhani	

Pengumuman Nama-nama Anggota PPS di 57 (Lima Puluh
Tujuh Kelurahan) yang tersebar dalam 5 (lima) Kecamatan

Daftar Anggota PPS Klojen		
No	Nama	Kelurahan
1	Roni Pereira	SAMAAN
2	Cindy Octavianti Kusumawardani	
3	Variz Wahyu Dwiputra	
1	Saudah	KIDUL DALEM
2	Irmawan Yutanto	
3	Arif Furqon	
1	Suci Andayani, ST	SUKOHARJO
2	Aisni Nurul Rochmah	
3	Bambang Supriadi	
1	Kuncoro	KASIN
2	Andry Eko Prasetyo	
3	Eko Yulianto	
1	Rivaldi Priambodo	ORO-ORO DOWO
2	Andra Kurniawan	
3	Dwi Yasnardi	
1	M. Riski Y.P.	BARENG
2	Anna Fardhina Sabila	
3	Alfan Ferdiansyah	
1	Joko Santoso	GADING KASRI
2	Rizky Adrianto Apriandana	
3	Sisnoto	
1	Kurniawan Pancolo	PENANGGUNGAN
2	Nabila Az-Zalikhah Ilham	
3	Rudy Kurniawan	
1	W. Diantoro	KAUMAN
2	Suryanto	
3	Dobrian Andariyon	
1	Nurul Khomaryah, SE	RAMPAL CELAKET
2	Ludfi Firmansjah	
3	Muharriyadi	
1	Yusman Jainuddin Jasma Jaya	KLOJEN
2	Anni Machfoediah	
3	Choirul Anam	

Daftar Anggota PPS Blimbing		
No	Nama	Kelurahan
1	Sih Soegeng Prihadi	ARJOSARI
2	Mukhlis Thohir	
3	Ady Rohmat Tory	
1	Sayyidun Mustofa	BALEARJOSARI
2	Jilli Anggraeni	
3	Suyanto Eko Purnomo	
1	Suryo Adi Widodo	BLIMBING
2	Nurtofa	
3	Djoko Pramono	
1	Wahid Masrukan	BUNULREJO
2	Achmad Budiono	
3	Kusmantoro	
1	Catur Bambang H	JODIPAN
2	M. Irfansyah	
3	Qonita Azzahra	
1	Ruwah Joto	KESATRIAN
2	Sulistijo	
3	Eka Hesti Nurwati	
1	Oktawirandy Rajaki	PANDANWANGI
2	Virgina D. Zilma Z	
3	Agus Yulianto	
1	Titin Suhartini	POLEHAN
2	Titik Handayati	
3	Matea Aprianti	
1	Doddy Ferdiansyah	POLOWIJEN
2	Yuni Hardiana	
3	Nur Ahmad Abiyyu	
1	M. Machmudrief	PURWANTORO
2	M. Faizhol Hamza	
3	Ratu Balqis	
1	Y.m Soehardji	PURWODADI
2	Chusnul Chotimah	
3	Nasuki	

Daftar Anggota PPS Kedungkandang		
No	Nama	Kelurahan
1	Linawati	KOTALAMA
2	Yuli Sujarwadi	
3	Triyono Hadi Mulyo	
1	Sulastris Ningsih	MERGOSONO
2	Nahdatul Rizki Maulia	
3	Riono	
1	Adibah Khairunnisa Marwa	BUMIAYU
2	Imam Majid Ghifari	
3	Iva Susanti	
1	Ir. Sukim Prayitno	WONOKOYO
2	M. Wari	
3	Triyono Hadi Mulyo	
1	Andika Candra Wulan	BURING
2	Duwi Agustina	
3	Fajar Limyanto	
1	Rakrayan Lagawan Sheda	KEDUNGKANDANG
2	Lis Naryadi	
3	Basroni	
1	Dzulqornain Kirom	LESANPURO
2	Susanto Eko Budi Purnomo	
3	Meryana Deasy Karina Sudarsono	
1	Bambang Kuncoro Heru	SAWOJAJAR
2	Murdiastutik	
3	Andi Fikri Zaidan	
1	Andik Setiawan	MADYOPURO
2	Emik Gandamana	
3	Radina Canggih Rosidana	
1	Yudha Prasetyo	CEMOROKAN-DANG
2	Kusdwiyanto	
3	Muchlasol Al Mahuda	
1	Joko Wahyudi	ARJOWINANGON
2	Muhammad Annasrudin	
3	Nasikhin	
1	Nurul Laili	TLOGOWARU
2	Sofiah, SH	
3	Susiati, SE	

Daftar Anggota PPS Sukun		
No	Nama	Kelurahan
1	Bakti Suryanto	BAKALANKRAJAN
2	Ahmad Bakhtiar Jazuli	
3	Dimas Prayogo	
1	Heroe Mei Wulandoko	BANDULAN
2	Dwi Rahayu Wulandari	
3	Dyah Ayu Wijayanti	
1	Djarnoko Prihambodo	BANDUNGREJO-SARI
2	Agung priyono	
3	Sarifah Kusuma Ambami	
1	Hariyadi	CIPTOMULYO
2	Lita Wahyuning	
3	Laely Firdausi	
1	Lugito Siswono	GADANG
2	Lisa Mariyati	
3	Luthfi Nur Z	
1	Imam Soebyanto	KARANGBESUKI
2	Sri Indah Murdiati	
3	Mokhammad Imron	
1	H. Nurhadi	KEBONSARI
2	Dewi Lukitasari	
3	Rizky Indah	
1	Mohamad Aziz	MULYOOREJO
2	Alfan Akbar Yusuf,M.si	
3	Reysita Karina	
1	Frendy Indra A	PISANGCANDI
2	Desty Fitria Amanah	
3	Septi Diyah Wulansari	
1	Ibrahim Syah	SUKUN
2	Budi Setiawan	
3	Silvi Zakiya Zaini	
1	Heri Marsudi	TANJUNGREJO
2	Tatang Nurdiani	
3	Sugeng Winarno	

Daftar Anggota PPS Lowokwaru		
No	Nama	Kelurahan
1	Nur Kusen	TASIKMADU
2	Amin Tohari	
3	Surata, SE	
1	Ninda Prafitasari	TUNGGULWULUNG
2	Moh. Sahril	
3	Ridwan Wahyuwagung Leksa	
1	Dyah Mursidah	MERJOSARI
2	Nur Ali	
3	Rudi Hartono	
1	Evi Yandari. Dra	TLOGOMAS
2	A. Aziz Maulana, SH., MH.	
3	Khoirul Setyawan	
1	Faddol Tukum	DINOYO
2	Erny Kartikawati	
3	Suharto	
1	Budi Santoso	SUMBERSARI
2	Agus Budiyo	
3	Kastur	
1	Medi Harsono	KETAWANGEDE
2	Sutrisno	
3	Sugeng Budiono	
1	Sidik Purwono	JATIMULYO
2	Suyono	
3	Yayuk Sunaryati, SE.	
1	Drs.AG. Edi Purwidiatmoko, MT.	TUNJUNGSEKAR
2	Ahmad Kasim	
3	Moch. Sholeh	
1	Dewi kartini	MOJOLANGU
2	Jerry Dwikorawati	
3	Teguh Santoso	
1	Iwan Wiseno	TULUSREJO
2	Drs. R. Moh. Amin Taufik	
3	Hanung Kriswandono	
1	Mohammad Imam Sholihudin	LOWOKWARU
2	Primanda Rafif	
3	Arif Moejiono	



Pelantikan PPK Pemilu 2019



Pelantikan PPS Pemilu 2019

B. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

1. Tahapan pembentukan KPPS dimulai 28 Februari 2019 sampai dengan 27 Maret 2019. KPU kota Malang mengumumkan informasi pendaftaran KPPS di laman KPU kota Malang, papan pengumuman di Kantor KPU Kota Malang, Kantor Kecamatan, dan media sosial KPU Kota Malang.
2. Mekanisme Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS dilakukan oleh PPS dengan rangkaian kegiatan:
 - a. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS selama 6 (enam) hari di Kantor Kelurahan dan / atau tempat strategis lainnya;
 - b. Penerimaan pendaftaran calon Anggota KPPS dalam 2 rangkap berkas selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman Pendaftaran berakhir;
 - c. Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa pendaftaran berakhir;
 - d. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota KPPS paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi;
 - e. Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Calon Anggota KPPS selama 6 (enam) hari setelah Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi;
 - f. PPS menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi Calon anggota KPPS sampai hari pelaksanaan Sumpah/Janji KPPS;
 - g. PPS menyampaikan hasil seleksi Calon anggota KPPS kepada KPU Kota Malang melalui PPK paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara;
 - h. Sumpah/Janji KPPS dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 April 2019.
3. Dalam hal tidak ada peserta yang mendaftar pada seleksi terbuka dan/atau persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kota Malang dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli pemilu, lembaga profesi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan Anggota KPPS.
4. Masa kerja Anggota KPPS dimulai pada tanggal 10 April 2019 sampai dengan 9 Mei 2019.
5. Pengangkatan Anggota KPPS dilaksanakan dengan mekanisme sumpah / janji Ketua KPPS yang dipandu oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Malang dan penandatanganan Pakta Integritas oleh Ketua KPPS.
6. KPU Kota Malang juga meminta 2 (dua) orang petugas yang menangani ketertiban, keamanan, dan ketentraman di setiap TPS yang berasal dari satuan pertahanan sipil atau perlindungan masyarakat kepada Pemerintah daerah untuk selanjutnya menyampaikan daftar nama yang diterima tersebut kepada PPs untuk ditetapkan.
7. KPU Kota Malang melakukan monitoring dan supervisi terhadap proses pembentukan KPPS.



DATA JUMLAH KPPS PEMILU 2019 KOTA MALANG

KABUPATEN/KOTA : KOTA MALANG

PROVINSI

: JAWA TIMUR

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH KPPS	JUMLAH LINMAS	KETERANGAN	
1	BLIMBING	1	Arjosari	27	189	54	
		2	Balearjosari	24	168	48	
		3	Blimbing	23	161	46	
		4	Bunulrejo	88	616	176	Ada penambahan 11 TPS di Lapas laki-laki
		5	Jodipan	34	238	68	
		6	Kesatrian	24	168	48	
		7	Pandanwangi	83	581	166	
		8	Polehan	54	378	108	
		9	Polowijen	31	217	62	
		10	Purwantoro	82	574	164	
		11	Purwodadi	49	343	98	
JUMLAH BLIMBING			519	3.633	1.038		
2	KEDUNGKANDANG	1	Arjowinangun	27	189	54	
		2	Bumiayu	48	336	96	
		3	Buring	34	238	68	
		4	Cemorokandang	34	238	68	
		5	Kedungkandang	29	203	58	
		6	Kotalama	89	623	178	
		7	Lesanpuro	52	364	104	
		8	Madyopuro	60	420	120	
		9	Mergosono	49	343	98	
		10	Sawojajar	72	504	144	
		11	Tlogowaru	19	133	38	
		12	Wonokoyo	17	119	34	
JUMLAH KEDUNGKANDANG			530	3.710	1.060		
3	KLOJEN	1	Bareng	42	294	84	
		2	Gading Kasri	23	161	46	
		3	Kasin	38	266	76	
		4	Kauman	26	182	52	
		5	Kidul Dalem	17	119	34	

		6	Klojen	18	126	36	
		7	Oro Oro Dowo	31	217	62	
		8	Penanggungan	27	189	54	
		9	Rampal Celaket	19	133	38	
		10	Samaan	28	196	56	
		11	Sukoharjo	28	196	56	
JUMLAH KLOJEN				297	2.079	594	
4	LOWOKWARU	1	Dinoyo	30	210	60	
		2	Jatimulyo	55	385	110	
		3	Ketawanggede	15	105	30	
		4	Lowokwaru	62	434	124	
		5	Merjosari	43	301	86	
		6	Mojolangu	66	462	132	
		7	Sumbersari	23	161	46	
		8	Tasikmadu	19	133	38	
		9	Tlogomas	38	266	76	
		10	Tulusrejo	45	315	90	
		11	Tunggulwulung	24	168	48	
		12	Tunjungsekar	46	322	92	
JUMLAH LOWOKWARU				466	3.262	932	
5	SUKUN	1	Bakalan Krajan	26	182	52	
		2	Bandulan	45	315	90	
		3	Bandungrejosari	89	623	178	
		4	Ciptomulyo	38	266	76	
		5	Gadang	53	371	106	
		6	Karang Besuki	53	371	106	
		7	Kebonsari	28	196	56	Ada penambahan 2 TPS di Lapas wanita
		8	Mulyorejo	45	315	90	
		9	Pisang Candi	42	294	84	
		10	Sukun	52	364	104	
		11	Tanjungrejo	82	574	164	
JUMLAH SUKUN				553	3.871	1.106	
JUMLAH TOTAL KOTA MALANG				2.365	16.555	4.730	

C. Penggantian Antar Waktu (PAW) Badan Ad Hoc Pemilu 2019

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 63 ayat (1) menyatakan:

Anggota PPK, PPS dan KPPS berhenti antarwaktu karena:

- Berhalangan tetap
- Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- Diberhentikan dengan tidak hormat

Selanjutnya Pasal 63 ayat (2) menyatakan:

Anggota PPK, PPS dan KPPS berhalangan tetap meliputi keadaan:

- Meninggal dunia
- Tidak diketahui keberadaannya; atau
- Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen



Pelantikan & Pengambilan Sumpah/Janji
Pengganti Antar Waktu (PAW) PPS

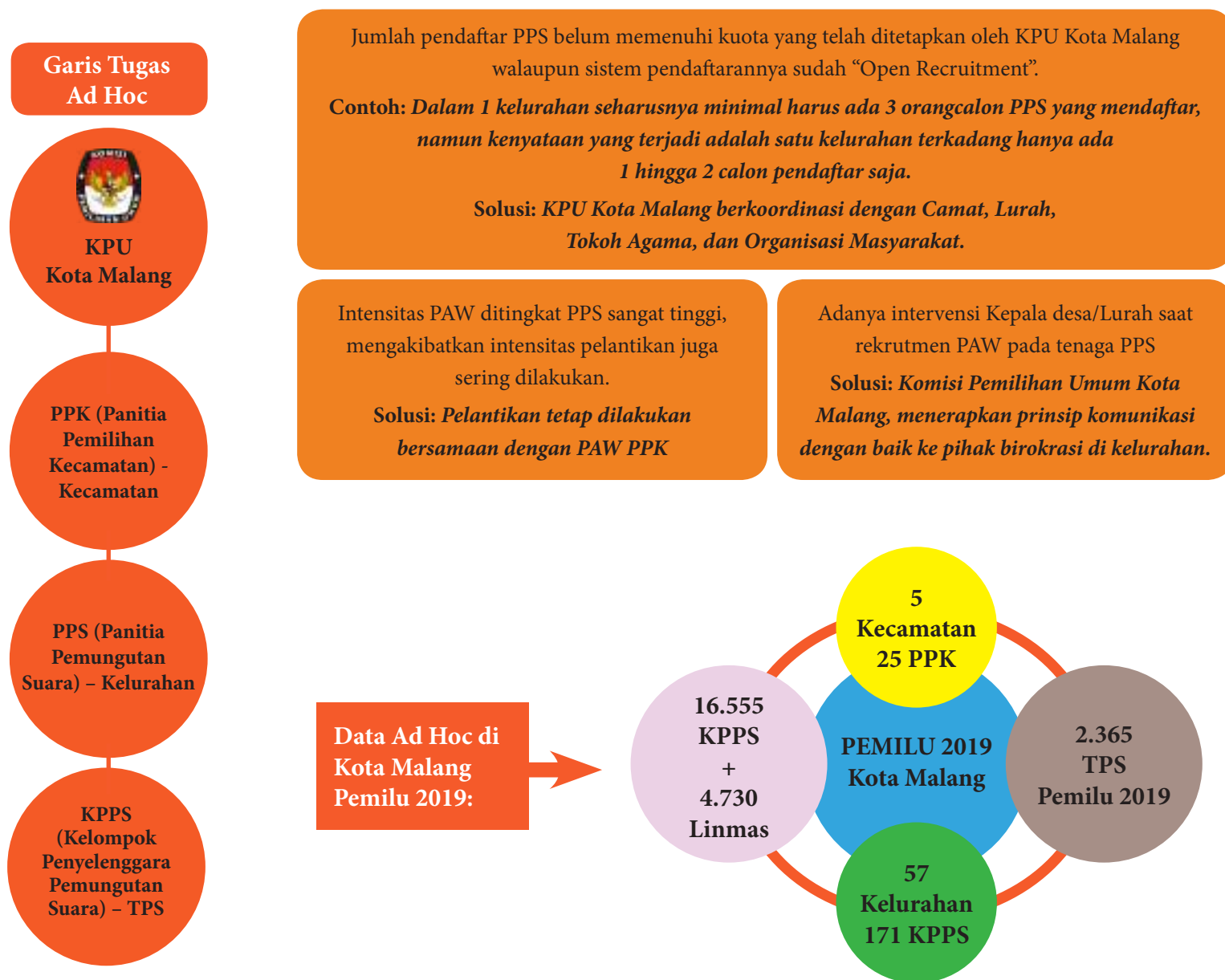


Pelantikan & Pengambilan Sumpah/Janji
Pengganti Antar Waktu (PAW) PPK

**Penggantian Antar Waktu (PAW) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dikarenakan salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan telah terpilih dan masuk menjadi anggota Bawaslu Kota Malang.*

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam melaksanakan tahapan pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2019 ada beberapa permasalahan yang muncul. Seiring waktu permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan agar tidak mengganggu tahapan lainnya. Adapun permasalahan yang muncul dan solusi dalam menyelesaikannya adalah:



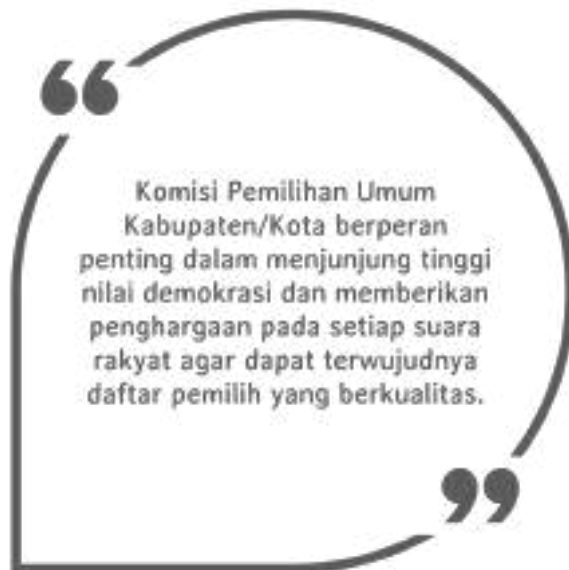
**PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DAN
PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH**



TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH PEMILU DI KOTA MALANG 2019

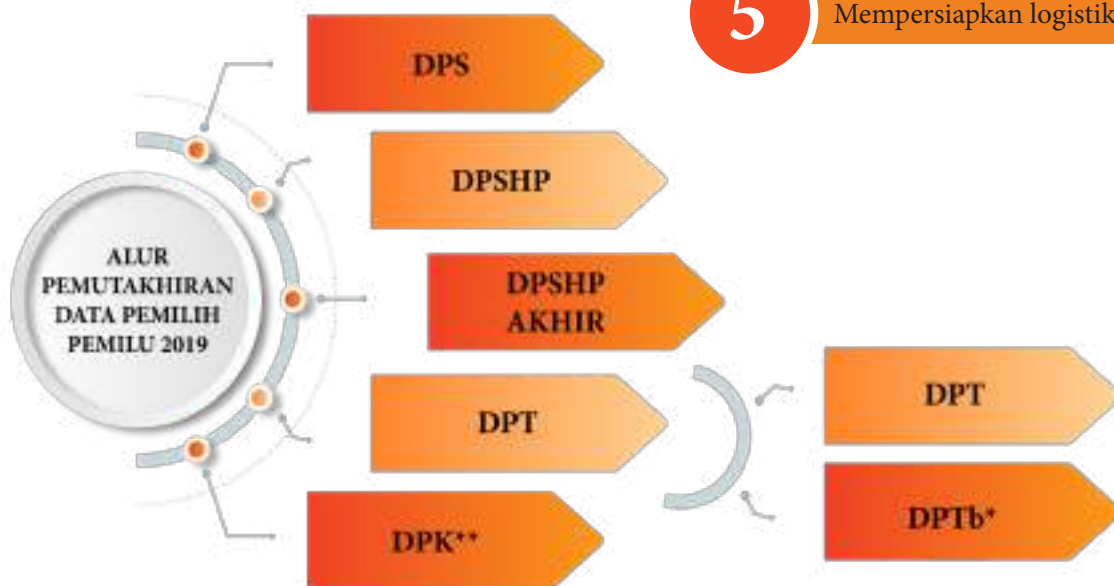
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satu tugas dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih.

Agar dapat menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang memastikan semua pemilih yang memiliki hak suara terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. **Dalam hal ini pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dimulai dari data pemilu terakhir yaitu data pemilih pilkada serentak Kota Malang tahun 2018.**



Tujuan dari Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019

- 1 Memastikan seluruh pemilih terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (secara komprehensif)
- 2 Memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi real/ faktual pemilih (akurat dan up to date - nama & alamat)
- 3 Memastikan tidak mengandung nama-nama pemilih yang tidak berhak memilih
- 4 Melayani pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk menggunakan hak pilihnya
- 5 Mempersiapkan logistik pemilu



* Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah data pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut tetapi dapat memberikan suaranya di TPS lain

** Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Cara jadi DPT online



A. Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan:

- tidak menggabungkan kelurahan/desa
- kemudahan pemilih ke TPS
- tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda
- hal-hal berkenaan dengan aspek geografis
- jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara

B. Mekanisme Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilu 2019

Mekanisme penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Pemilu 2019 bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 adalah dengan menggunakan Data DPT Pilkada 2018 ditambah dengan pemilih baru. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2018 bertempat di Kantor KPU Kota Malang Jalan Bantaran No.6 Malang.

Setelah adanya penetapan Daftar Pemilih Sementara maka KPU Kota Malang menyampaikannya kepada PPS melalui PPK agar diinformasikan kepada masyarakat Kota Malang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mencermati DPS serta memberikan masukan dan tanggapan.

Berikut ini adalah hasil Rapat Pleno Penyusunan Daftar Pemilih Sementara KPU Kota Malang:

Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 Kota Malang

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	Blimbing	11	507	64.558	68.260	132.818
2	Kedungkandang	12	525	69.321	70.832	140.144
3	Klojen	11	297	37.056	39.666	76.722
4	Lowokwaru	12	466	57.068	59.386	116.454
5	Sukun	11	553	71.541	73.277	144.818
TOTAL		57	2.348	299.544	311.412	610.956

Penyusunan Daftar pemilih sementara (DPS) sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui tahapan-tahapan perbaikan (DP-SHP -1 sampai dengan DPSHP - 3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan dalam rapat pleno terbuka oleh KPU Kota Malang yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 Kota Malang

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	Klojen	11	297	37.759	40.429	78.188
2	Blimbing	11	508	65.155	69.261	134.416
3	Kedungkandang	12	530	71.324	72.659	143.983
4	Sukun	11	551	71.831	73.500	145.331
5	Lowokwaru	12	466	59.295	61.972	121.267
TOTAL		57	2.352	305.364	317.821	623.185

Berdasarkan proses pemutakhiran daftar pemilih Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang menyimpulkan beberapa hal penting, di antaranya:

1. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum 2019 sejumlah 2.352 (Dua ribu tiga ratus lima puluh dua).
2. Dalam hal pemutakhiran data pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Malang menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dalam hal pengolahan Data Pemilih serta efektif dalam menghilangkan kegandaan data. Terkait kerja pemutakhiran tersebut, tim Data Komisi Pemilihan Umum Kota Malang turun membantu daerah-daerah yang bermasalah dalam hal pengumpulan dan pengolahan data pemilih;
3. Pada penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada tanggal 7 Desember 2018 ditetapkan jumlah pemilih warga Kota Malang sebanyak 623.185 (Enam ratus

dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima) yang terdiri dari 305.364 (Tiga ratus lima ribu tiga ratus enam puluh empat) pemilih laki-laki dan 317.821 (Tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh satu) pemilih perempuan;

4. Bagi pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) masih dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el.
5. Ada penambahan TPS DPTb di dua Lapas yakni Lapas Kelas 1 Lowokwaru sebanyak 11 TPS dan Lapas Perempuan Sukun sebanyak 2 TPS sehingga total 13 TPS DPTb. Dengan demikian jumlah TPS di Kota Malang pemungutan suara 2019 sebanyak 2352 TPS ditambah 13 TPS jadi total jumlah TPS menjadi 2365.



Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) Serentak



Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019



Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019



Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Umum 2019 Kota Malang



Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Sementara (DPSHP)
Pemilihan Umum 2019



PENATAAN DAN PENETAPAN DAPIL PEMILU 2019

Penataan, pemetaan dan penetapan daerah pemilihan (Dapil) menjadi salah satu awal pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, yang akan dilaksanakan serentak antara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, antara lain:

1 Prinsip-Prinsip penataan daerah pemilihan

Data kependudukan dan jumlah kursi

2

3 Penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Tugas dan wewenang KPU

4

E sensi penataan Dapil ialah dalam rangka pembagian kursi secara proporsional atas keterwakilan calon di suatu daerah. Alokasi kursi dalam Dapil menunjukkan derajat representasi calon. Selain itu pengaturan Dapil merupakan cerminan keterwakilan calon terhadap masyarakat yang diwakilinya. Dengan kata lain pengaturan Dapil ialah keterwakilan dan kesetaraan calon di suatu daerah.

Komisi Pemilihan Umum dalam penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil) mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 92 dan Peraturan KPU nomer 5 tahun 2013, pasal 3 Penetapan Dapil dan alokasi kursi diatur dengan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

Tujuh Prinsip Penataan dan Penetapan Dapil:

1. Kesetaraan nilai suara

Dalam konteks ini harga satu kursi setara dengan Dapil yang lain, dimana satu orang memiliki hak yang sama untuk

memberikan suaranya. Prinsip ini dikenal dengan prinsip one person, one vote, one value. Kesetaraan pemberian suara ini merupakan indikasi bahwa tidak ada perbedaan antar pemilih di suatu daerah dengan daerah lain. Sebaliknya pemilih yang mencoblos dua kali diancam dengan sanksi pidana dan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional.

2. Dalam Pemilu 2014 sistem yang diterapkan ialah sistem proporsional terbuka.

Pemilih berhak memilih daftar calon di ranah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilih mencoblos nama atau foto calon (DPD), dimana calon yang memperoleh suara terbanyak yang akan memperoleh kursi di parlemen

3. Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan proporsionalitas dalam konteks ini ialah kesetaraan kursi antar Dapil, agar terjadi perimbang-

an alokasi kursi di setiap Dapil. Satu Dapil dengan Dapil yang lain memiliki harga kursi yang setara atau minimal mendekati.

4. Integralitas wilayah

Dalam konteks ini beberapa Kabupaten/Kota, Kecamatan atau Kelurahan yang disusun menjadi satu Dapil yang saling berbatasan, maka harus memperhatikan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi. Penataan Dapil tidak boleh menyimpang atau melanggar dari kondisi geografis, karena hal ini akan menyulitkan dalam transportasi dan komunikasi antar penduduk dengan calon anggota legislatif.

5. Berada dalam cakupan yang sama (*coterminous*)

Penyusunan Dapil anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu atau beberapa wilayah Kabupaten/ Kota harus dalam satu kesatuan Dapil DPR. Demikian

juga dengan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk merupakan gabungan Kecamatan atau satu kesatuan dengan Dapil anggota DPRD Provinsi.

6. Kohesivitas

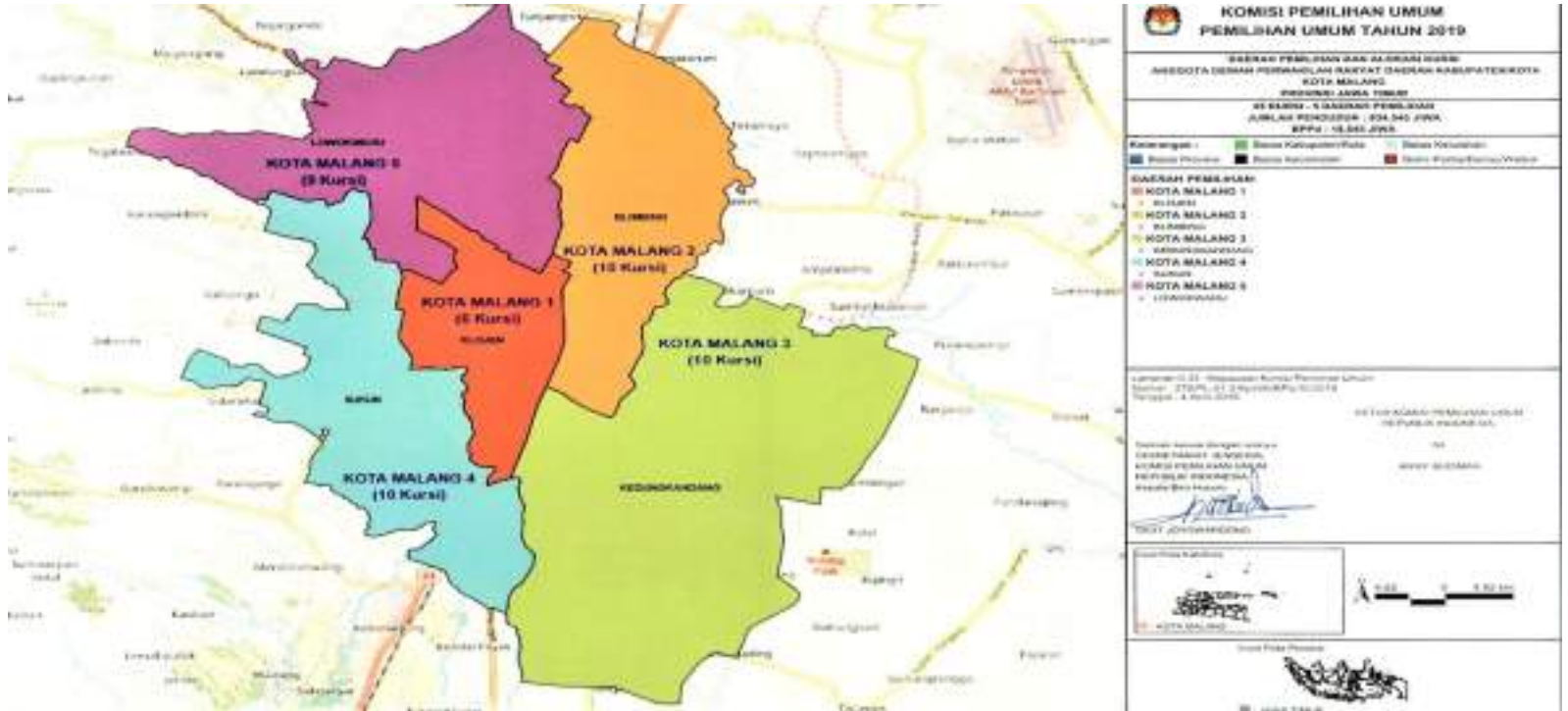
Penyusunan Dapil dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. Faktor sejarah dan adat istiadat menjadi penting dalam penataan Dapil, karena masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal.

7. Kesenambungan

Penyusunan Dapil Pemilu 2019 haruslah memperhatikan penataan Dapil Pemilu 2014, kecuali alokasi kursi di Dapil melebihi 12 kursi atau bertentangan dengan ke enam prinsip tersebut di atas. Dengan memperhatikan Dapil Pemilu 2014, maka Pemilu 2019 menerapkan prinsip kesinambungan.



Peta Daerah Pemilihan



Simulasi Pemetaan Dapil di Kota Malang (Perhitungan Tahap I)

SIMULASI PEMETAAN DAPIL DI KOTA MALANG

Kota : Kota Malang
 Jumlah Penduduk : 834,545
 Alokasi Kursi : 45
 BPPd : 18,545.44

NO.	DAPIL KECAMATAN	DAPIL	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI (JUM PEND/BPPS)	PEMBULATAN
1	Kedungkandang	1	194,186	10.47	10
2	Sukun	2	194,180	10.47	10
3	Klojen	3	102,204	5.51	5
4	Lowokwaru	4	159,407	8.60	8
5	Blimbing	5	184,568	9.95	9
JUMLAH			834,545		42

Sisa Kursi: 45-42 = 3

PENGHITUNGAN TAHAP II

Simulasi Pemetaan Dapil di Kota Malang (Perhitungan Tahap II)

A	BPPd = 18,545.55	B	C
---	------------------	---	---

NO.	DAPIL KECAMATAN	DAPIL	JUMLAH PENDUDUK	KURSI TAHAP I	SISA PENDUDUK	PERINK SISA PENDUDUK	ALOKASI SISA KURSI	TOTAL KURSI
1	Kedungkandang	1	194,186	10	8,731.6	4	0	10
2	Sukun	2	194,180	10	8,725.6	5	0	10
3	Klojen	3	102,204	5	9,476.8	3	1	6
4	Lowokwaru	4	159,407	8	11,043.4	2	1	9
5	Blimbing	5	184,568	9	17,659.0	1	1	10
JUMLAH			834,545	42				45

Sisa Kursi: $45 - 42 = 3$

Rumus: $B - (C \times A)$

Berdasarkan Data Dispendukcapil Juli 2017

SIMULASI PENGHITUNGAN KURSI TIAP DAPIL DI KOTA MALANG PEMILU TAHUN 2019

Penghitungan Tahap I

Kota : Kota Malang
 Jumlah Penduduk : 901,085
 Alokasi Kursi : 45
 BPPd : 20,024.11

NO.	DAPIL KECAMATAN	DAPIL	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI (JUM PEND/BPPS)	PEMBULATAN
1	Kedungkandang	1	210,971	10.54	10
2	Sukun	2	208,348	10.40	10
3	Klojen	3	110,246	5.51	5
4	Lowokwaru	4	173,643	8.67	8
5	Blimbing	5	197,877	9.88	9
JUMLAH			901,085		42

Sisa Kursi: $45 - 42 = 3$

PENGHITUNGAN TAHAP II

A	BPPd = 20,024.11	B	C
---	------------------	---	---

NO.	DAPIL KECAMATAN	DAPIL	JUMLAH PENDUDUK	KURSI TAHAP I	SISA PENDUDUK	PERINK SISA PENDUDUK	ALOKASI SISA KURSI	TOTAL KURSI
1	Kedungkandang	1	210,971	10	10,729.9	3	1	11
2	Sukun	2	208,348	10	8,106.9	5	0	10
3	Klojen	3	110,246	5	10,125.4	3	0	5
4	Lowokwaru	4	173,643	8	13,450.1	2	1	9
5	Blimbing	5	197,877		17,660.0	1	1	10
JUMLAH			901,085	42				45

Sisa Kursi: $45 - 42 = 3$

Rumus: $B - (C \times A)$

Jumlah Penduduk DIKURANGI dari hasil PERKALIAN Kursi Tahap 1 dan BPOPd



Agenda Sosialisasi Penyusunan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kota Malang Pemilihan Umum 2019



Agenda Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Malang dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang, Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan Kota Malang dalam Pemilu Tahun 2019



Agenda Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Malang dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang, Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan Kota Malang dalam Pemilu Tahun 2019



PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA



PROSES KEGIATAN PELAKSANAAN PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DPRD KOTA MALANG



A. Bakal Calon Anggota DPRD Kota Malang

No. Partai	Partai	Jumlah Bakal Calon	Jenis Kelamin		Persentase Perempuan
			L	P	
1	PKB	45	31	14	31.11%
2	GERINDRA	45	30	15	33.33%
3	PDI-P	45	31	14	31.11%
4	GOLKAR	45	28	17	37.78%
5	NASDEM	45	30	15	33.33%
6	GARUDA	0	0	0	0
7	BERKARYA	36	19	17	47.22%
8	PKS	45	31	14	31.11%
9	PERINDO	45	31	14	31.11%
10	PPP	38	24	14	36.84%
11	PSI	42	26	16	38.10%
12	PAN	45	29	16	35.56%
13	HANURA	36	19	17	47.22%
14	DEMOKRAT	40	26	14	35.00%
19	PBB	29	15	14	48.28%
20	PKPI	0	0	0	0
JUMLAH		581	370	211	36.32%

B. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Malang Pemilu 2019

Penyusunan Daftar calon Anggota DPRD Kota Malang dari Bakal Calon anggota sampai pada penyusunan Daftar Calon Tetap DCT melalui proses sebagaimana tahapan-tahapan pencalonan.

Adapun Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Malang berdasarkan rapat pleno terbuka penetapan DCT Anggota DPRD Kota Malang sebagai berikut:

No. Partai	Partai	Jumlah Daerah Pemilihan dalam DCT	Jumlah Calon dalam DCT	Jenis Kelamin		Persentase Perempuan
				L	P	
1	PKB	5	45	31	14	31,11%
2	GERINDRA	5	45	30	15	33.33%
3	PDI-P	5	45	31	14	31.11%
4	GOLKAR	5	42	25	17	40,48%
5	NASDEM	5	43	28	15	34,88%
6	GARUDA	5	0	0	0	0
7	BERKARYA	5	34	18	16	47,06%
8	PKS	5	42	28	14	33,33%
9	PERINDO	5	44	30	14	31,82%
10	PPP	5	33	19	14	42,42%
11	PSI	5	18	12	6	33,33%
12	PAN	5	42	27	15	35,71%
13	HANURA	5	35	19	16	45,71%
14	DEMOKRAT	5	40	26	14	35,00%
19	PBB	5	21	11	10	47,62%
20	PKPI	5	0	0	0	0
JUMLAH			529	335	194	36.67%

Klojen

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Arief Wahyudi, SH.
2	Ir. Sumartiningsih
3	Supriyadi
4	Nur Syahrudin, A.P
5	Hj. Ninik Indayani, SPI.
6	Abdul Muis, SE.

Blimbing

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Abdurrochman, SH.
2	H. Didiak Saksono, SE.
3	Hartatik, SE
4	H. M. Muzamil
5	Syahrul Moktar Afandi
6	Astutik
7	Zaini Nashiruddin, SE.
8	Elyus Hendi Humaidi Anm, S.Pi.
9	Yuli Isrini, S.Pd.
10	Nur Kasianto

Kedungkandang

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Dra. Hj. Ngatmiati, M.Pd.
2	Abd. Wahid
3	Drs. H. Marzuki
4	Budi Sutomo, ST.
5	H. Rosidi, S.Ag.
6	Ageng Nazila Wulandari
7	Ir. H. Abd. Khalik
8	M. Nur Junaedi Amin
9	Ike Kisnawati
10	Niriyanto

Sukun

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Mulyanto, SH.
2	H. Siswo Waroso, SE.
3	Diana Maf'ulla, S.Sos
4	Arifin, SH.
5	Drs. H. Fathol Arifin, M.H
6	Melinda Ayu Santika
7	Andi Setiawan
8	Afifah Setiani
9	Muhammad Anas Muttaqin, S.Psi.
10	Karipin, ST.

Lowokwaru

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Ahmad Farih Sulaiman, S.Pd.
2	Rebra Manggala Putra, SE.
3	Hj. Narwati, Dra, M.K.Pd.
4	Ir. Muslikh
5	Muzayin Drs.
6	Rifka Astriana
7	David Rahmat Hakiki
8	Anik Chamidah, S.H
9	Dedi Iskandar, S.Sos.



Klojen

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Fahrur Roozi R
2	Rimzah
3	Ambar Sutjahjanti, S.E., S.T., M.T.
4	Firman Ibnu Yudha
5	Kuncoro Wibowo
6	Dra. Sulistiani

Blimbing

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Letkol. (Purn) Suparno
2	Kol. (Purn.) Drs. Djoko Hirtono SSTF, M.Si.
3	Kusuma Retno Rahayoni
4	Andri Wiwanto
5	Mulyadi
6	Tri Panglipur
7	Danny Agung Prasetyo
8	Heri Prastowo
9	Dra. Lydia Latih Muhartani
10	Agus Rachmad Hakim

Kedungkandang

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Mohammad Ula, S.H.
2	Ninuk Dartiwi
3	Heru Purnomo, S.T.
4	Nurul Faridawati
5	H. Agung Mustofa
6	Muhammad Muhsin
7	Ir. Iman Wahyudi
8	Dwi Yunta Kurniawati
9	H. Moch Tohir, S.H.
10	Ony Risdian

Sukun

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Dra. R.M. Een Ambarsari
2	Dharman Susanto
3	Imam Kanapi, S.E.
4	Randy Gaung Kumaraning Al Islam
5	Fifi Sumanti
6	Dian Santoso
7	Rully Agus Tristanto
8	Eka Wahyu Utami
9	Mohamad Roys Annas Yusuf, S.T.
10	Wimboningsih Nareswari

Lowokwaru

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Teguh Puji Wahyono, S.E., M.M.
2	Lelly Thresiyawati
3	Sri Nurhayati, A.Md.
4	Eko Yulanto, S.Sos.
5	Agung Darsono
6	Dwi Astutik, S.Pd.
7	Hadi Sulistijo
8	Mochammad Asrad
9	Rachmat Hidayat



Klojen

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Iwan Mahendra, S.Sos., M.AP.
2	Yusana Intiyaswati, S.E.
3	Dr. Teguh Mulyono
4	Jerufael Manoradja, S.I.Kom.
5	Mahmeru
6	Etty Damayanti, M.S.

Blimbing

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Eko Herdiyanto
2	Sugiono
3	Dwi Winarni, S.E.
4	Siswandi
5	Taufiq Huda
6	Dra. Fenti Setianingtyas
7	Hari Imam Handoko
8	Bambang Heri Susanto
9	Wiwiek Sukesie D. RR., Dra., M.Si.
10	Harvad Kurniawan R., S.H.

Kedungkandang

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Drs. Agoes Marhaenta, M.H.
2	Luluk Zuhriyah
3	Arief Hermanto, S.T.
4	Sutikno, S.Sos.
5	Yusuf Tri Ananta
6	Endang Yulianti
7	Sunaryo
8	Amithya Ratnanggani S.
9	Ruhadi Rarundra
10	Gibran Yusak Reynaldi, S.Pn.

Sukun

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	H. Wanedi
2	Rosani Projo
3	Lea Mahdarina, S.T.
4	Hadi Susanto, S.H.
5	Edy Hermanto, S.H.
6	Sri Murti, S.E.
7	Sihwantjana
8	Agung Nugrahawan, S.T., S.Sos.
9	Wury Asri, S.H.
10	Ferry Kurniawan

Lowokwaru

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	I Made Rian Diana Kartika, S.E.
2	Sugianto
3	Nurul Setyowati, S.E.
4	Andy Lasah Bandar, S.H.
5	Suhartono, A.Md.A.K.
6	Sundari
7	Siswoyo
8	Nurul Aini Roisatul, S.Psi.
9	Drs. Edhi Aprilianto



Klojen

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Nugroho Agus Widjanarko, S.T.
2	Ana Rokhmatus Sa'diyah, S.H., M.H.
3	Moh Arif Budiarmo, S.T.
4	Dra. Noor Handjaningsih, M.M.Pd.
5	Drs. Ireng Sugiri, S.E., M.Si.
6	M. Bhakti Negoro, S.T.

Blimbing

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Umiati, S.H.
2	Teguh Darwanto, S.H.
3	Drs. Samsul Arifin
4	Sumadi
5	Ahmad Arief, S.T.
6	Jirah Puji Rahayu, S.Pd.
7	Hj. Aminah Toeti K., S.H.
8	Eddy Widjanarko, S.AP.
9	Fuad Ardiansyah
10	Nof Faisal Al Muchtar, S.I.P.

Kedungkandang

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Ahsan Ismail
2	Ida Kade Sumberjaya
3	Sri Rachmawati, S.H.
4	Suryadi, S.Pd.
5	Drs. Bambang Agus Riyanto
6	Susi Dwi Herawati
7	Gendot Santoso, S.E.
8	Yusra Soedirman, S.A.P., M.Si
9	Yuhana Handayani
10	Mindayati Puspitorini

Sukun

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Drs. H. Rahman Nurmala, M.M.
2	Dra. Hj. Yekti Sugiarti
3	Drs. Yuliono, M.Sc.
4	Yuli Suhartatik, S.E.
5	Sahmawi, S.Psi.
6	Sri Djuma'ati Ningsih
7	Hari Sujito, S.P.
8	Moh Daviq
9	Ninik Hermiati

Lowokwaru

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Hj. Retno Sumarah, S.E., M.M.
2	Dedi Sukariyono, S.E., M.M.
3	M. Samsul efendi, S.E.
4	Mohammad Reza Januar, S.E.
5	Mimin Sulistyoningsih, S.H., M.Hum.
6	Hj. Indahjati, S.H.
7	Ahan Syahrul Arifin, S.E., M.E.



Klojen

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Gagah Soeryo Pamoekti
2	Gatot Subianto, S.T.
3	Wahyu Ika Setyaningsih, S.Sos.
4	Yuliana Safitri
5	Taufan Nudin
6	Hj. Anggit Krekating Galih

Blimbing

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Sunarto Abbas
2	The Haryono
3	Eni Windariati
4	Rochman
5	Mega Wahyu Rifianti W., S.E.
6	Moch Syamsul
7	Djoko Sunarto, S.E.
8	Diena Widyastuti, S.TP., M.Si.
9	R. Arief Andrijanto, S.E.

Kedungkandang

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Siti Romlah
2	Dr. Adi Hartono
3	Widianto, A.Md.
4	Isnin Cahyo Pratiwi
5	Roy Pangarso
6	Syaifullah, S.Sos.
7	Drs. Bambang Suharto
8	Imam Wahyu Dinanti, S.Sos.
9	Herlina Budi Prihatiningsih, S.E.
10	Drs. Bambang GW

Sukun

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Istilah Mustofa, S.H.
2	Drs. Suyadi, M.M.
3	Andjar Sasono
4	Hendrikus Ndoki, S.H.
5	Agus Wahyudi
6	Ellysabet, S.Th.
7	Drs. Agus Endra Suharno
8	Endang Purwaningsih, S.H.
9	Eko Bagianto
10	Abd. Aziz, M.Pd.

Lowokwaru

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Sabarudin Baso, S.H.
2	Nurul Hasanah, S.P.
3	Drs. Herry Mulyono
4	Ulul Azmi, S.H.
5	Sri Bawon Wati, A.Ma.
6	Rio Zhanuar, S.E.
7	Drs. Sutarman, M.A.P.
8	Dewi Retnosari



Klojen

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Dra. Tinuk Dyah Susanti
2	Udi Setiono, S.Sos.
3	Sunaryo, S.E.
4	HJ. Mudah Trijuwati
5	Sadhana Devi

Blimbing

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Budy Edi Tedjo U., S.H., M.Si.
2	R.A. Hartati
3	Heri Mriyanto
4	Rita Rokhana, S.E.
5	Jaya Yuniarti, S.H.
6	Ika Hartini Rawis
7	Victor Pangemanan, S.H.

Kedungkandang

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Agus Subiyakto
2	Drs. H. Zainal Fatah
3	Erlanda Nathasia Subroto, S.Pd.
4	Ir. Ferry Moedjiono
5	Makbul Suseno
6	Sri Rejeki

Sukun

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Sukatno
2	Udjik Suhernanik
3	Dwi Wijayanto
4	Ida Romlah
5	Ir. F. Firmansyah Tayibnapi
6	Rini Astuti
7	Chamim Tohari
8	Citra Meifany Nectariana

Lowokwaru

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Eddy Santoso, S.E.
2	Arga Wicaksono Daryadi, S.E.
3	Tri Nur Santy
4	Mochamad Suyadi, S.Sos.
5	Sudijono
6	Iin Lidiawati
7	Drs. Surya Budhi Rahardjo
8	Rizma Dwi Nurlina, S.St.

Klojen

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	H. Bayu Rekso Aji
2	Nanang Windarto
3	Dewi Ratna Mutu M., S.E.
4	Cholid
5	Novita Dewi, S.Kep., Ns.
6	Muhammad Nabil, S.I.P.

Blimbing

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Herman Ali Sadikin, S.T.
2	Sri Juniati Madjid, S.E., M.Pd.
3	H. Asmualik
4	Kamid, S.T.P.
5	Wafa' Amatul Azizah
6	Aris Rendra Kurniawan, S.E.
7	Reza Adi Pratama, S.P.
8	Asnik Yanatun, S.Pd.
9	Miftakul Huda

Kedungkandang

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	H. Akhdiyati S.U., S.Kom., M.M.
2	Hizbiyatul Islamiyah, S.Ars.
3	H. Sunarto
4	Rika Hastaningrum
5	Hildan Ma'rief, S.Pd.
6	Kiki Krisdian Wahyu S.
7	M. Sigit Hendi Prabowo
8	Margiyani, S.Sos.
9	Dwi Hariyadi, S.Pd.

Sukun

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Ernanto Djoko Purnomo
2	H. Rokhmad, S.Sos.
3	Nurul Arba'ati, S.Pt., M.A.P.
4	Timen Amir
5	Lilik Hidayat
6	H. Agus Cahyono, S.E.
7	Hartatik Purwaningtyas
8	Ir. H. Achmad Zainuddin
9	Deni Wahyono
10	Sulistiyo, S.H.

Lowokwaru

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Chaidar Danial Zakki, S.E.
2	dr. Martina Sylviarini Suryawidarti
3	H. Riyadi
4	H. Heru Pamungkas, S.H., M.A.P.
5	Shofura Hanifah
6	Ahmad Fuad Rahman, S.E.
7	Trio Agus Purwono, S.T.P.
8	Hasnak Laili, S.S.

Klojen

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Hariadi Soetrisno, S.T.
2	Sapto Liyantoro, S.E.
3	Lusiasih Kalam
4	Mohammad Sahrowi
5	Rusmiati, B.A.
6	Petrus Paulus W., S.S., S.H., M.H.

Blimbing

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	H. Dian Indra Tjahja, S.E.
2	Chandra Adi Irawan
3	Nur Anifa, S.E.
4	Dr. H. Rumadi, S.H., M.Hum.
5	Fransiscus Setyadji, S.H
6	Retno Wulan, S.E., M.M.
7	I Wayan Sutama, S.H.
8	Evi Handajani, S.E.
9	Sandi Prasetyo
10	Roni Agustinus Tri Prasetyo

Kedungkandang

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Laily Fitriyah Liza Min Nelly
2	Reza Bayu Setyawan, S.Kep.
3	Ilham Juliansyah K. P., S.E., M.M.
4	Andri Krestian Sugeng, S.E.
5	Sugeng Wahyudi, S.T.
6	Dewi Iriana Salmayati
7	Ahmad Sana'i
8	Hellas Marwanto P, A.Md., S.P.
9	H. Drs. Masduqi

Sukun

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Alkasa Sulima Priyantono, S.E.
2	Niken Wugari, S.E.
3	Agus Wahyudi
4	Drs. Bambang Suyarso, M.Pd.
5	Sukartini
6	Bambang soewidi poelianto, S.Pd., S.Psi.
7	Retno Runtiani
8	Randy Ferdinand Banteng, S.E.
9	Mohamad Sugianto
10	Waluyo Santoso, B.A., S.I.P., M.Si.

Lowokwaru

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Hidayat Udigunarsa
2	Moch. Azhar Bhakti, S.H.
3	Dian Aromita
4	RM. Prayoga Bambang P., S.H.
5	Istyarini
6	Heni Siswanto
7	Sri Utami
8	R. Aryono Widodo, S.Sos.
9	Arif Moerton



Klojen

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Suradi
2	Ina Faradila Anthasari, S.Pd.
3	Achmad Wahyudi
4	Chulfiya Ningsih

Blimbing

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Syamsul Ma'arif
2	Nora Susanti, S. Sos.
3	Muhammad Sholeh
4	Tantono Setiyawan
5	Nanang Sarjono
6	Khoiriyah Lailah, S.Sy.
7	Puji Yani Arwanto
8	Puji Uril Arusta
9	Noer Meutia Hidayati, S.Si.
10	Achmad Subandiri

Kedungkandang

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	H. Abd. Rozaq, S.M.
2	Wagiman, S.Pdi
3	Rininda Ayu Puspita
4	Solikhul Hadi Sarwan
5	Nuning Yurniawati, S.Psi.
6	Khairul Anwar
7	Sumantri
8	Fitri Yudawastuning

Sukun

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Drs. H. S. Djathi Koesoemo
2	Isrotul Wahidiyah
3	Joko Supriono
4	Gufron Hariyanto, S.T
5	Ida Iriani

Lowokwaru

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Asia Iriani, S.E.
2	Sri Yulistyani
3	Siendhy Larasati
4	Ninik Yuliani
5	Rendhy Kautsar Fitrah
6	Endro Efendi, S.E.

Klojen

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Jimmi Mohamad Suryansyah, S.T
2	Tri Murti Handayani
3	Azhar Dhika Winarto, S.T., M.T.

Blimbing

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Bangun Eko Priyo Nugroho, S.Kom.
2	Farida Wulandari, S.H.
3	Vicky Whirba Erischana

Kedungkandang

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Hendri Bambang Irwanto, S.T.
2	Samuil Yuliadi, S.Mn.
3	Susiati

Sukun

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Reni Purwati, S.Pd.
2	Muhammad Sutomo Oktoputra, S.Sos., M.M.
3	Yanki Dermawan
4	Kristina Yanuarti, S.S.
5	Sumardiroto
6	Dwi Asnawi Nurhananto, M.P.

Lowokwaru

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Achmad Faried, S.T.
2	Dina Aulia
3	Dr. Jose Rizal Joesoef



Klojen

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Ferry Adha Adianto
2	Zakiyah Mahdi
3	Uzlifah, S.S.
4	Wahyuriyadi
5	Muhammad Machrus
6	Ammar Mustofa Basyaeb

Blimbing

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	H. Eko Hadi Purnomo, S.H.
2	Ali Said
3	Mei Nafisha
4	Camalia, S.H.
5	M. Nasrul H., S.Sy., S.H., M.H.
6	Ir. Supri Hadi Wardoyo
7	Eriek Herawati, A.Md.
8	Umar Faruk, S.Pd.
9	Satriya Nugraha, S.P.
10	Agus Alam Jaya, S.E., M.M.

Kedungkandang

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	H. Lookh Makhfudz, S.S.
2	Moden Kaiden, S.H.
3	Wiwiek Sulistyowati
4	Anwar Mansyur, S.Ag.
5	Yuning Kartika Sari
6	Wawan Yusbiantono
7	Dra. Dijah Pantjaningroem
8	Moch Hilal Nurdiansyah, S.T
9	David Rosiano, S.T.

Sukun

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Harun Prasojo, S.H.
2	Siska Arichlawati, A.Md.RMIK.
3	Ir. RR Dyah Ratna Nurul
4	Yuli Eka Rini
5	RR Candra Kusumawati, S.Sos., M.Si.
6	Hasan
7	Dwi Heryanto, S.Sos.
8	Saifudin

Lowokwaru

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	H. Pujiyanto, S.E., M.Hum.
2	Dito Arief Nurakhmadi, S.AP.
3	Dessy Ariani, S.E.
4	Rofiq Awali
5	H. Amir Mukminin
6	Sulaihah, S. Pd.
7	Apik Syamsul Rijal, S.Sos.
8	Susi Nurul Hudaningrum
9	Fahmi Andryansyah Katili

Klojen

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Afdhal Fauza, S.E.
2	Robertus Dharma Surya
3	Meity Alvita Sari, A.Md.
4	Ir. Mumpuni Andayani
5	Fernaldy Askar Pratama R.

Blimbing

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Siti Kosiyah
2	Dedet Himawan Bayu Widagdo
3	Ronny Purnomo Sidi
4	Erik Panandian Hudus Maranatha Tampubolon, S.E.
5	Nanda Permata Lisnawati, S.K.M.
6	Lili Ulifah
7	Sulia Ulfa
8	Ardhianto Irawan

Kedungkandang

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Iwan Setiawan
2	Theresia Dharma Kartika
3	Dholin Efendi, S.H.
4	Febi Tri Ardiansyah
5	Mulik Djauharotul Arofah, S.H.
6	Noeroel Fa'izah
7	Chairul Farida

Sukun

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Sugeng
2	Nirma Chris Nindya, S.H.
3	Nanil Widya N, S.E.
4	Nicolia Mundzir, S.T., M.M.
5	Mario David H. L Tobing, S.T.
6	Hariyanto
7	Heri Budianto
8	Fery Kris Wahyudi, S.H.

Lowokwaru

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Drs. Imam Ghozali
2	Anita Nofarina, A.Md.
3	H Arif Sucahyo Dwi, S.P., M.M.
4	Rita Sukma Kumala, S.E.
5	Fransisca Sembodro
6	Maryanto, S.Sos.
7	Ati Kusminanto



Klojen

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Hj. Sulastri, A.Md.Keb.
2	Andhi Widiono
3	Tulus Widodo, A.Md.
4	RR Ruli Harweni S. D., A.Md.
5	NH Djoko Sriyoso
6	Abdul Hakim, S.T.

Blimbing

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Adi Sancoko
2	Dra. Fransiska R. B.
3	Wisnu Murti Wibowo, S.H.
4	Agung W Nugroho
5	Dra. Anik Anggraini
6	Drs. Teguh Hariyono
7	Drs. H. Suwarto, M.M.
8	Indah Nurdiana, S.T.P.

Kedungkandang

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Nawang Nugraning W., S.H.
2	Suharno, S.T.P.
3	Dra. Mudma'innah, M.H.
4	Muhammad Ali Akbar
5	Adi Priatama
6	Wahyu Ida H.
7	Sugeng Hariadi, S.Pd.
8	Suadi
9	Umatul Choiriah
10	H. Imron

Sukun

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Arfandy, S.E.
2	Achmad Anang Fatoni
3	Nanik Qurrata Akyunin, S.S.T., M.Sos.
4	Ahmad Hermono Pratikto, S.E.
5	Budi Suroyo
6	Wiwik Sulaiha
7	Drs. Sugeng Nugroho
8	Hela Narulita, S.E.
9	H. Muhammad Hisbullah Huda, S.H.

Lowokwaru

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Ir. H. Arif Darmawan
2	Ir. Indra Tjahyono, M.M.
3	Ninik Suryantani
4	H. M. Sukris
5	Ade Rahmawani, S.E.
6	Bambang Warsito
7	Almira Dea Devita, S.Pd.



Klojen

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Drs. Syamsul Huda Binrubai, S.H., M.Hum.
2	Khittoh Dararatu, S.H.
3	Syaishar Qoris Fadhlullah 'Aisy
4	Nafisah Al Muhtadiyah
5	Juna Erdana Mutawatir, S.Sos.

Blimbing

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Bezar Gunadi
2	Dra. Hj. Ernawati Hasan
3	Anis Suyanti, S.Pd.
4	Ipong Tegar Pribadi, S.Pd.
5	Haris Budi Kunchayo, S.Ag., M.Si.

Kedungkandang

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Afifah Raudloh Anni'mah
2	Suharianto, S.S., M.Si.
3	Lilla Ika Fitri, A.Md.

Sukun

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Junita Sofie Wijayati, S.M.
2	Khasanudin, S.Pi.
3	Titik Sulistyowati
4	Faris Wardana

Lowokwaru

NO URUT	NAMA LENGKAP
1	Muhamad Kamdani, S.T.P.
2	Miftakhul Muniroh, S.E.
3	Drs. Sudijar
4	Siti Fatonah, A.Md.

Sosialisasi Pencalonan Anggota DPRD Kota Malang Dalam Pemilu 2019 Di Kantor KPU Kota Malang Jalan Bantaran No 6 Purwantoro- Blimbing, Tanggal 30 Juni 2018



Rapat Kordinasi Tes Kesehatan Calon Anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilu 2019 di Rumah Makan Kertasari Tanggal 7 Juni 2018



Partai PKB



Partai Gerindra



Partai PDI-P



Partai Golkar



Partai Nasdem



Partai Berkarya



Partai PKS



Partai Perindo



Partai PPP



Partai PSI



Partai PAN



Partai Hanura



Partai Demokrat



Partai PBB



Verifikasi Administratif Berkas Calon Anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilu 2019 di Kantor KPU Kota Malang, 19 Juli 2018



Penyampaian Hasil Verifikasi Administratif Berkas Calon Anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilu 2019 di Kantor KPU Kota Malang, 21 Juli 2018



Perbaikan Berkas Administratif Calon Anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilu 2019 di Kantor KPU Kota Malang, 27 Juli 2018



Pengumuman PRA Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilu 2019 di Hotel Atria, 8 Agustus 2018



Rakor Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilu 2019 di Kantor KPU Kota Malang, 19 September 2018



Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilu 2019 di Hotel Regent Park, 11 Agustus 2018



PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK

PENERIMAAN LOGISTIK DI GUDANG



1. Tahapan Penerimaan

Sebagai stok gudang. Dokumen yang perlu dilakukan pengecekan pada saat penerimaan Logistik adalah:

- Daftar alokasi kebutuhan;
- Surat jalan; dan
- Bukti tanda terima barang

2. Tahapan Penyimpanan

Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan logistik pada tempat yang telah ditentukan sehingga logistik tersebut tetap dalam kondisi baik dan aman. Penyimpanan barang logistik dilaksanakan dengan melakukan pengawasan dan pengaturan barang di dalam ruang penyimpanan/gudang, sehingga apabila pada saat logistik diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat. Proses penyimpanan logistik dilakukan setelah barang logistik diterima oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dari penyedia sampai dengan penyaluran dari gudang KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan penyimpanan logistik yaitu untuk:

- Menjaga kelayakan, kualitas, dan keawetan logistik
- Mengatur keluarnya logistik secara wajar untuk disalurkan kepada PPK, PPS, dan KPPS
- Mengurangi berbagai kerusakan logistik;
- Menghitung jumlah logistik;
- Pengamanan terhadap logistik; dan
- Memberikan informasi kepada pihak lain yang membutuhkan.

3. Tahapan Penyortiran

Tahap penyortiran adalah kegiatan meneliti, mencocokkan, menghitung, dan memisah-misahkan atau memilah jenis barang logistik yang diterima dari penyedia sesuai kebutuhan pengadaan. Penyortiran logistik perlengkapan pemungutan suara dilakukan di gudang/gedung tingkat kabupaten/kota. Penyortiran tidak boleh dilakukan di tingkat kecamatan.

4. Tahapan Pengepakan

Sebelum logistik dikirim/didistribusikan ke PPK, PPS, dan KPPS secara berjenjang, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengepakan logistik. Tahap pengepakan merupakan kegiatan menata dan mengemas surat suara dan perlengkapan lainnya dengan jumlah dan spesifikasi teknis tertentu. Pengepakan dilakukan agar dalam proses identifikasi barang logistik menjadi lebih efektif dan dapat mencegah pertukaran antar jenis barang logistik serta dapat mengurangi kemungkinan kerusakan barang dan kemudahan dalam pengiriman. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengepakan logistik Pemilu dan Pemilihan berdasarkan alokasi per TPS dan alokasi logistik untuk PPK dan PPS, dengan melibatkan PPK dan PPS yang bersangkutan.

5. Tahapan Penyaluran

Kegiatan utama penyaluran logistik dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan surat perintah pengeluaran barang Pemilu dan Pemilihan sesuai alokasi kebutuhan di masing-masing badan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang mencakup PPK, PPS, dan KPPS disertai dengan surat jalan untuk logistik yang sudah dikeluarkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan pengeluaran barang logistik Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. Melakukan pencatatan barang yang telah disalurkan.
- d. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan perlengkapan pendukung pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS melalui PPK, dan menuangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Inventarisasi logistik Pemilu dan Pemilihan merupakan suatu fungsi manajemen logistik yang bertujuan untuk mendukung proses pengendalian dan pengawasan logistik, serta mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Manfaat dari inventarisasi logistik antara lain:

- a. Memberikan informasi/keterangan terkait jumlah, jenis, spesifikasi, umur, maupun kondisi dari suatu barang
- b. Menjamin keamanan logistik
- c. Memudahkan dalam hal pengecekan barang-barang, sehingga dapat mengurangi resiko kerusakan maupun kehilangan agar keamanan lebih terjamin.

- d. Memberikan masukan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen logistik
- e. Sebagai alat pertanggungjawaban
- f. Dengan adanya inventarisasi diharapkan mampu menyediakan bukti-bukti administratif dalam penyelenggaraan pengelolaan logistik. Sehingga sewaktu-waktu diminta ataupun terjadi permasalahan terkait pengelolaan Logistik, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mempertanggungjawabkannya melalui bukti-bukti administratif yang ada.

Lebih lanjut Komisi Pemilihan Umum telah memberikan petunjuk dan panduan yang ringkas dalam pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 yaitu Buku Pintar Logistik.

7 LANGKAH PROSES PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA DAN LOGISTIK PEMILU 2019

e-catalogue
Tender Katalog Surat Suara
5 Des s.d 7 Jan 2019

1

Approval Design Surat Suara
Pasangan Calon dan Partai
Politik Peserta Pemilu 2019
4 Januari 2019

2

Pemesanan Surat Suara
Melalui e-katalog
11 Jan s.d. 15 Jan 2019

3

Penandatanganan
Kontrak Payung
8 Jan s.d. 10 Jan 2019

4

Proses Pencetakan Surat Suara
dan Distribusi ke KPU Kab/Kota
(Pengamanan oleh KPU dan Polri)
16 Jan s.d. 26 Mar
(70 hari kalender) 2019

5

Sortir dan Pengepakan
Logistik Pemilu di Kab/Kota
27 Mar s.d. 14 Apr 2019

6

Pengiriman Logistik
Pemilu ke TPS
14 Apr s.d. 16 Apr 2019

7

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 disebutkan bahwa Jadwal Tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dimulai dari 17 April 2018 sampai dengan 16 April 2019.

1. Pengadaan Logistik

Pengadaan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kota Malang dilaksanakan bersama-sama antara KPU RI, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Malang

Pengadaan logistik oleh KPU RI meliputi:

- surat suara
- kotak suara
- bilik suara

Kotak suara Pemilu Serentak 2019 berjenis duplex (karton kedap air) dan tidak menggunakan kotak suara berbahan aluminium lagi. Sehingga pada Tahun 2019, setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretris Jenderal KPU RI, KPU Kota Malang mengadakan penghapusan barang persediaan kotak suara berbahan aluminium. Bilik pemungutan suara yang digunakan dalam Pemilu 2019 menggunakan 2 (dua) jenis yaitu bilik pemungutan suara berbahan aluminium dan bilik pemungutan suara duplex. Dari persediaan bilik pemungutan suara yang dimiliki oleh KPU Kota Malang sejumlah 10.098 buah, dilaporkan sejumlah 5.835 buah dalam kondisi baik dan masih

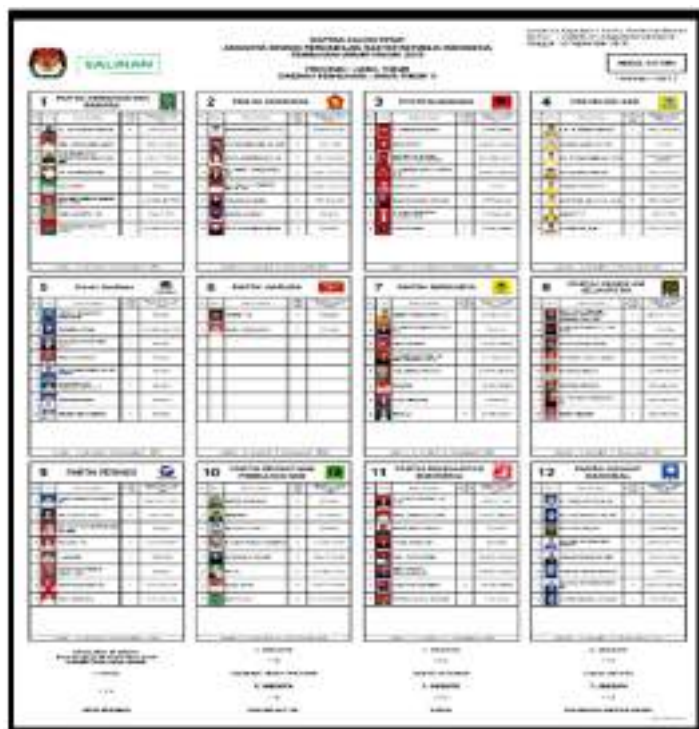
dapat digunakan, sedangkan kekurangannya menggunakan bilik pemungutan suara duplex sejumlah 3.557 buah.

Diperlukan perlakuan khusus dalam penyimpanan kotak dan bilik suara duplex agar tidak rusak adalah dengan memasang pallet kayu anti rayap agar tidak langsung bersentuhan dengan lantai serta melakukan penyemprotan anti rayap dan tikus pada gudang penyimpanan.

- tinta sidik jari
 - segel
 - hologram
 - Daftar Pasangan Calon
 - Daftar Calon Tetap
 - template / alat bantu tuna netra
 - formulir untuk berita acara, dan
 - sertifikat serta formulir lainnya.
- KPU Provinsi Jawa Timur melaksanakan pengadaan sampel, salinan formulir, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta formulir-formulir lainnya yang tidak diadakan oleh KPU RI.
 - KPU Kota Malang mendapatkan delegasi pengadaan untuk pengadaan alat kelengkapan TPS, Buku Panduan PPK dan KPPS serta Salinan Daftar Pemilih Tetap.

JENIS SURAT SUARA DI TPS







Penyimpanan Kotak dan Bilik Suara Duplex

2. Pengelolaan Logistik

Strategi utama KPU Kota Malang dalam pengelolaan logistik antara lain :

- a. Semaksimal mungkin melibatkan PPK dan PPS dalam tahapan pengelolaan logistik sehingga pemilihan waktu (timing) menjadi faktor penting agar tidak bersamaan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu yang lain.
- b. Penyiapan gudang logistik yang strategis dan mudah dijangkau
- c. Berkoordinasi secara intensif dengan para Camat untuk mendapatkan dukungan penyimpanan logistik di kantor kecamatan

Langkah-langkah yang telah di ambil oleh KPU Kota Malang dalam pengelolaan logistik antara lain:

1. Kotak suara dan bilik pemungutan suara:
 - a. Bilik suara bahan aluminium harus dibersihkan dulu karatnya menggunakan minyak tanah, pelaksanaan oleh KPU Kota Malang. Perangkaian bilik suara dan kotak suara dilakukan di kecamatan untuk memudahkan dalam pengiriman

2. Tinta sidik jari

Logistik tinta sidik jari diterima dari pabrik dikemas dalam box. Perlakuan selanjutnya adalah mengemas dalam kantung plastik per TPS 2 botol. Tujuannya agar ketika dalam pendistribusian terjadi botol tinta pecah maka tinta tidak akan merusak logistik lainnya. Pelaksanaan oleh KPU Kota Malang

3. Surat Suara

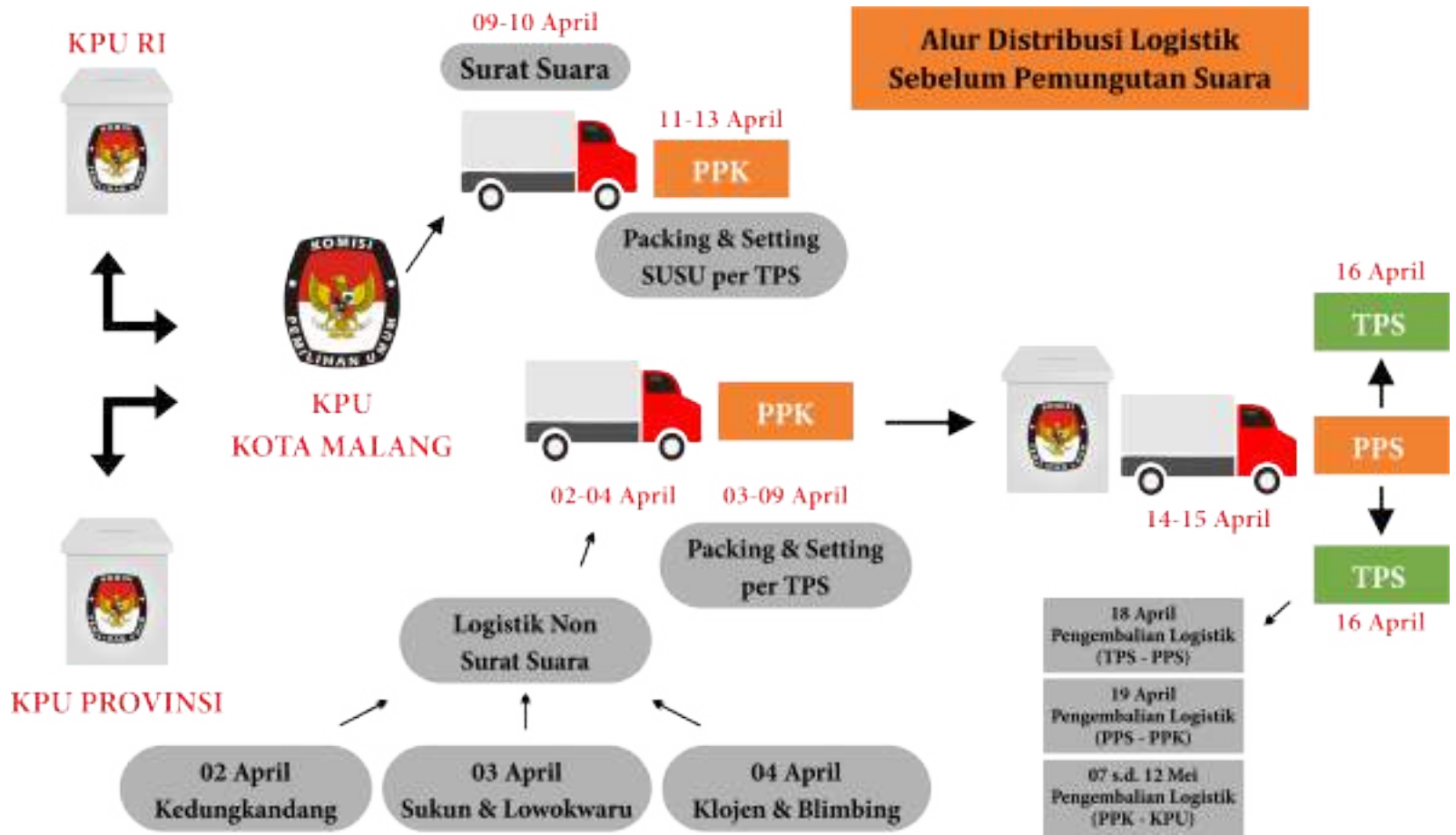
Sortir dan lipat surat suara:

- a. Setelah surat suara diterima maka dilakukan sortir dan lipat
- b. Pedoman sortir surat suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1266/HK.03.1-Kpt/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- c. Kriteria surat suara yang tidak layak, rusak/cacat adalah :
 - i. hasil cetak surat suara kotor atau tidak merata
 - ii. permukaan hasil cetak surat suara kabur
 - iii. surat suara kusut/mengkerut
 - iv. surat suara sobek, di bagian tengah dan/atau bagian pinggir
 - v. bagian atas/judul surat suara:
 - terdapat bercak atau noda besar;
 - hasil cetak judul surat suara kabur/tidak jelas;
 - logo KPU tidak jelas;
 - dan/atau tulisan “Surat Suara” tidak jelas atau kotor
 - vi. bagian kolom nomor urut, kolom foto atau kolom nama pasangan calon:
 - terdapat bercak atau noda besar pada kolom no

- mor urut, foto, dan nama pasangan calon;
 - terdapat gradasi warna atau noda warna hitam atau warna lainnya pada kolom nama, sehingga nomor urut atau nama pasangan calon sulit dibaca;
 - terdapat gradasi warna atau noda warna hitam atau warna lainnya pada kolom foto sehingga foto pasangan calon sulit dikenali;
 - terdapat noda dalam jumlah banyak atau noda besar sehingga surat suara kelihatan kotor;
 - terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos;
 - dan/atau kolom nomor urut, atau kolom foto, atau kolom nama pasangan calon kotor.
- d. Teknik melipat surat suara
 - e. Setelah dilipat kemudian per 25 lembar surat suara diikat dengan karet gelang
 - f. Surat suara dikembalikan ke box semula
 - g. Sortir dan lipat surat suara bertempat di gudang KPU Kota Malang.
4. Formulir, Daftar Pasangan Calon, Daftar Calon Tetap dan Template / Alat bantu tuna netra disetting per kecamatan untuk kemudian dikirim dan dilakukan pengepakan ke dalam kotak suara di kecamatan.
 5. Sampul, segel, ATK (ballpoint, plastik, lem, spidol besar, spidol kecil), karet gelang, tanda pengenal KPPS
 - a. Sampul yang digunakan dalam distribusi logistik dari KPU sampai dengan KPPS diset / dipak per Kecamatan oleh petugas KPU Kota Malang, sedangkan sampul yang digunakan dalam pengembalian logistik dari TPS sampai dengan KPU diset / di pak per TPS dan dikirimkan ke kecamatan sudah dalam bentuk terpacking per TPS.
 - b. Segel, ATK (ballpoint, kantung plastik besar, lem, spidol besar, spidol kecil), karet gelang, dan tanda pengenal KPPS diset / di pak per TPS dan dikirimkan ke kecamatan sudah dalam bentuk terpacking per TPS.
 - c. Pelaksana petugas KPU Kota Malang di gudang KPU Kota Malang.
 6. Buku Panduan PPK dan Buku Panduan KPPS
 7. Bantalan dan alat coblos, gembok, plastik/kabel penghubung, stiker kotak suara, plastik pembungkus kotak suara diset / dipak per Kecamatan oleh petugas KPU Kota Malang untuk kemudian dikirim dan dilakukan pengepakan ke dalam kotak suara di kecamatan.
 8. Proses akhir dari pengelolaan logistik adalah sortir dan setting/pengepakan logistik ke dalam kotak suara. Hal-hal yang dilakukan:
 - Memasukkan surat suara ke dalam sampul kubus kemudian disegel
 - Memasukkan surat suara ke dalam kotak suara
 - Menyortir dan menghitung jumlah set formulir dan memasukkan ke dalam kotak suara
 - Memasukkan seluruh logistik lainnya ke dalam kotak suara
 - Melaporkan jika ada logistik yang kurang maupun rusak untuk dimintakan penggantinya
 - Menggembok dan menyegel kotak suara yang telah lengkap terisi logistik
 - Memasukkan kotak suara ke dalam kantung plastik kotak suara

3. Pendistribusian Logistik

Distribusi logistik merupakan tahapan kelanjutan dari pengelolaan logistik. Distribusi logistik merupakan kegiatan pengiriman logistik yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh KPU Kota Malang, PPK, PPS dan KPPS mulai dari pengiriman secara berjenjang ke TPS sampai dengan penyerahan kembali ke KPU Kota Malang.



ALUR DAN PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI LOGISTIK

DARI - TUJUAN	PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN
Sebelum Pemungutan Suara	
KPU Kota Malang - PPK	KPU Kota Malang
PPK - PPS	PPK
PPS - KPPS	PPS
Setelah Pemungutan Suara	
KPPS - PPS	KPPS
PPS - PPK	PPS
PPK - KPU	KPU



Penyimpanan kotak dan bilik



Simulasi sortir dan lipat suara



Pengepakan/setting surat suara per TPS



Hasil setting sampul per TPS sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara



Pengangkutan logistik



PPK, ke PPS, dan ke TPS

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tahapan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilu Serentak 2019 adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesalahan dalam menghitung penambahan 2% dari DPT, di mana seharusnya penambahan 2% dari DPT berbasis data DPT per TPS, bukan data DPT per Kabupaten/Kota. Hal ini mengakibatkan kekurangan surat suara yang diterima oleh KPU Kota Malang sehingga penanganan selanjutnya (sortir, lipat, pengepakan surat suara per TPS) menjadi terlambat.
2. Tindak lanjut/penanganan pengaduan kekurangan surat suara baik yang disebabkan oleh kurang kirim maupun surat suara rusak terlalu lama. Hal ini mungkin disebabkan oleh belum adanya alur dan petugas yang ditetapkan dalam menerima pengaduan kekurangan surat suara
3. Penyediaan logistik yang pengadaannya dilaksanakan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur tidak memberikan logistik cadangan sehingga kesulitan dalam penanganan pengaduan logistik rusak/kurang.
4. Pengadaan logistik masih terasa tersentralisasi.
5. Masih banyak terdapat laporan kekurangan/kerusakan logistik di tingkat TPS meskipun sortir dan pengepakan di PPK telah melibatkan anggota PPS dan KPPS.
6. Formulir-formulir salinan yang digunakan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK banyak yang tidak digunakan karena keterbatasan tenaga, sebagai gantinya form asli digandakan terlebih dahulu kemudian ditandatangani dan distempel basah.

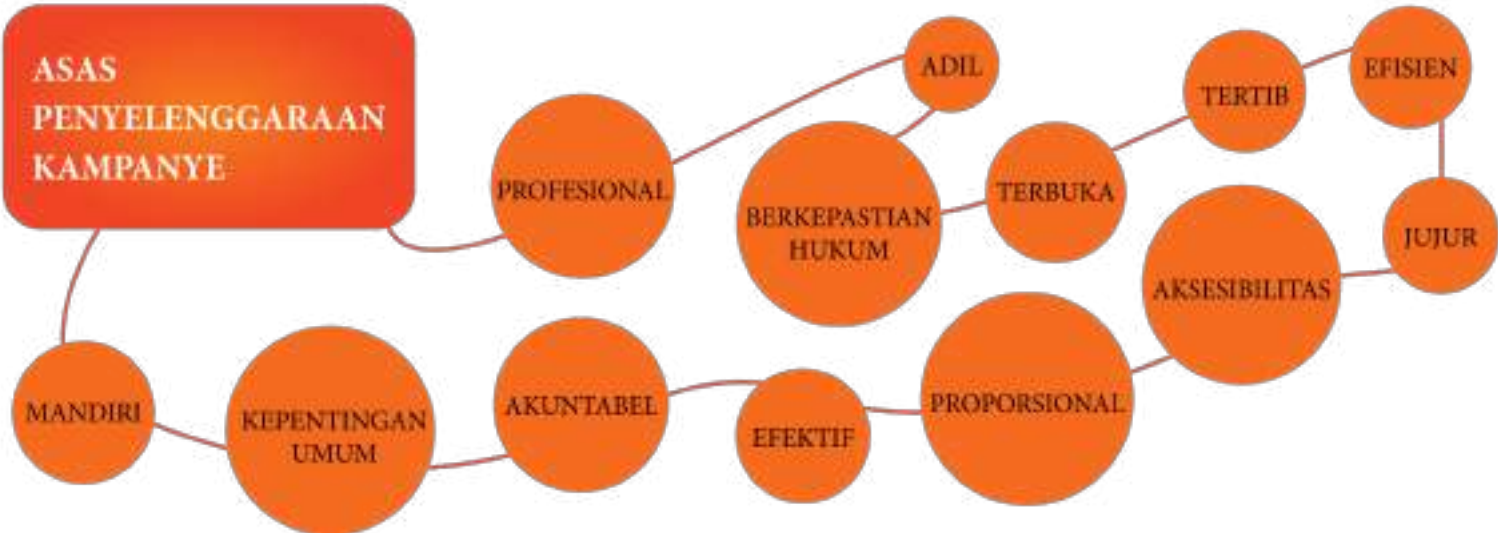
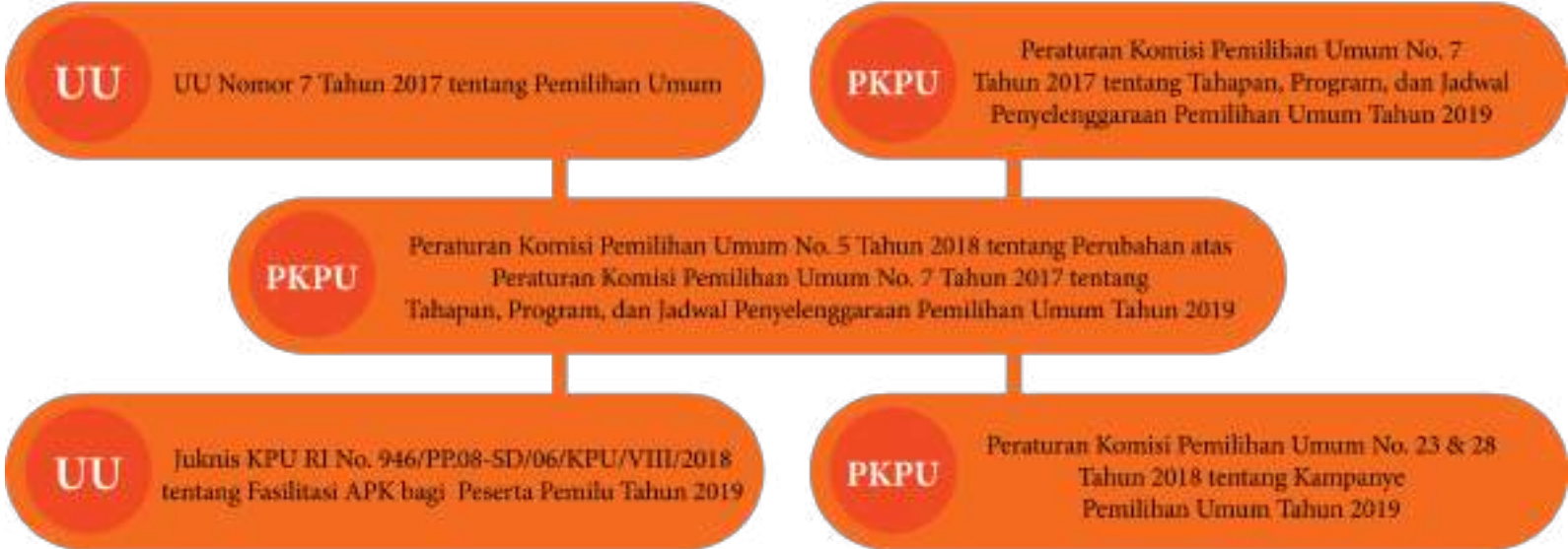
Solusi

1. Penambahan pendelegasian pelaksanaan pengadaan logistik di tingkat Kabupaten/Kota tetapi mengintensifkan penggunaan e-Katalog, karena keterlambatan penyediaan logistik tidak hanya dari faktor produksi dan pengiriman tetapi juga rekapitulasi penghitungan kebutuhan logistik di tingkat KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Timur. Pemotongan mata rantai dalam merekap kebutuhan secara nasional / regional tentunya dapat mempercepat pengadaan logistik di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Perlu dipikirkan untuk membedakan logistik berdasarkan warna untuk setiap jenis pemilihan, karena logistik yang hampir sama menyebabkan kesalahan dalam memasukkan ke dalam kotak suara sehingga dipersepsikan terjadi kekurangan logistik padahal hanya tertukar.
3. Untuk tempat pengesetan / pengepakan logistik ke dalam kotak suara yang harus dilaksanakan di PPK, jika tempat kurang memadai hendaknya diadakan penjadwalan agar suasana kerja tenang dan memudahkan dalam pengontrolan.
4. Pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat PPK hendaknya berbasis elektronik/IT/aplikasi agar memudahkan dalam pembuatan salinan formulir dan mengurangi beban pengadaan, tetapi opsional hanya untuk PPK yang mempunyai dukungan peralatan yang memadai.

KAMPANYE



LANDASAN HUKUM



PELAKSANA KAMPANYE PILPRES

TIM KAMPANYE



**PELAKSANA KAMPANYE
LEGISLATIF (DPR)**



**PELAKSANA KAMPANYE
LEGISLATIF (DPRD PROVINSI)**

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi

Calon Anggota DPRD Provinsi

Juru Kampanye

Orang Seorang

Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang Ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi



**PELAKSANA KAMPANYE
LEGISLATIF (DPRD KABUPATEN/KOTA)**

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota

Calon Anggota DPRD Kab/Kota

Juru Kampanye

Orang Seorang

Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang Ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota



PELAKSANA KAMPANYE ANGGOTA DPD



Larangan bagi Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Melakukan kegiatn yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
5. Mengganggu ketertiban umum
6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu
8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan
10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya enggan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Paslon tertentu, memilih Parpol tertentu, memilih anggota DPD tertentu
11. Mencetak dan menyebarkan BK diluar ketentuan
12. Mencetak dan memasang APK diluar ketentuan

Keterangan: pelanggaran yang berkaitan dengan poin nomor 1-10 di atas, termasuk tindak pidana pemilu.

Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam Melaksanakan Kampanye Dilarang Melibatkan:

1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, pada MA dan hakim pada semua badan peradilan di bawah MA, dan hakim konstitusi pada MK
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota BPK
3. Gubernur, Deputy gubernur senior, dan deputy gubernur BI
4. Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN/BUMD
5. Pejabat negara bukan anggota Parpol yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural
6. ASN
7. Anggota TNI dan Kepolisian
8. Kepala Desa
9. Perangkat desa
10. Anggota BPD
11. WNI yang tidak memiliki hak memilih

Keterangan: pelanggaran yang berkaitan dengan poin-poin di atas, termasuk tindak pidana pemilu.

NO	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
1	<p>Parpol yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa kampanye</p> <p>Parpol dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Parpol, dengan metode:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemasangan bendera Parpol Peserta Pemilu dan nomor urutnya Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 hari sebelum kegiatan dilaksanakan 	<ol style="list-style-type: none"> Peringatan tertulis, Penurunan atau pembersihan BK/APK Penghentian Iklan Kampanye di media cetak, elektronik, dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran
2	Menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagai anggota Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara	Larangan mengikuti atau menghadiri kegiatan Kampanye. <i>Pemberian sanksi yang dimaksud disampaikan kepada (1) Pelaksana Kampanye, (2) Bawaslu, Bawasprov, Bawaskab./kot, Panwascam, dan PPL</i>
3	Mengganggu ketertiban umum (termasuk sanksi tindak pidana pemilu)	<ol style="list-style-type: none"> Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan Penghentuan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain
4	Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan (termasuk sanksi tindak pidana pemilu)	
5	Pejabat negara, pejabat daerah, ASN, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu	
6	Pejabat negara, pejabat daerah, ASN, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, dan ASN lainnya dilarang mengadakan kegiatan (pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada asn dalam unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat) yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye	Sanksi yang diatur dalam undang-undang Pemilu
7	<p>Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mencetak dan menyebarkan BK di luar ketentuan Mencetak dan memasang APK di luar ketentuan 	<p>Sanksi administratif dan penurunan/pembersihan BK atau APK Peserta Pemilu.</p> <p><i>Dalam melakukan penurunan atau pembersihan BK atau APK, Bawasprov, Bawaskab./kot, dab atau Panwascam berkoordinasi dengan Satpol PP</i></p>

Proses Kegiatan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kota Malang:

1. Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran BK, pemasangan APK, media sosial, debat, dan kegiatan lain
2. Kampanye dimulai 3 hari setelah penetapan DCT serta pasangan Capres & Cawapres (Pasal 24), yaitu : 23 September 2018 – 13 April 2019.
3. Kampanye iklan di media massa & rapat umum (selama 21 hari) di mulai 24 Maret 2019 – 13 April 2019
4. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang di fasilitasi oleh KPU Kota Malang, adalah :
 - a. Untuk Parpol
 - i. Baliho ukuran 3 x 4 m (10 buah)
 - ii. Spanduk ukuran 6 x 1.5 m (16 buah)
 - b. Untuk Pilpres
 - i. Baliho ukuran 3 x 4 m (10 buah)
 - ii. Spanduk ukuran 6 x 1.5 m (16 buah)
 - c. DPD
 - i. Spanduk ukuran 6 x 1.5 m (10 buah)

KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE

KEGIATAN	WAKTU
Rakor tentang lokasi titik pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) di wilayah kota Malang	Selasa, 18 September 2018
Pembahasan mengenai petunjuk teknis fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 di Rumah Makan Harmadha Joglo Kabupaten Magetan	Rabu-Kamis, 26-27 September 2018
Rakor tentang lokasi titik pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) di wilayah kota Malang	Senin, 01 Oktober 2018
Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Umum 2019 bertempat di Gedung BPKAD kabupaten Kediri	Kamis-Jumat, 11-12 Oktober 2018
Approval Desain APK kepada peserta Pemilu 2019 bertempat di Kantor KPU kota Malang	Kamis, 18 Oktober 2018
Penyerahan Alat Peraga Kampanye kepada peserta Pemilu 2018 bertempat di Kantor KPU kota Malang	Jumat, 26 Oktober 2018
Rapat evaluasi tahapan kampanye di Premier Place Hotel Sidoarjo oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kab/Kota se-Jawa Timur	Kamis-Jumat, 6-7 Desember 2019

**JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU OLEH KPU MALANG**

NO.	NAMA CALON	SPANDUK SEJUMLAH 16 BUAH	BALIHO SEJUMLAH 10 BUAH	KONFIRMASI	BA	CETAK	AMBIL	NO. TELP
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6 x 1,25 m	3 x 4 m	√	√	√	√	089533691114
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6 x 1,25 m	3 x 4 m	√	√	√	√	08383478162
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6 x 1,25 m	3 x 4 m	√	√	√	√	
4	Partai Golkar	6 x 1,25 m	3 x 4 m	√	√	√	√	0811945786888
5	Partai Nasional Demokrat	6 x 1,25 m	3 x 4 m	√	√	√	-	
6	Partai Garuda	6 x 1,25 m	3 x 4 m	√	√	√	-	
7	Partai Berkarya	5 x 1,25 m	3 x 4 m	√	√	√	√	081259676445
8	Partai Keadilan Sejahtera	6 x 1,25 m	3 x 4 m	√	√	√	√	
9	Partai Persatuan Indonesia	6 x 1,25 m	3 x 4 m	√	√	√	√	082230912981
10	Partai Persatuan Pembangunan	6 x 1,25 m	3 x 4 m	√	√	√	√	
11	Partai Solidaritas Indonesia	6 x 1,25 m	3 x 4 m	√	√	√	√	
12	Partai Amanat Nasional	6 x 1,25 m	3 x 4 m	√	√	√	√	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	6 x 1,25 m	3 x 4 m	√	√	√	√	0811945786888
14	Partai Demokrat	6 x 1,25 m	3 x 4 m	√	√	√	√	082233263717
15	Partai Bulan Bintang	6 x 1,25 m	3 x 4 m	√	√	√	√	085236844140
16	Partai Persatuan dan Kesatuan Indonesia	6 x 1,25 m	3 x 4 m	√	√	√	-	



Pada hari Senin 01 Oktober 2018 Rakor tentang lokasi titik Pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) di wilayah Kota Malang dengan dasar Peraturan Wali Kota Malang Nomor 27 Tentang Reklame dengan Peserta Pemilu, Pemda Kota Malang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang





AUDIT DANA KAMPANYE

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHAPAN LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu yaitu kegiatan Kampanye yang merupakan kesempatan Peserta Pemilu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pada Kegiatan Kampanye tersebut tentunya memerlukan pendanaan.

Pendanaan Kampanye oleh Peserta Pemilu dapat difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yaitu Kampanye berupa pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, penayangan iklan Kampanye, dan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan ketentuan Pasal 325, 329, dan 332 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye didanai dan menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.

Berikut ini merupakan gambaran aktivitas pencatatan dan pelaporan dana kampanye oleh peserta Pemilu Tahun 2019:



Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

- Pelayanan informasi;
- Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
- Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- Fasilitasi penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum kepada Kantor Akuntan Publik;
- Penyampaian dan pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye;
- Evaluasi.

TAHAPAN KEGIATAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILU

No.	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Pembukaan RKDK	Dibuka paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye	
2	Periode Pembukuan LADK	Dimulai sejak pembukaan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye	
3	Penyampaian LADK	23 Sept 2018	23 Sept 2018
4	Perbaikan LADK	23 Sept 2018	27 Sept 2018
5	Pengumuman LADK	28 Sept 2018	28 Sept 2018
6	Periode Pembukuan LPSDK	23 Sept 2018	01 Jan 2019
7	Penyampaian LPSDK	02 Jan 2019	02 Jan 2019
8	Pengumuman Penerimaan LPSDK	03 Jan 2019	03 Jan 2019
9	Periode Pembukuan LPPDK	3 (tiga) hari setelah penetapan pemilu	
10	Penyampaian LPPDK ke KAP	26 Apr 2019	02 Mei 2019
11	Audit dan Penyampaian Hasil Audit Laporan Dana Kampanye dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kab/Kota	02 Mei 2019	31 Mei 2019
12	Penyampaian Hasil Audit kepada Peserta Pemilu	01 Jun 2019	07 Jun 2019
13	Pengumuman Hasil Audit	01 Jun 2019	10 Jun 2019

A. Pelayanan Informasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang membentuk tim Helpdesk yang berfungsi untuk membantu Partai Politik tingkat Kota Malang dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Malang untuk mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pedoman teknis pelaporan Dana Kampanye, serta informasi mengenai Laporan Dana Kampanye.

KPU Kota Malang membentuk tim Helpdesk dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim Helpdesk KPU Kota Malang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye
 - b. Menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi
 - c. Menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sesuai dengan jadwal penyampaian
2. Tim Helpdesk membuat buku tamu dan lembar konsultasi.
3. Tim Helpdesk menerima konsultasi dari Partai Politik tingkat Kota Malang dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Malang di kantor KPU Kota Malang, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi buku tamu dan lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi;
4. Tim Helpdesk menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh Partai Politik Kota Malang dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Malang secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas Helpdesk
5. Tim Helpdesk membuat laporan harian mengenai konsultasi langsung dan/atau melalui surat elektronik (email), telepon, pesan singkat (*whatsapp*), dan aplikasi Pesan
6. Tim Helpdesk mengarsipkan semua dokumen konsultasi yang telah dibuat dalam bentuk hardfile dan softfile



B. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Pembukuan LADK dimulai sejak Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye. KPU Kota Malang menerima LADK Partai Politik tingkat Kota Malang dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Malang sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU.

KPU Kota Malang bersama-sama dengan Partai Politik tingkat Kota Malang dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Malang memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, yang terdiri dari:

1. LADK1-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye
2. LADK2-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3. LADK3-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4. LADK4-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
5. LADK5-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye
6. LADK6-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye
7. LADK7-PARPOL : Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
10. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah
11. Salinan Buku RKDK
12. Surat Keterangan Data Pengelola Rekening

1. LADK1-PILPRES : Laporan Awal Dana Kampanye
2. LADK2-PILPRES : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3. LADK3-PILPRES : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4. LADK4-PILPRES : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
5. LADK5-PILPRES : Daftar Saldo Dana Kampanye
6. LADK6-PILPRES : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah
10. Salinan Buku RKDK
11. Surat Keterangan Tim Kampanye
12. Salinan Bukti Tagihan/Utang

Terkait Laporan dan Audit Dana Kampanye, KPU Kota Malang melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pada hari Sabtu-Minggu tanggal 8-9 September 2018 bertempat Fave Hotel Tuban, KPU Kota Malang menghadiri undangan dari KPU Provinsi Jawa Timur terkait dengan Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2019 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur beserta Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur dan Anggota Divisi Hukum beserta Operator Sidakam Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
2. Pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, Setelah acara tersebut KPU Kota Malang mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum 2019 terhadap Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Malang terutama mengenai penggunaan Aplikasi Dana Kampanye.
3. Pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Kota Malang.
4. Pada hari Jumat tanggal 27 September 2018 batas akhir Penyerahan Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).



5. Berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 terdapat 2 (dua) Partai Politik yang terkena sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kota Malang, yaitu PKPI dan Partai Garuda. Hal tersebut dikarenakan kedua Partai tersebut tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum kepada KPU Kota Malang. Konsekuensi dari pembatalan tersebut yaitu tidak diikutkannya kedua Partai Politik tersebut dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh Dapil di Wilayah Kota Malang.

C. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

KPU Kota Malang bersama dengan Partai Politik tingkat Kota Malang dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Malang memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK yang terdiri dari :

1. LPSDK1-PILPRES : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
2. LPSDK2-PILPRES : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3. LPSDK3-PILPRES : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

1. LPSDK1-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
2. LPSDK2-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3. LPSDK3-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4. LPSDK4-PARPOL : Pencatatan Penerimaan Sumbangan Calon Legislatif
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah



Dalam tahapan pelaksanaan penyerahan LPSDK Dana Kampanye, KPU Kota Malang melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Hotel Sahid Montana Tanggal 27 Desember 2019. Dengan mengundang partai politik dan Bawaslu Kota Malang.

D. Fasilitasi Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)

Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara. KPU Kota Malang menyampaikan naskah asli (hardcopy) LPPDK Partai Politik tingkat Kota Malang yang dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LADK dan LPSDK Partai Politik tingkat Kota Malang, kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Jawa Timur, paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara.

LPPDK Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Malang disampaikan oleh Tim Kampanye tingkat Kota Malang kepada Tim Kampanye tingkat nasional untuk dikompilasi, dan disampaikan kepada KAP yang ditunjuk KPU di kantor KPU terdiri dari:

PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE

WAKTU PENYAMPAIAN

Peserta Pemilu Menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KAP Paling Lambat 15 (lima belas) Hari Setelah Pemungutan Suara

JENIS LAPORAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA KAP-PARPOL

NO	JENIS	KETERANGAN
1	LPPDK1-PARPOL s/d LPPDK7-PARPOL	ASLI
2	LADK1-PARPOL s/d LADK7-PARPOL	ASLI
3	LPSDK1-PARPOL s/d LPSDK4-PARPOL	ASLI
4	SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN	ASLI
5	REKENING KORAN - RKDK	COPY
6	BUKTI-BUKTI TRANSAKSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN	COPY

LPPDK Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Malang disampaikan oleh Tim Kampanye tingkat Kota Malang kepada Tim Kampanye tingkat nasional untuk dikompilasi, dan disampaikan kepada KAP yang ditunjuk KPU di kantor KPU terdiri dari:

- | | | |
|--|--|--|
| 1. LPPDK1-PARPOL: Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | 7. LPPDK7-PARPOL: Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR/DPRD Prov./DPRD Kabupaten/Kota | 12. Surat Keterangan Data Pengelola Rekening |
| 2. LPPDK2-PARPOL: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan | 13. Salinan Bukti Tagihan/Utang (apabila ada) |
| 3. LPPDK3-PARPOL: Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | 9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok | 14. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran |
| 4. LPPDK4-PARPOL: Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | 10. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah | 15. Pembukuan Dana Kampanye Pihak lain (apabila ada) |
| 5. LPPDK5-PARPOL: Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye | 11. Salinan Buku RKDK | 16. Tanda Terima LADK |
| 6. LPPDK6-PARPOL: Daftar Saldo Dana | | 17. LADK |
| | | 18. Tanda Terima LPSDK |
| | | 19. LPSDK |



Untuk memperlancar proses penyerahan LPPDK bagi Partai Politik, KPU Kota Malang mengadakan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis terkait Pelaporan Dana Kampanye pada tahap Penyampaian LPPDK pada Tanggal 10 April 2019 dengan mengundang Partai Politik.

E. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit

1. KPU Kota Malang mengadiri undangan KPU Provinsi Jawa Timur untuk menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat Kota Malang.
2. KPU Kota Malang menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat Kota Malang dari KPU Provinsi Jawa Timur pada tanggal 1 Juni 2019.
3. KPU Kota Malang menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan Asurans Independen dari KAP kepada Partai Politik tingkat Kota Malang pada tanggal 2 Juni 2019.
4. Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat Kota Malang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU Kota Malang mengundang Partai Politik tingkat Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang,
 - b. KPU Kota Malang menyampaikan hasil audit kepada Partai Politik tingkat Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang; dan
 - c. KPU Kota Malang memberikan tanda terima penyampaian hasil audit Dana Kampanye kepada Partai Politik tingkat Kota Malang.
5. KPU Kota Malang mengumumkan hasil audit Dana

Kampanye Partai Politik tingkat Kota Malang berdasarkan Pengumuman KPU Kota Malang Nomor : 284/PL.01.7-Pu/3573/KPU-Kot/VI/2019 melalui laman KPU Kota Malang dan/atau papan pengumuman berupa :

- a. Laporan Asurans Independen;
- b. Laporan Asersi yaitu formulir Model LPPDK1-PARPOL; dan
- c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran yaitu formulir Model LPPDK2-PARPOL.

Dari hasil penerimaan LPPDK dapat diketahui bahwa yang tidak menyerahkan Formulir Model LPPDK7-PARPOL terdiri dari, 14 Calon Anggota DPRD Kota Malang dari Partai Kebangkitan Bangsa, 9 Calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2 Calon dari Partai Beringin Karya, 33 Calon dari Partai Demokrat.

Hasil Audit Dana Kampanye KPU Kota Malang terdiri dari:

- a. Laporan Asurans Independen;
- b. Laporan Asersi yaitu formulir Model LPPDK1-PARPOL; dan
- c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran yaitu formulir Model LPPDK2-PARPOL



PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA



PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA OLEH KPPS



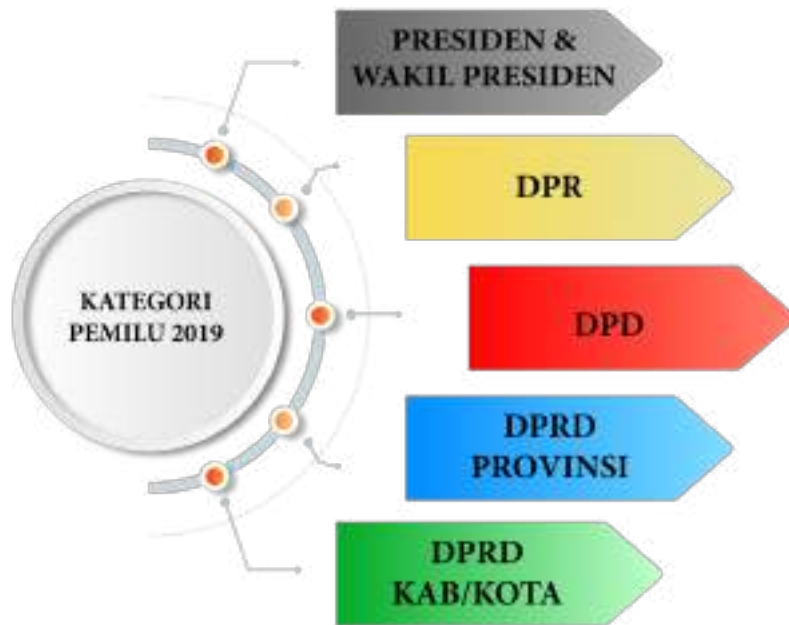
A. Jadwal Kegiatan

NO	KEGIATAN	JADWAL	PELAKSANA
A	Persiapan		
	1. Pengumuman tempat dan waktu pemungutan	12 April 2019	KPPS
	2. Penyampaian Formulir Model C6-KPU	14 April 2019	KPPS
	3. Pengembalian Formulir Model C6-KPU kepada PPS	16 April 2019	KPPS
	4. Penerimaan Logistik TPS dari PPS kepada KPPS serta penyiapan TPS	16 April 2019	KPPS
	5. Penyiapan TPS	16 April 2019	KPPS
B	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	17 April 2019	KPPS
C	Penyampaian hasil penghitungan suara	17 April 2019	KPPS

Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 waktu setempat s.d. pukul 13.00 waktu setempat

B. Ketentuan-Ketentuan dalam Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara





1. Pemilik e-KTP yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (*Model A3-KPU*)
2. Pemilik e-KTP yang terdaftar dalam DPTb (*Model A4-KPU*)
3. Pemilik e-KTP atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat terdaftar dalam DPK (*Model A DPK-KPU*)

Tiga Kategori Daftar Pemilih



Pelaksanaan Pemungutan Suara oleh KPPS

- KPPS Membuka Rapat Pemungutan Suara (Pasal 31 ayat (1))
- KPPS Melakukan sumpah/janji KPPS (Pasal 32 huruf a)
- KPPS membuka kotak suara sesuai jenis Pemilu (Pasal 33 ayat 1 huruf (b) angka 1)
- KPPS mengidentifikasi jenis perlengkapan dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen (Pasal 33 ayat 1 huruf (b) angka 1)
- Ketua KPPS menjelaskan tata cara Pemberian Suara kepada Pemilih (Pasal 33 ayat 1 huruf (c) angka 2)
- Ketua KPPS menandatangani surat suara yang akan digunakan (Pasal 38 ayat 1 huruf a)
- Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih (Pasal 38 ayat 1 huruf c)

CATATAN:

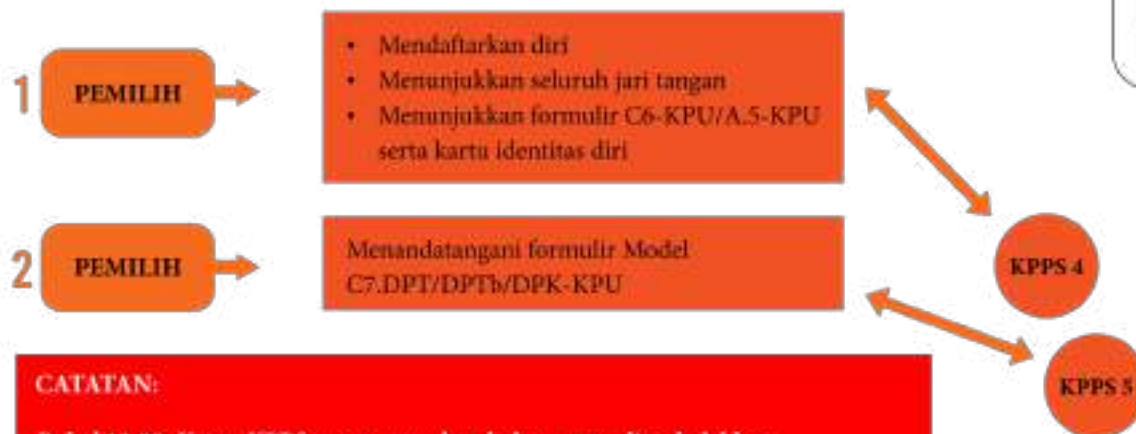
Untuk Pemilih DPTb Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih berdasarkan kepada Surat Suara yang tertulis di dalam Formulir A5



FORMULIR A-5 KPU
Surat Suara

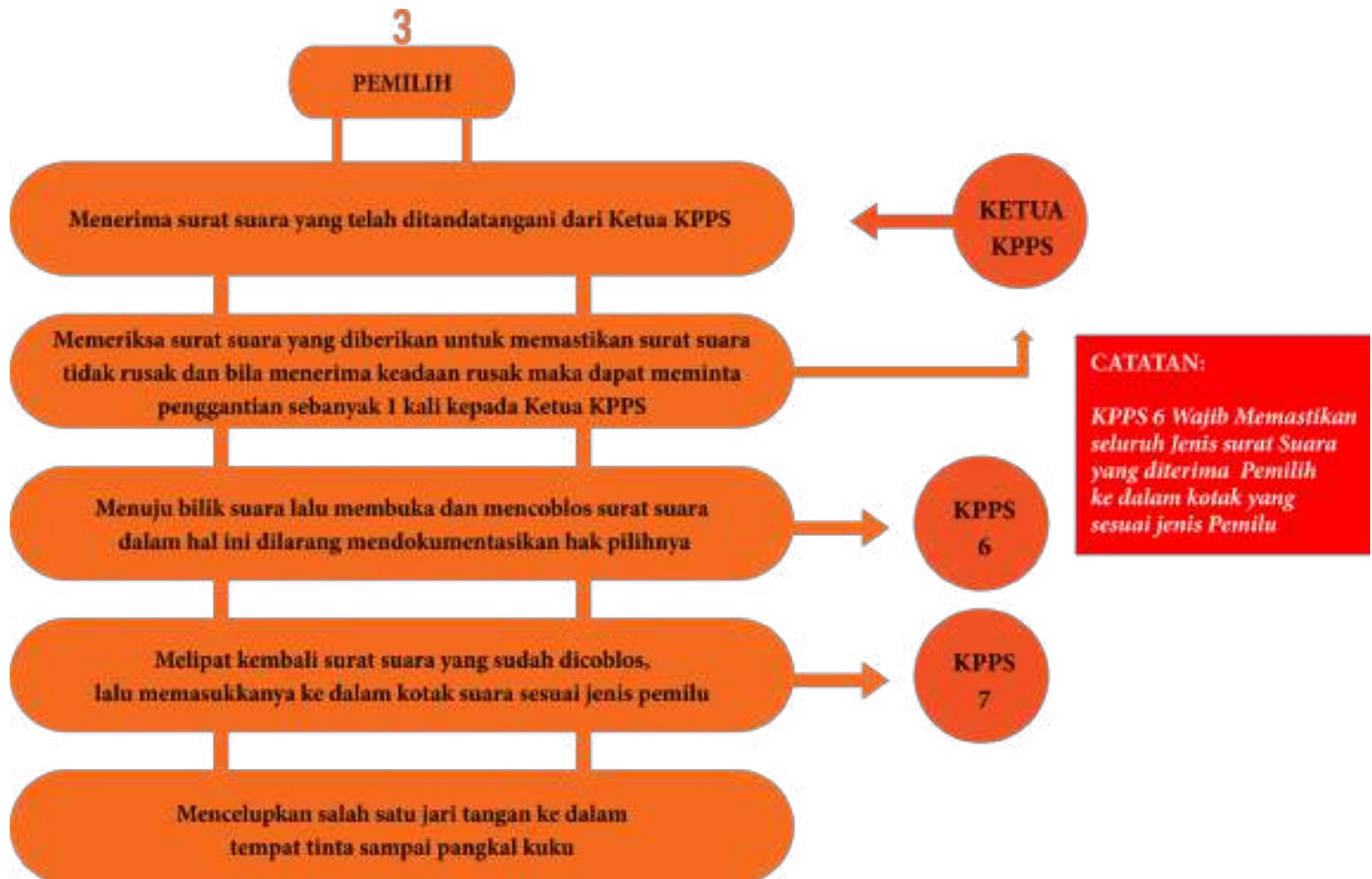
<input checked="" type="checkbox"/>	Presiden dan Wakil Presiden
<input checked="" type="checkbox"/>	DPD RI
<input checked="" type="checkbox"/>	DPD
<input type="checkbox"/>	DPD PROVINSI
<input type="checkbox"/>	DPD KABUPATEN

Tata Cara Pemilih Memberikan Suara



CATATAN:

Pukul 13.00, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir dan terdaftar atau tercatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara



Pemilih Penyandang Disabilitas

1	Ketentuan urutan pemberian suara tersebut juga berlaku untuk penyandang disabilitas, yang dapat didampingi oleh KPPS atau orang lain
2	Pemilih tunanetra dalam pemberian suara untuk DPD, dapat menggunakan alat bantu yang telah disediakan
3	Pemberian bantuan kepada pemilih dengan cara : 1. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping membantu ke bilik suara, pencoblosan oleh pemilih sendiri 2. Bagi pemilih yang tidak punya dua tangan atau tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencobloskan sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS
4	Pendamping wajib merahasiakan pilihan pemilih dan wajib menandatangani pernyataan (formulir model C3)



Pemilih penyandang disabilitas

D. Penghitungan Suara

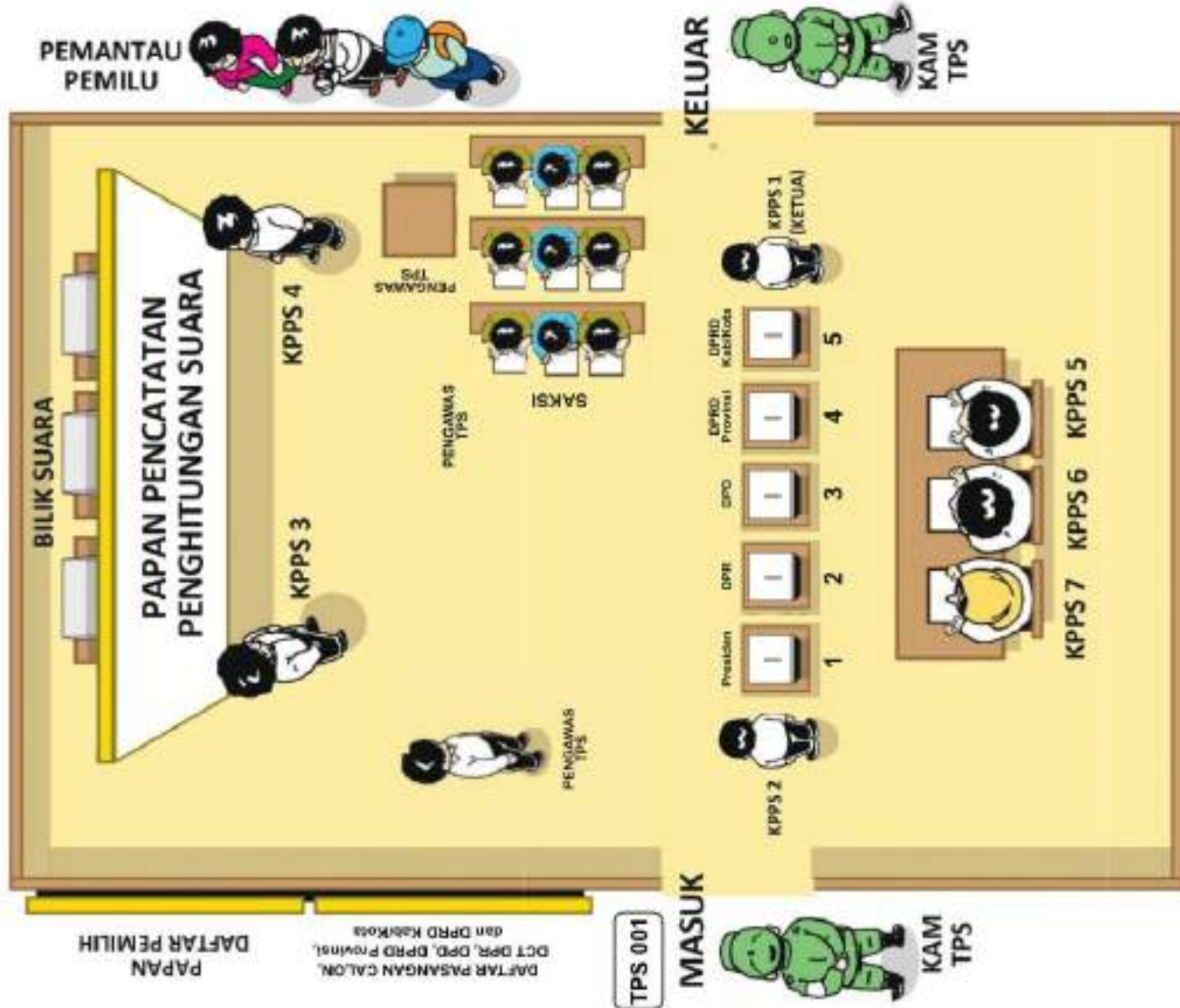
Persiapan Penghitungan Suara

1. Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara
2. Memasang formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota di papan pengumuman
3. Mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastic, serta segel pemilu dan peralatan lainnya.
4. Ketua KPPS mempersilahkan anggota KPPS, saksi, dan PPL untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
5. Ketua KPPS memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat.
6. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.

Tahapan Penghitungan Suara

- a. Ketua KPPS
 - Menjelaskan tentang tata cara penghitungan suara dan sah/tidak sahnya surat suara
 - Menentukan sah/tidak sahnya surat suara
 - Memastikan formulir Model C-KPU, Model C1-KPU dan telah dibuat dengan benar dan cermat dalam beberapa rangkap
 - Menandatangani Model C-KPU, Model C1-KPU dan Model C1.Plano-KPU
 - Meminta tanda tangan saksi dan menyerahkan Salinan kepada saksi&PPL
 - Memastikan Model C-KPU dan Model C1-KPU serta Model C2-KPU
 - Memastikan semua proses penghitungan suara berjalan dengan baik
- b. KPPS 2
 - Membuka setiap surat suara dan memberikan kepada ketua KPPS
- c. KPPS 3
 - Mencatat hasil perolehan suara calon yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam formulir Model C1.Plano-KPU
- (bersama dengan KPPS 4)
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS
- d. KPPS 4
 - Mencatat hasil perolehan suara calon yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam formulir Model C1.Plano-KPU (bersama dengan KPPS 3)
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua KPPS
- e. KPPS 5
 - Melipat surat suara setelah dibaca oleh Ketua KPPS
 - Membantu memasukkan logistik ke dalam kotak suara setelah penghitungan selesai
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua KPPS
- f. KPPS 6 & 7
 - Menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon, termasuk surat suara tidak sah dan mengikat 25 lembar suara
 - Memasukkan surat suara ke dalam sampul dan memasukkannya ke dalam kotak suara apabila pemungutan suara telah selesai

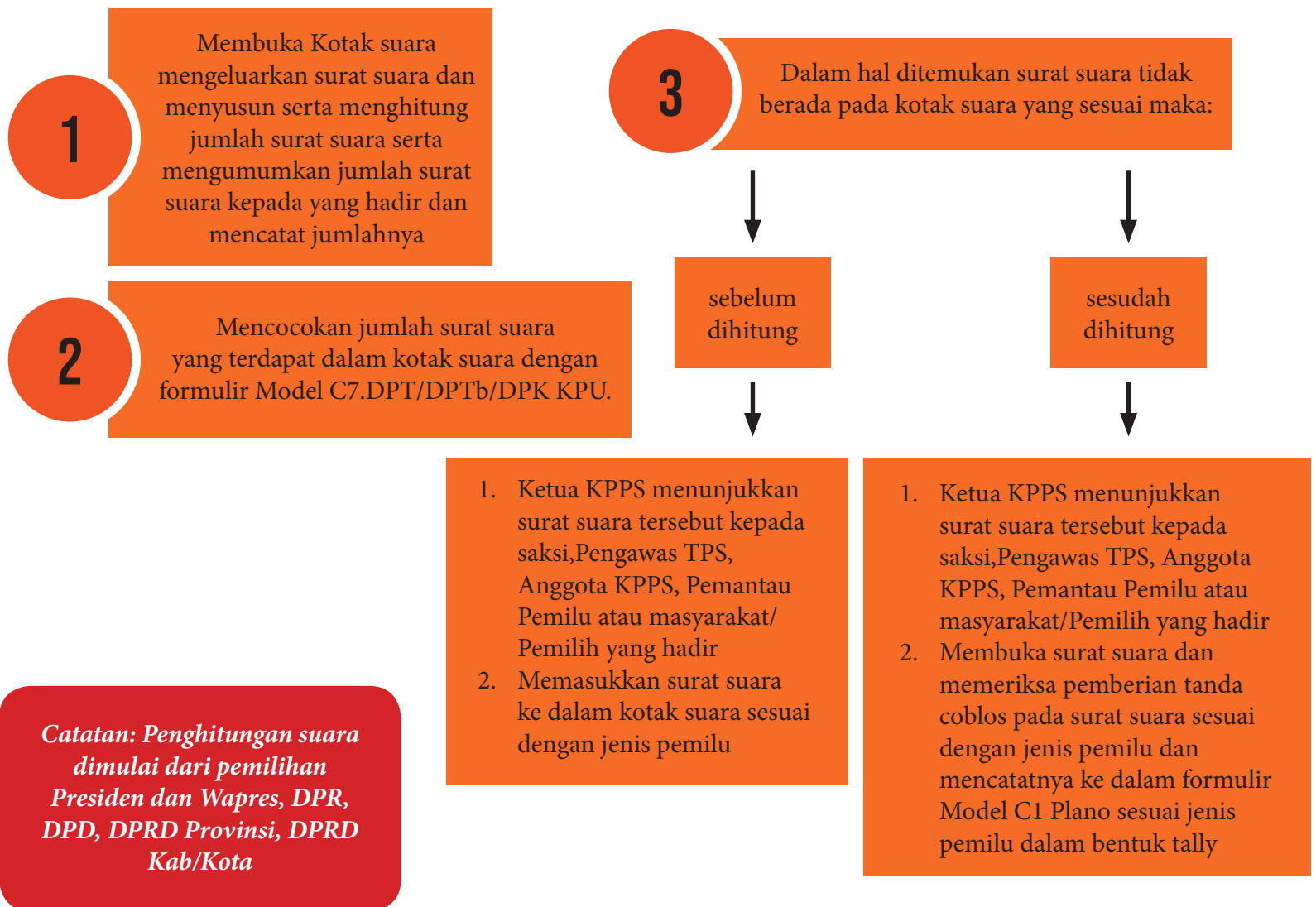
DENAH PENGHITUNGAN SUARA



URUTAN PENGHITUNGAN SUARA



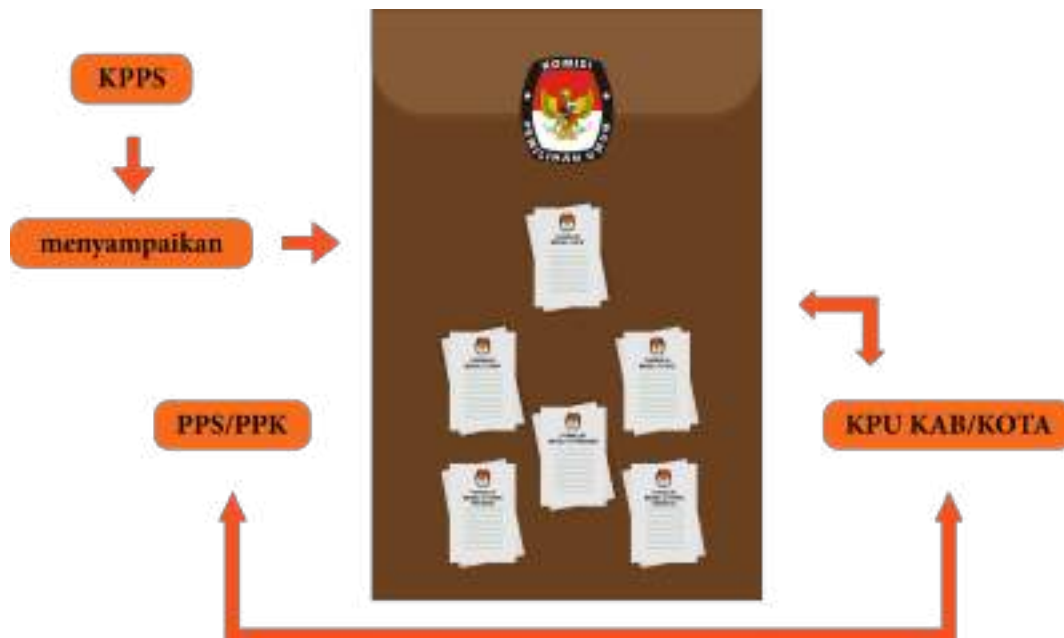
PELAKSANA PENGHITUNGAN SUARA DI TPS



CARA MENGHITUNG DAN MENCATAT SURAT SUARA KE DALAM PLANO



KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada **KPU/ KIP Kabupaten/Kota** melalui PPS atau PPK pada hari setelah proses Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai dan jika PPS atau PPK tidak dapat menyampaikannya kepada KPU/KIP Kab/Kota karena faktor geografis maka KPU/KIP Kab/Kota dapat mengambilnya kepada PPK .



E. Pengumuman Penghitungan Suara

KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel untuk diumumkan di kelurahan/desa atau sebutan lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara bersama dengan kotak suara masing-masing jenis Pemilu.

Setelah Pukul 13.00 dan pelaksanaan pemungutan selesai, dilanjutkan dengan proses penghitungan suara.

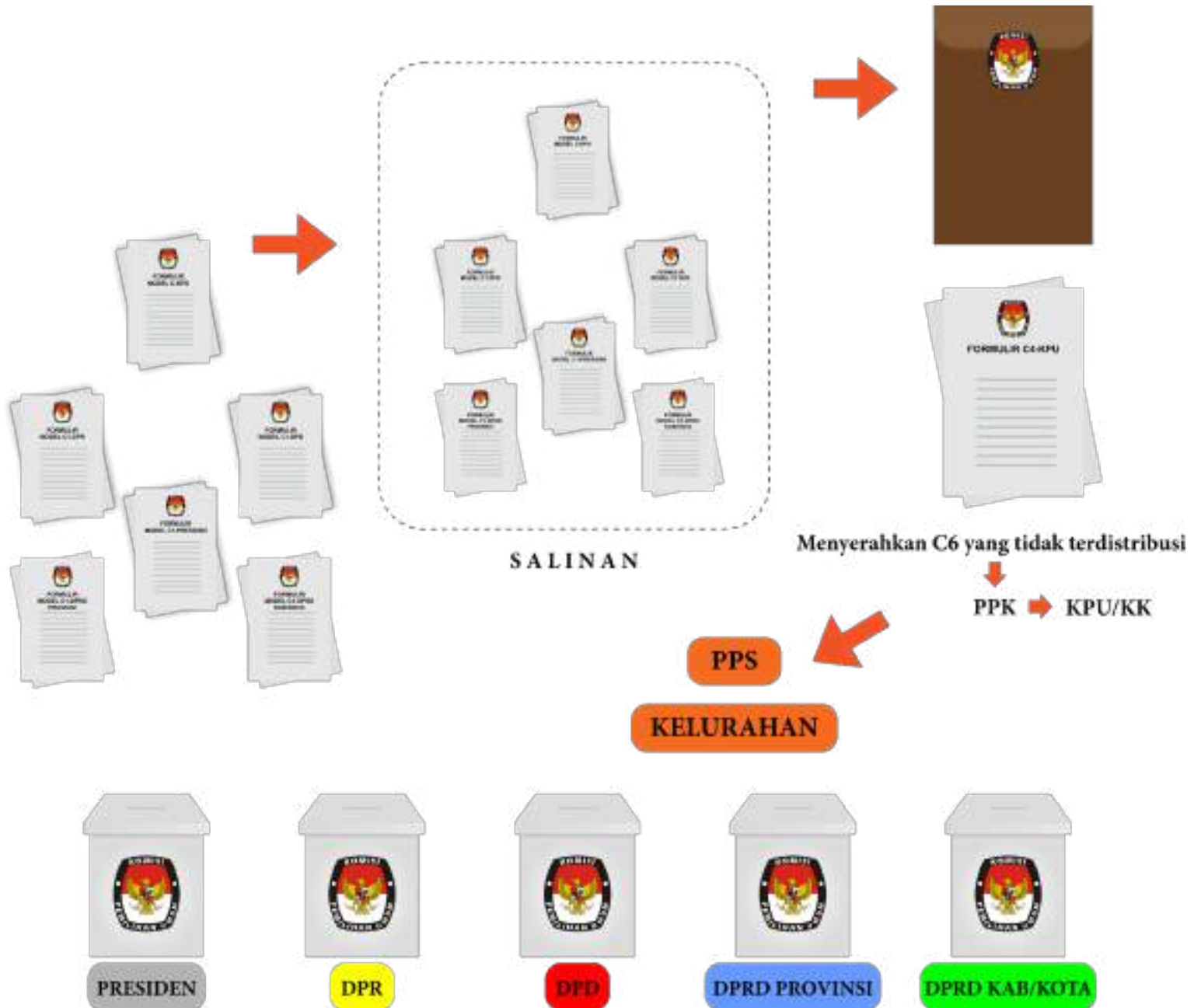




Foto karya Pemilih Pemilu Kota Malang 2019



Kegiatan penghitungan suara di beberapa TPS Kota Malang

Dalam proses pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 di kota Malang terjadi musibah yakni tewasnya 3 penyelenggara Ad Hoc dan 6 orang lainnya yang mengalami sakit dan memerlukan perawatan intensif. Sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab atas peristiwa tersebut, KPU telah memberikan santunan yang diterima langsung kepada para keluarga korban.

F. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

1. Pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, KPU kota Malang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) TPS yang tersebar di 2 (dua) kecamatan. Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu Kota Malang. Adapun kronologis kejadiannya sebagai berikut:
2. Tanggal 17 April 2019
Pemilihan Umum Daerah Kota Malang berlangsung secara serentak:
 - a. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah
 - c. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat
 - d. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
 - e. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. 20 April 2019
KPU Kota Malang menerima Surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Blimbing Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di TPS 09 Kelurahan Bunulrejo 21 April 2019
KPU Kota Malang menerima Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Klojen Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di TPS 14 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen
3. 21 April 2019
KPU Kota Malang menerima Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Klojen Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di TPS 17 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen
4. 21 April 2019
KPU Kota Malang menggelar Rapat Pleno untuk menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang adalah:
 - a. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan di TPS sebagai berikut:
 - i. TPS 09 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing
 - ii. TPS 14 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen
 - iii. TPS 17 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen.
 - b. Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada Kamis, 25 April 2019 pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB
 - c. Pemilih pada PSU adalah Pemilih yang terdapat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), serta tercatat di Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang hadir pada saat pemungutan suara Tanggal 17 April 2019 di masing-masing TPS
 - d. Jumlah Surat Suara yang digunakan pada PSU sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sesuai dengan jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT ditambah 2 % dari DPT pada TPS
 - e. Menugaskan kembali Petugas KPPS pada TPS sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

5. 21 April 2019

KPU Kota Malang menerima Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Klojen Perihal Revisi Perbaikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di TPS 14 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen

6. 21 April 2019

KPU Kota Malang menerima Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Klojen Perihal Revisi Perbaikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di TPS 17 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen

7. KPU mengadakan Rapat Pleno pada Pukul 18.00 WIB Tentang Perubahan Berita Acara

8. Penindaklanjutan Hasil Rapat Pleno KPU Kota Malang tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Di Kota Malang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

9. KPU Kota Malang mempersiapkan logistik kebutuhan untuk Pemungutan Suara Ulang

10. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Kamis, 25 April 2019 pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB

11. Hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Pemungutan Suara Ulang diserahkan kepada Kecamatan pada masing – masing TPS.

Kegiatan Pemungutan Suara Ulang di TPS 14 Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen



Kegiatan Pemungutan Suara Ulang di TPS 9 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing



Kegiatan Pemungutan Suara Ulang di TPS 17 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen



REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

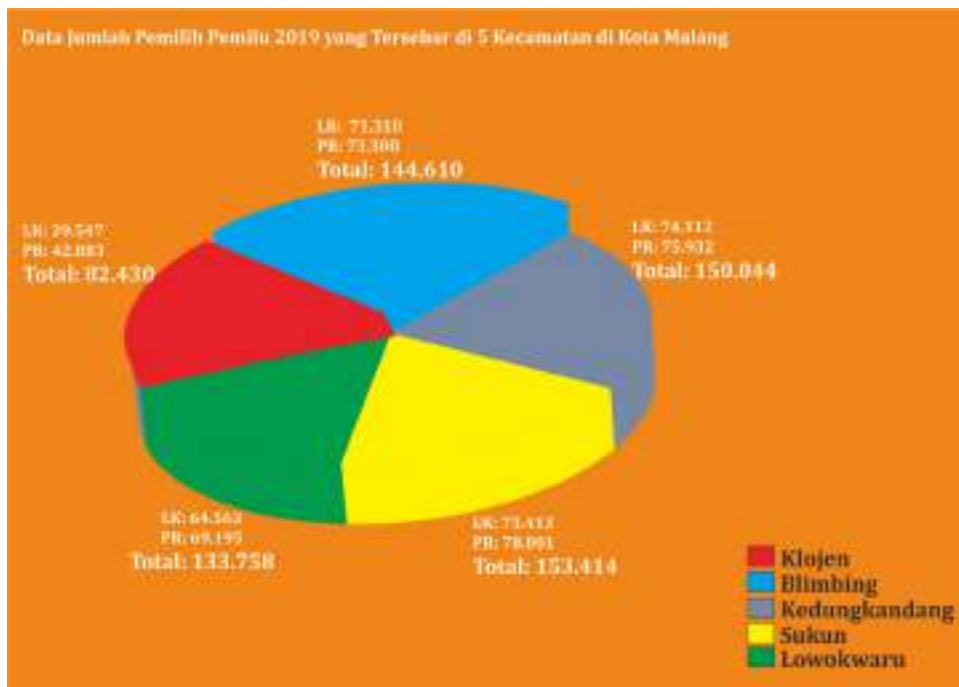
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (1) sampai dengan (3) menyatakan:

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu di dalam negeri dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. kecamatan;
 - b. kabupaten/kota;
 - c. provinsi; dan
 - d. nasional.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. PPK pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota;
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh pada tingkat provinsi; dan
 - d. KPU pada tingkat nasional.
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menghitung perolehan suara Pasangan Calon;
 - b. Pemilu anggota DPR dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR;
 - c. Pemilu anggota DPD dengan menghitung perolehan suara perseorangan calon anggota DPD;
 - d. Pemilu anggota DPRD Provinsi dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi; dan
 - e. Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menghitung perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

DATA PEMILIH DI KOTA MALANG PEMILU 2019





Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Blimbing Pemilu 2019



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kedungkandang Pemilu 2019



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Klojen Pemilu 2019



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lowokwaru Pemilu 2019



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sukun Pemilu 2019



Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Malang

CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Klojen	Blimbing	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
Ir. H. Joko Widodo Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin	41.934	74.220	75.336	86.150	68.055	345.693
H. Prabowo Subianto H. Sandiaga Salahuddin Uno	20.519	36.643	41.500	33.475	35.864	168.001

Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu 2019 di Kota Malang

		Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.382	2.435	4.826	4.370	3.870	19.883
1	Dra. Hj. Lathifah Shohib	6.617	4.261	7.478	5.958	5.153	29.467
2	Muh. Hassanudin Wahid	1.190	580	2.119	1.002	1.140	6.031
3	Ir. H. Yoyok Heru Prasetyo Adi, Diplm.SM., MM.	648	295	858	499	446	2.746
4	Dra. Hj. Suwati, MM.	446	216	914	471	281	2.328
5	Ali Ahmad	531	428	1.148	788	437	3.332
6	Drs. Muhammad Zubaid, M.Si., AIIS	292	165	467	323	255	1.502
7	Ummy Rizqiyah, SE.	140	66	355	104	111	776
8	Muhammad Khusen Yusuf	251	57	288	186	116	898
Jumlah Perolehan Suara Partai		14.497	8.503	18.453	13.701	11.809	66.963

		Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4.164	1.760	4.076	3.520	3.114	16.634
1	Moreno Soeprapto, S.Sos.	4.270	3.214	4.329	4.318	3.651	19.782
2	Chusni Mubarak, SH., MM.	849	421	1.396	864	588	4.118
3	Arina Nurfinnahari, SH.	432	161	510	381	261	1.745
4	Drs. Petri I. Octavianus, AK.	316	109	564	399	226	1.614
5	Prof. Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MS.	1.115	522	894	767	1.528	4.826
6	Zubaidah Hanum	202	65	223	175	134	799
7	Novita Indriani	248	83	240	168	126	865
8	Saur Bungaran Sinaga	174	43	205	66	75	563
Jumlah Perolehan Suara Partai		11.770	6.378	12.437	10.658	9.703	50.946

3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		10.215	5.729	8.263	13.335	9.453	46.995
1	Dr. Ahmad Basarah	5.402	3.030	4.261	6.573	6.153	25.419
2	Krisdayanti	6.779	2.974	6.693	8.514	4.976	29.936
3	Mayjen TNI (Purn.) Sakkan Tampubolon	1.933	775	2.337	2.561	1.771	9.377
4	Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M	2.914	1.993	2.820	4.985	2.260	14.972
5	Markuwat	343	108	392	428	254	1.525
6	Sase Dyah Sri Andayani	230	85	330	323	183	1.151
7	Ir. H. Muchammad Nu'man, MBA	511	191	821	514	425	2.462
8	Niken Lestari	515	174	752	470	345	2.256
Jumlah Perolehan Suara Partai		28.842	15.059	26.669	37.703	25.820	134.093

4	PARTAI GOLONGAN KARYA	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		2.147	973	2.079	2.247	1.800	9.246
1	Ir. H. M. Ridwan Hisjam	1.342	675	2.044	1.321	1.386	6.768
2	Endang Agustini, S.I.P.	424	239	545	569	344	2.121
3	Drs. M. Haris Subagio, M.M.	277	219	227	232	216	1.171
4	Evi Ayunita, S.H., M.H.	391	159	460	383	273	1.666
5	Ahmad Irawan, S.H.	311	89	229	257	155	1.041
6	Hariyatul Asna, S.H., Sp.N.	412	273	326	737	408	2.156
7	Fadhly, S.T.	94	26	108	95	257	580
8	Ir. Siswoto, M.M.	107	25	160	69	90	451
Jumlah Perolehan Suara Partai		5.505	2.678	6.178	5.910	4.929	25.200

5	PARTAI NASDEM	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		1.381	1.244	1.120	1.491	1.305	6.541
1	Kresna Dewanata Phrosakh	1.261	1.294	764	923	1.007	5.249
2	Mandira Isman	408	371	432	569	283	2.063
3	Ulya Dalila Mansur, S.Pd.I.	142	82	147	148	118	637
4	Mukhlis Pribadi	93	56	236	124	90	599
5	Moch Geng Wahyu, SH., M.Hum.	322	199	636	813	191	2.161
6	RR. Alysia Gita Purwasaputri, SH.	94	83	83	74	79	413
7	Heri Purwanto	62	34	58	71	69	294
8	Melina Siska Anitya	106	50	56	52	116	380
Jumlah Perolehan Suara Partai		3.869	3.413	3.532	4.265	3.258	18.337

6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		164	89	216	262	189	920
1	Tamrin, SH.	58	36	64	43	47	248
2	Sulistianing Sasih	46	20	58	71	46	241
Jumlah Perolehan Suara Partai		268	145	338	376	282	1.409

7	PARTAI BERKARYA	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		437	237	542	520	524	2.260
1	Sonny Pudjisasono, SH.	158	81	139	155	128	661
2	Dr. Joko Nugroho, S.Pak., MA.	118	59	195	122	113	607
3	Wina Magriet	52	14	68	55	32	221
4	Gunadi Handoko, SH., MM., M.Hum., C.L.A.	105	54	99	126	80	464
5	Joel Steve O Ticoalu	27	14	38	24	20	123
6	Rusmini	26	11	21	29	29	116
7	Agus Sugianto	35	9	107	54	52	257
8	Revalia	15	6	38	25	19	103
Jumlah Perolehan Suara Partai		973	485	1.247	1.110	997	4.812

8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		2.873	1.835	2.448	2.703	3.346	13.205
1	Dipl. Ing. H. Raden Agoeng H. W., MSc., ME.	1.619	955	1.070	991	1.477	6.112
2	H. Imam Syafi'i, Lc., SH.I., M.Pd.	2.326	1.990	2.381	1.920	3.065	11.682
3	Wuwuh Kanti Utami	321	121	166	191	408	1.207
4	Muhamad Hafitz Friadi	476	296	765	588	491	2.616
5	Rantala Sikayo	87	55	55	179	82	458
6	Nisrina Firdausi	139	74	93	130	354	790
7	Siti Nooraini Immawati, SE.	307	131	198	165	1.231	2.032
8	Heru Yunatan	203	149	202	1.965	277	2.796
Jumlah Perolehan Suara Partai		8.351	5.606	7.378	8.832	10.731	40.898

9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		1.771	777	1.536	1.894	1.265	7.234
1	Christophorus Taufik S., SH.	644	358	801	683	354	2.840
2	Ira Yuanita, S.Sos.	326	143	283	334	228	1.314
3	Drs. Jufri Muhammad Adi, SH., MH.	268	118	235	265	224	1.110
4	Sekliani, SE.	120	54	115	125	83	497
5	Ir. Aryani	182	49	125	140	107	603
6	Abdul Munawar K. Ismail, SH.I	100	26	85	98	65	374
7	Dyah Arum Sari, S.S.	147	54	79	86	77	443
8	Eddy Wahyono	994	313	460	452	424	2.643
Jumlah Perolehan Suara Partai		4.552	1.892	3.719	4.077	2.827	17.067

10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		935	243	921	734	439	3.272
1	Anisah Mahfudz	753	174	800	347	334	2.408
2	Hernowo	133	28	200	86	46	493
3	Raudatul Janah	130	45	137	109	85	506
4	H. Yan Syahrial Hasibuan	104	29	151	92	58	434
5	Zulfikar Ali Bulqis	74	17	84	55	51	281
6	Latifa	111	41	123	114	77	466
7	Luluk Aviya	34	9	52	29	20	144
8	Mahfud, SH.	65	26	83	60	36	270
Jumlah Perolehan Suara Partai		2.339	612	2.551	1.626	1.146	8.274

11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		2.277	1.873	1.361	2.229	2.103	9.843
1	Dr. Surya Tjandra, SH., LL.M.	2.016	1.790	1.193	2.503	2.017	9.519
2	Sofia Ambrani, S.Kom.	523	346	485	671	444	2.469
3	Benny Hery Ritanto	187	132	120	157	153	749
4	Noval Akbar, SE.	139	115	118	175	147	694
5	Emah Mahfudzoh	61	37	40	57	57	252
6	Merli Diarno Suharnoko, SE.	70	43	50	63	56	282
7	Dara Wulandariah	119	54	82	72	109	436
8	Kokoh Yulistio Wahono	86	40	55	57	77	315
Jumlah Perolehan Suara Partai		5.478	4.430	3.504	5.984	5.163	24.559

12	PARTAI AMANAT NASIONAL	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		1.296	668	1.214	751	1.396	5.325
1	H. Totok Daryanto, SE.	2.299	1.248	3.261	1.027	2.822	10.657
2	Hj. Lilik Muharti, SH., MH.	290	123	253	199	344	1.209
3	Moh jaelani, SH.	324	131	274	146	160	1.035
4	Meytha Nurani, SKM., MScPH.	119	52	153	157	142	623
5	Ahmad Muhamad Nur	133	61	124	106	123	547
6	Tyagita Indrasswastya	32	11	49	33	30	155
7	Endang Sri Sukmawati, SE.	72	15	53	59	53	252
8	Zainul Khatim, S.S., M.Pd.	146	42	64	53	110	415
Jumlah Perolehan Suara Partai		4.711	2.351	5.445	2.531	5.180	20.218

13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		115	88	131	398	106	838
1	Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA.	69	36	98	152	41	396
2	Lintang Demossari Trisnaputri	20	33	22	191	22	288
3	Abdul Rachman Dotokusumo, S.H.	27	19	26	43	16	131
4	Evie Lestari Andajani, SH.	38	32	19	111	30	230
5	Rudiyanto, SE.	13	10	18	35	16	92
6	Ir. Antung Harudji Santoso, MM. IAI	42	24	26	33	104	229
7	Nugraheni Hadiyanti, SP., MP.	8	0	3	27	4	42
8	Mochammad Agus Winarno, S.Pd.I	47	18	33	36	55	189
Jumlah Perolehan Suara Partai		379	260	376	1.026	394	2.435

14	PARTAI DEMOKRAT	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		2.668	1.156	2.502	2.597	1.934	10.857
1	Nurhayati Ali Aseggaf, M.Si.	1.240	693	1.309	1.095	839	5.176
2	Ir. H. Ghufron Marzuqi	1.268	470	1.396	897	1.053	5.084
3	Nurseto Budi Santoso	612	221	855	908	286	2.882
4	Ardiansyah, A.Md	207	64	243	259	131	904
5	Dian Febrianti	240	73	250	265	117	945
6	Sutrisno, SH.	98	44	167	224	91	624
7	Nurma	76	19	89	82	36	302
8	Kol. Laut (Purn.) Agus Subagyo, SE.	668	186	481	342	279	1.956
Jumlah Perolehan Suara Partai		7.077	2.926	7.292	6.669	4.766	28.730

19	PARTAI BULAN BINTANG	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		173	78	170	161	249	831
1	Dr. Aries Musnandar	96	53	72	77	262	560
2	Kamal Haikal, S.Ap	22	18	42	24	30	136
3	Fatimah Husein Assegaf, MA.	47	25	39	47	46	204
4	Eti Yuliati, S.Pd.I	40	7	17	22	26	112
5	Agustini, SE.	6	6	3	13	8	35
6	Ressy Hesty	6	2	6	5	8	27
7	Drs. Arifin S., SH., MH.	12	8	8	12	14	54
8	M. Cakrawala A.	21	19	27	18	255	340
Jumlah Perolehan Suara Partai		423	215	384	379	898	2.299

20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		101	46	80	106	81	414
1	Eko Hariadi	50	26	46	52	30	204
2	Nurhanisa Maysa	43	19	40	29	26	157
Jumlah Perolehan Suara Partai		194	91	166	187	137	775

Perolehan Suara Calon Anggota DPD Pemilu 2019 di Kota Malang

No	CALON ANGGOTA DPD	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
1	A. Agus Patminto	3.283	1.601	3.806	4.076	2.916	15.682
2	Ir. H. AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti	9.720	4.894	10.162	10.524	8.958	44.258
3	Abdul Qadir Amir Hartono, SE., SH., MH.	7.812	4.105	7.707	7.577	8.889	36.090
4	Achmad Nurul Ilmi, SH.	2.840	1.268	4.041	2.990	2.113	13.252
5	Achmad Rusyad manfaluti, S.Ag., M.Si.	1.438	762	1.496	1.556	1.248	6.500
6	Adilla Azis	8.392	4.327	7.141	8.262	6.599	34.721
7	H. Ahmad nawardi, S.Ag.	2.187	1.012	2.359	2.677	2.227	10.462
8	Ir. H. Alfa Isnaeni, M.Si.	2.254	1.467	2.004	2.519	1.886	10.130
9	Andi Yuwono, S.Sos., M.Si.	893	346	870	1.052	771	3.932
10	A. Syaiful Ismail, SH., MH.	1.640	677	1.798	1.881	1.408	7.404
11	Enrico Whenry Rizky Tambunan	9.308	6.150	7.547	9.174	7.279	39.458
12	Evi Zainal Abidin	10.603	4.667	10.852	10.735	7.200	44.057
13	Fairouz Huda, S.Sos.	1.576	1.219	1.514	1.372	1.118	6.799
14	Fatihul Faizun, S.Sos.	866	418	856	952	729	3.821
15	Dra. Hj. Harbiah Salahuddin, M.Si.	3.523	1.775	3.228	3.536	2.907	14.969
16	Imam Khodri TE., S.S., M.Th.I.	773	397	916	728	613	3.427
17	Mashudi, S.T.P.	894	431	1.035	940	776	4.076
18	Misbahul Munir, M.Ag.	3.147	1.409	3.025	2.781	2.612	12.974
19	Mohammad Trijanto, SH.	1.249	550	1.283	1.443	1.161	5.686
20	Muhamad Koderi HW, M.T.	707	337	731	789	595	3.159
21	H. Nadjib Hamid, M.Si.	7.482	5.859	8.025	7.174	9.254	37.794
22	H. Pudjo Basuki	1.481	786	1.166	1.416	1.236	6.085
23	Purwo Ali	997	834	587	1.376	1.032	4.826
24	Dr. H. RPA. Mujahid Ansori, M.Si.	2.182	1.132	2.256	2.177	1.973	9.720
25	H. Sonhadji Zainudin, SE., MM.	452	220	398	422	451	1.943
26	Ir. H. Suhandoyo, SP.	3.394	2.490	2.394	4.001	3.199	15.478
27	H. Supriasto, SH., MH.	614	281	545	1.188	662	3.290
28	Zaiful Anam	842	393	1.078	855	604	3.772

Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pemilu 2019 di Kota Malang

		Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.673	2.749	5.184	4.556	4.053	21.215
1	Hikmah Bafaqih, M.Pd.	3.009	1.448	3.354	1.915	2.507	12.233
2	H. Fatchullah, SH.	1.666	1.055	2.587	2.886	1.079	9.273
3	Dra. Hj. Khofidah	1.500	896	1.962	1.225	1.229	6.812
4	H. Muhaimin DRS., M.T.	865	593	1.333	720	1.088	4.599
5	Ali Asyhar	394	419	873	772	301	2.759
6	As'alit Thoiyibah	156	77	238	159	96	726
7	Junaidi, S.Pd.I	152	56	722	132	136	1.198
8	Muchammad Ja'far Shodiq, SH., MH.	852	302	950	617	524	3.245
9	Ahmad Zazuli, S.Sos.	183	63	533	197	121	1.097
10	Hj. Laili Abidah, M.M.	243	120	308	178	129	978
11	Andik Supriyanto, SE.	141	75	113	107	89	525
Jumlah Perolehan Suara Partai		13.834	7.853	18.157	13.464	11.352	64.660

		Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4.468	1.984	4.466	3.918	3.503	18.339
1	Aufa Zhafiri, S.Ak.	1.172	665	2.029	1.094	922	5.882
2	Drg. Hj. Handari Yektiwi, M.Kes	1.466	680	1.456	1.208	1.049	5.859
3	Grace Rosalyn Octavianus	357	170	355	389	284	1.555
4	Sutrisno, SE.	492	172	748	629	448	2.489
5	Emma Sugiastuti	992	531	725	755	534	3.537
6	Ir. Prihandoyo Kuswanto	415	189	375	384	333	1.696
7	Ambiwooro Amirulloh Machroni Muda, SE.	564	151	275	478	314	1.782
8	Lilik Endang Sudarnik	183	74	230	164	117	768
9	Natalia Putri Prawanti	216	69	163	143	104	695
10	Drs. A. Taufiq Bambang DHT.	365	167	338	275	288	1.433
Jumlah Perolehan Suara Partai		10.690	4.852	11.160	9.437	7.896	44.035

3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		11.151	6.185	8.931	14.963	10.215	51.445
1	Dra. Sri Untari, M.AP.	7.534	4.661	5.886	8.818	8.035	34.934
2	Ir. Daniel Rohi., M.Eng., SC.	2.707	1.597	2.248	3.680	2.012	12.244
3	Sugeng Pujiyanto	1.211	375	1.181	1.778	1.047	5.592
4	Anna Satriana, S.Sos., M.AP.	1.105	510	1.321	1.461	892	5.289
5	Ir. Sutiyo	791	341	937	1.179	646	3.894
6	Sang Nyoman Astawa	503	258	704	830	515	2.810
7	Tri Widyanto	466	124	655	590	372	2.207
8	Tri Retno Ririn Wulandari	531	160	1.099	533	405	2.728
9	Budi Santoso	525	176	791	669	401	2.562
10	Ida Wijayanti	576	104	376	460	193	1.709
11	Gunawan HS	316	123	610	305	174	1.528
Jumlah Perolehan Suara Partai		27.416	14.614	24.739	35.266	24.907	126.942

4	PARTAI GOLONGAN KARYA	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		2.312	1.104	2.156	2.313	1.959	9.844
1	H. R. B. Zainal Arifin, SH., M.Hum.	1.122	673	1.371	1.642	1.065	5.873
2	Rafael Obeng, S.Sos., M.Si.	189	116	264	235	165	969
3	Desi Natalia	377	208	324	380	286	1.575
4	Siadi, SH.	516	194	482	302	548	2.042
5	Rachmad Basuki, SH.	299	114	269	265	164	1.111
6	Rucita Permatasi, S.Des.	353	183	726	579	223	2.064
7	Achmad Fajar, SE.	442	203	805	441	583	2.474
8	Viktor tanasale, S.Ikom.	121	36	179	63	59	458
9	Hj. Fariyal Naftalin, SE.	251	50	172	163	186	822
10	Diana Sari Windjajanti, SH., M.Hum.	120	77	117	127	94	535
11	Hasmono, S.Sos.	33	35	24	63	63	218
Jumlah Perolehan Suara Partai		6.135	2.993	6.889	6.573	5.395	27.985

5	PARTAI NASDEM	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		1.428	1.257	1.140	1.597	1.303	6.725
1	Hj. Jajuk Rendra Kresna, SE., MM.	946	1.144	812	976	923	4.801
2	H. Ali Muchsin	160	192	196	264	109	921
3	Abdul Majid, S.Psi	110	114	116	172	133	645
4	Suwaji	97	65	244	186	82	674
5	Yopi Adi Prasetyo	210	116	210	250	106	892
6	Farikhatul Azizah	74	76	94	72	63	379
7	Suhartono	55	29	59	71	53	267
8	Anang Subagyo	49	38	51	67	31	236
9	Yosita	71	65	72	88	78	374
10	Efti Maria Sari	49	28	32	55	35	199
11	Mohammad Nur Sofiyon	39	25	43	53	43	203
Jumlah Perolehan Suara Partai		3.288	3.149	3.069	3.851	2.959	16.316

6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		208	128	239	239	243	1.126
1	James Tenggar Arianto, SE.	108	75	83	83	64	383
2	Aisyah Pratika Imanta	73	37	80	80	65	335
Jumlah Perolehan Suara Partai		389	240	402	441	372	1.844

7	PARTAI BERKARYA	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		497	230	549	549	566	2.391
1	German Arifin Panjaitan, SH., MH.	130	56	136	168	103	593
2	Wartoadi, SE.	103	65	180	83	112	543
3	Rini Sona	87	30	69	97	86	369
4	Ir. Hariyadi, MP.	107	43	92	88	81	411
5	Hari Effendi, SH.	68	23	68	81	52	292
6	Yurike Ariyanti, SE.	58	25	58	51	39	231
7	Agus Kuswanto, AMd.	64	16	96	78	62	316
8	Endang Tri Handayani	26	14	45	30	25	140
9	Widowati	18	8	20	21	14	81
10	Sri Sulastri	33	13	34	20	28	128
Jumlah Perolehan Suara Partai		1.191	523	1.347	1.266	1.168	5.495

8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		3.270	1.971	2.785	3.040	3.792	14.858
1	Dwi hari Cahyono, Shut	2.000	1.212	1.655	1.317	1.916	8.100
2	Ahmadi	1.215	1.564	1.146	1.168	1.864	6.957
3	Aniswati	509	212	322	302	673	2.018
4	Ahmad Bauzer	564	549	596	709	803	3.221
5	Yuliati Handayani	284	113	207	305	294	1.203
6	Amir Gunawan	186	79	162	369	440	1.236
7	Sugino Roni Hidayat	139	62	132	142	533	1.008
8	Sofiatin Muawanah	319	171	285	1.140	456	2.371
9	Mirza Ahmad Purnomo	266	211	221	234	642	1.574
10	Agus Tina Sari	58	38	72	195	108	471
Jumlah Perolehan Suara Partai		8.810	6.182	7.583	8.921	11.521	43.017

9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		1.764	722	1.502	1.784	1.246	7.018
1	H. Eddy Sukaton Saputra, SH., SE., MM., MH.	740	304	684	690	510	2.928
2	Drs. Bambang Andjar Soepeno, SH., M.Si.	284	208	280	597	195	1.564
3	Hartiti Pudji Lestari, SH.	209	75	154	196	124	758
4	Ir. Komara Elusigit Wekantomojudo	177	161	152	179	111	780
5	Purwito	168	45	100	119	90	522
6	Suci Kusmawati	166	69	170	196	128	729
7	Eko hadi Irawan Sugianto	79	26	42	62	42	251
8	Joko Wiyono	101	60	105	109	75	450
9	Helen Storyna Achjadi, SH.	192	117	312	218	146	985
10	R. Mochammad Achjadi, SH.	56	28	49	56	40	229
11	Farida Maimunah Wati	54	19	35	38	32	178
Jumlah Perolehan Suara Partai		3.990	1.834	3.585	4.244	2.739	16.392

10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		981	263	870	778	484	3.376
1	A. Khairul Fattah, S.HI.	599	183	907	325	213	2.227
2	Rachmad Taufik Hidayat	228	40	332	141	119	860
3	Risa Nursyahni	108	48	144	107	86	493
4	Mirban Soetjohjo	61	18	86	67	35	267
5	Kartika Deny Asokawati, S.Pd.	92	35	100	107	50	384
6	Anggoro Cipto Ismoyo, ST., M.Sc.	59	22	63	60	44	248
7	Fahrin Nisa', S.Pd.I.	62	21	82	57	46	268
8	Akhamd Faruq	80	21	132	61	35	329
9	Abdi Manaf Sukmana	29	12	51	20	9	121
10	Febriyana Hidayati	62	15	49	45	29	200
Jumlah Perolehan Suara Partai		2.361	678	2.816	1.768	1.150	8.773

11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		2.564	2.171	1.559	2.592	2.347	11.233
1	Arif Afandi	564	352	375	551	538	2.380
2	Clemens hary Agus Sudibyoy, SE.	907	819	435	862	810	3.833
3	Azizatul Maghfiro	214	103	187	223	177	904
4	Yudha Rachman Winarto, ST., MT.	354	266	273	314	436	1.643
5	Heribertus Sumarso, SE.	691	522	354	738	509	2.814
6	Hikmatus Solicha, S.Ikom.	138	65	139	103	149	594
7	Muzdalifah, SE.	137	70	124	147	128	606
8	Ir. Agus Maulana	155	111	129	160	176	731
Jumlah Perolehan Suara Partai		5.724	4.479	3.575	5.690	5.270	24.738

12	PARTAI AMANAT NASIONAL	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		1.402	765	1.324	904	1.637	6.032
1	Alfie Rahman, SE.	1.088	980	1.991	621	1.439	6.119
2	Ali Muthohirin, S.Sy.	357	113	224	139	348	1.181
3	Kartika Woro Wardhani P.	127	58	159	108	128	580
4	Warsito, SE.	601	83	477	197	637	1.995
5	Irfan Marthadi Tarasakti, SH.	117	70	160	90	137	574
6	Lilis Anik Purnawati	118	73	151	112	105	559
7	H. Ainus Rafiq Sophiaan, SE., M.Si.	315	184	295	253	446	1.493
8	Agus Wijaya	131	29	62	50	47	319
9	Rini Utami	53	19	40	36	74	222
10	Moch. Saiful Hidayat	99	67	121	78	114	479
11	Muslikhah	47	26	32	26	50	181
Jumlah Perolehan Suara Partai		4.455	2.467	5.036	2.614	5.162	19.734

13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		111	89	117	360	117	794
1	Ahmad Ilman Gama	79	74	119	169	72	513
2	Eko Kuswoyo	25	40	17	131	28	241
3	RR. E. S. R. Deslisetyawati, BA.	17	25	29	59	19	149
4	Dia Noraris Vantiwardany, SE.	24	7	18	101	10	160
5	Lisa Larasati	14	16	19	56	15	120
6	Nanda Kusuma	18	11	28	80	19	156
Jumlah Perolehan Suara Partai		288	262	347	956	280	2.133

14	PARTAI DEMOKRAT	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		2.717	1.189	2.547	2.751	1.989	11.193
1	Drs. Agus Dono W., M.Hum.	1.943	855	1.971	1.403	1.222	7.394
2	Afin Kusani	219	100	278	251	172	1.020
3	Rina, SH.	418	186	413	472	272	1.761
4	Drs. Mashuri, M.Si.	326	148	401	364	285	1.524
5	Thoriq bin Ziyad	288	174	450	341	202	1.455
6	Fitri Pertiwi, dr.	250	103	264	471	166	1.254
7	Lukitaningsih, S.HI.	119	38	108	123	59	447
8	Ni'matunisa'	285	24	249	96	44	698
9	Lindra Puspita	96	26	94	185	30	431
10	Anis Lutfiah	120	42	222	73	39	496
11	Rizky Noor Hamidinah, S.Sos	477	62	152	125	158	974
Jumlah Perolehan Suara Partai		7.258	2.947	7.149	6.655	4.638	28.647

19	PARTAI BULAN BINTANG	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		192	90	190	167	283	922
1	Dra. Suliana, MM.	99	82	78	150	215	624
2	Ir. Januardianto, MSC.	59	26	45	38	72	240
3	Rudianto, S.Pd.	28	14	37	27	54	160
4	Dra. Farida	34	26	39	34	34	167
5	Sudarto Eko Waluyo	20	10	27	26	43	126
Jumlah Perolehan Suara Partai		432	248	416	442	701	2.239

20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	Blimbing	Klojen	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru	Jumlah
		95	40	92	68	85	380
1	Tomy Wibowo	43	24	48	42	45	202
2	Dita Rosaria Indah, SP.	39	17	28	29	33	146
3	Rika Andriyana, SE.	41	10	34	19	25	129
Jumlah Perolehan Suara Partai		218	91	202	158	188	857

Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Malang Pemilu 2019 di Kota Malang

1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Jumlah
KLOJEN		1.787
1	Arief Wahyudi, SH.	1.787
2	Ir. Sumartiningih	210
3	Supriyadi	1.658
4	Nur Syahrudin, A.P.	753
5	Hj. Ninik Indayani, SPI.	1.622
6	Abdul Muis, SE.	91
Total Suara Partai		7,908

1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Jumlah
KEDUNGKANDANG		3.404
1	Dra. Hj. Ngatmiati, M.Pd.	1.595
2	Abd. Wahid	3.663
3	Drs. H. Marzuki	2.429
4	Budi Sutomo, ST.	2.311
5	H. Rosidi, S.Ag.	1.159
6	Ageng Nazila Wulandari	310
7	Ir. H. Abd. Khalis	1.484
8	M. Nur Junaedi Amin	951
9	Ike Kisnawati	3.701
10	Niriyanto	162
Total Suara Partai		21.085

1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Jumlah
LOWOKWARU		3.345
1	Ahmad farih Sulaiman, S.Pd.	2.141
2	Rebra Manggala Putra, SE.	968
3	Hj. Narwati, Dra., M.K.Pd.	948
4	Ir. Muslikh	380
5	Muzayin, Drs.	282
6	Rifka Astriana	113
7	David Rahmat Hakiki	1.082
8	Anik Chamidah, SH.	137
9	Dedi Iskandar, S.Sos.	111
Total Suara Partai		9.482

1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Jumlah
BLIMBING		3.320
1	Abdurrochman, SH.	3.154
2	H. Didiak Saksono, SE.	1.565
3	Hartatik, SE	1.607
4	H. M. Muzamil	1.009
5	Syahrul Moktar Afandi	494
6	Astutik	206
7	Zaini Nashiruddin, SE.	291
8	Elyus Hendi Humaidi ANM, S.Pi.	1.555
9	Yuli Isrini, S.Pd.	668
10	Nur Kasianto	472
Total Suara Partai		14.341

1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Jumlah
SUKUN		3.922
1	Mulyanto, SH.	0
2	H. Siswo Waroso, SE.	935
3	Diana Maf'ulla, S.Sos.	666
4	Arifin, SH.	443
5	Drs. H. Fathol Arifin, M.H.	3.638
6	Melinda Ayu Santika	166
7	Andi Setiawan	348
8	Afifah Setiani	204
9	Muhammad Anas Muttaqin, S.Psi.	1.706
10	Karipin, ST.	656
Total Suara Partai		12.684

**Total Perolehan
Suara Partai PKB**

65,500

2	GERAKAN INDONESIA RAYA	Jumlah
KLOJEN		1.345
1	Fahrur Roozi Riyanto	1.102
2	Rimzah	2.327
3	Ambar Sutjahjanti, SE., ST., MT.	267
4	Firman Ibnu Yudha	96
5	Kuncoro Wibowo	120
6	Dra. Sulistiani	94
Total Suara Partai		5.351

2	GERAKAN INDONESIA RAYA	Jumlah
KEDUNGKANDANG		2.983
1	Mohammad Ula, SH.	3.540
2	Ninuk Dartiwi, SE.	1.211
3	Heru Purnomo, ST.	494
4	Nurul Faridawati	3.719
5	H. Agung Mustofa	428
6	Muhammad Muhsin	190
7	Ir. Iman Wahyudi	221
8	Dwi yunita Kurniawati	176
9	H. Moch Tohir, SH.	158
10	Ony Risdian	280
Total Suara Partai		13.400

2	GERAKAN INDONESIA RAYA	Jumlah
LOWOKWARU		3.912
1	Teguh Puji Wahyono, SE., MM.	0
2	Lelly Therisiyawati	614
3	Sri Nurhayati, A.Md.	392
4	Eko Yulanto, S.Sos.	0
5	Agung Darsono	451
6	Dwi Astutik, S.Pd.	242
7	Hadi Sulistijo	93
8	Mochamad Asrad	445
9	Rachmat Hidayat	149
Total Suara Partai		6.298

2	GERAKAN INDONESIA RAYA	Jumlah
BLIMBING		4.194
1	Letkol (Purn.) Suparno	0
2	Kol (Purn.) Drs. Djoko Hirtono, SSTF, M.Si	1.860
3	Kusuma Retno Rahayoni	266
4	Andri Wiwanto, ST., MM.	1.548
5	Mulyadi	196
6	Tri Panglipur	80
7	Danny Agung Prasetyo	1.290
8	Heri Prastowo	109
9	Dra. Lydia latih Muhartani	639
10	Agus Rachmad Hakim	340
Total Suara Partai		10.522

2	GERAKAN INDONESIA RAYA	Jumlah
SUKUN		2.655
1	Dra. RM. EEN. Ambarsari	727
2	Dharman Susanto	1.433
3	Imam kanapi, SE	830
4	Randy gaung Kumaraning Al Islam	2.704
5	Fifi Sumanti	450
6	Dian Santoso	136
7	Rully Agus Tristanto	577
8	Eka Wahyu Utami	61
9	Mohammad Roys Annas Yusuf, ST.	211
10	Wimboningsih Nareswari	43
Total Suara Partai		9.827

**Total Perolehan
Suara Partai GERINDRA**

45.398

3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Jumlah
KLOJEN		5.453
1	Iwan Mahendra, S.Sos. M.AP.	2.965
2	Yusana Intiyaswati, SE.	1.360
3	Teguh Mulyono, dr.	0
4	Jerufael Manoradja, S.Ikom.	701
5	Mahmeru	166
6	Etty Damayanti MS.	267
Total Suara Partai		10.912

3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Jumlah
KEDUNGKANDANG		6.734
1	Drs. Agoes Marhaenta, MH.	2.905
2	Luluk Zuhriyah	2.166
3	Arief Hermanto, ST.	0
4	Sutikno, S.Sos.	1.939
5	Yusuf Tri Ananta	760
6	Endang Yuliaty	596
7	Sunaryo	1.536
8	Amithya Ratnanggani Sirraduhita, S.S.	3.808
9	Ruhadi Rarundra	1.694
10	Gibran Yusak Reynaldi, S.Pn.	415
Total Perolehan Suara Partai		22.553

3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Jumlah
LOWOKWARU		8.047
1	I Made Rian Diana Kartika, SE.	5.849
2	Sugianto	1.270
3	Nurul Setyowati, SE.	3.793
4	Andy Lasah Bandar, SH.	649
5	Suhartono, Amd. Ak.	561
6	Sundari	379
7	Siswoyo	776
8	Nurul Aini Roisatul, S.Psi.	434
9	Drs. Edhi Aprilianto	816
Total Perolehan Suara Partai		22.574

3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Jumlah
BLIMBING		8.076
1	Eko Herdiyanto	2.496
2	Sugiono	1.658
3	Dwi Winarni, SE.	1.332
4	Siswandi	890
5	Taufiq Huda	702
6	Dra. Fenti Setianingtyas	911
7	Hari Imam handoko	735
8	Bambang Heri Susanto	1.205
9	Wiwiek Sukesie, D.Rr., Dra., M.Si.	1.689
10	Harvad Kurniawan R., SH.	23.251
Total Perolehan Suara Partai		22.945

3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Jumlah
SUKUN		10.097
1	H. Wanedi	6.030
2	Rosani Projo	1.105
3	Lea Mahdarina, ST.	3.985
4	Hadi Susanto, SH.	709
5	Edy Hermanto, SH.	1.636
6	Sri Murti, SE.	1.223
7	Sihwantjana	1.256
8	Agung Nugrahawan, ST., S.Sos.	347
9	Wury Asri, SH.	933
10	Ferry Kurniawan	2.696
Total Perolehan Suara Partai		30.017

**Total Perolehan
Suara Partai PDI-P**

109.001

4	PARTAI GOLONGAN KARYA	Jumlah
KLOJEN		746
1	Nugroho Agus Widjanarko, ST.	511
2	Ana Rokmatus Sa'diyah, SH., MH.	791
3	Moh. Arif Budiarto, ST.	1.158
4	Dra. Noor Handajaningih, MMPd.	141
5	Drs. Ireng Sugiri, SE., M.Si.	209
6	M. Bhakti Negoro, ST.	214
Total Perolehan Suara Partai		3.770

4	PARTAI GOLONGAN KARYA	Jumlah
KEDUNGKANDANG		1.627
1	Ahsan Ismail	913
2	Ida kade Sumberjaya	1.066
3	Sri Rachmawati, SH.	250
4	Suryadi, S.Pd.	1.620
5	Drs. Bambang Agus Riyanto	406
6	Susi Dwi Herawati	145
7	Gendot Santoso, SE.	484
8	Yusra Soedirman, SAP., M.Si.	1.245
9	Yuhana Handayani	96
10	Mindayati Puspitorini	116
Total Perolehan Suara Partai		7.968

4	PARTAI GOLONGAN KARYA	Jumlah
LOWOKWARU		1.450
1	Hj. Retno Sumarah, SE., MM.	2.467
2	Dedi Sukariyono, SE., MM.	537
3	M. Samsul Efendi, SE.	453
4	Mohammad Reza Januar, SE.	182
5	Mimin Sulistyoningih, SH. M.Hum.	182
6	Hj. Indahjati, SH.	242
7	Ahan Syahrul Arifin, SE., ME.	2.120
Total Perolehan Suara Partai		7.633

4	PARTAI GOLONGAN KARYA	Jumlah
BLIMBING		1.582
1	Umiati, SH.	852
2	Teguh Darwanto, SH.	796
3	Drs. Samsul Arifin	316
4	Sumadi	1.012
5	Ahmad Arief, ST.	841
6	Jirah Puji Rahayu, S.Pd.	708
7	Hj. Aminah Toeti Kismalawati, SH.	274
8	Eddy Widjanarko, S.AP.	1.259
9	Fuad Ardiansyah	1.222
10	Nof Faisal Al Muchtar, S.IP.	49
Total Perolehan Suara Partai		8.911

4	PARTAI GOLONGAN KARYA	Jumlah
SUKUN		1.621
1	Drs. H. Rahman Nurmala, MM.	1.010
2	Dra. Hj. Yekti Sugiarti	789
3	Drs. Yuliono, MSc.	409
4	Yuli Suhartatik, SE.	554
5	Sahmawi, S.Psi.	511
6	Sri Djuma'ati Ningsih	120
7	Hari Sujito, SP.	938
8	Moh. Daviq	276
9	Ninik Hermiati	195
Total Perolehan Suara Partai		6.423

**Total Perolehan
Suara Partai GOLKAR**

34.705

5	PARTAI NASDEM	Jumlah
KLOJEN		968
1	Gagah Soeryo Pamoekti	3.781
2	Gatot Subianto, ST.	1.368
3	Wahyu Ika Setyaningsih, S.Sos.	128
4	Yuliana Safitri	69
5	Taufan Nudin	138
6	Hj. Anggit Krekating Galih	565
Total Perolehan Suara Partai		7.017

5	PARTAI NASDEM	Jumlah
KEDUNGKANDANG		929
1	Siti Romlah	400
2	dr. Adi Hartono	171
3	Widianto, A.Md.	126
4	Isnin Cahyo Pratiwi	1.345
5	Roy Pangarso	472
6	Syaifullah, S.Sos.	553
7	Drs. Bambang Suharto	230
8	Imam Wahyu Dinanti, S.Sos.	33
9	Herlina Budi Prihatiningsih, SE.	86
10	Drs. Bambang GW.	131
Total Perolehan Suara Partai		4.476

5	PARTAI NASDEM	Jumlah
LOWOKWARU		1.119
1	Sabarudin Baso, SH.	1.698
2	Nurul Hasanah, SP.	147
3	Drs. Herry Mulyono	366
4	Ulul Azmi, SH.	279
5	Sri Bawon Wati, A.Ma.	63
6	Rio Zhanuar, SE.	447
7	Drs. Sutarman, M.Ap.	158
8	Dewi Retnosari	72
Total Perolehan Suara Partai		4.349

5	PARTAI NASDEM	Jumlah
BLIMBING		1.170
1	Sunarto Abbas	632
2	The Haryono	901
3	Eni Windariati	147
4	Rochman	110
5	Mega Wahyu Rifianti Wulandari, SE.	802
6	Moch. Syamsul	150
7	Djoko Sunarto, SE.	97
8	Diena Widayastuti, S.TP., M.Si.	249
9	R. Arief Andrijanto, SE.	114
Total Perolehan Suara Partai		4.372

5	PARTAI NASDEM	Jumlah
SUKUN		1.315
1	Istilah Mustofa, SH.	746
2	Drs. Suyadi, MM.	2.879
3	Andjar Sasono	165
4	Hendrikus Ndoki, SH.	368
5	Agus Wahyudi	833
6	Ellysabet, S.Th.	258
7	Drs. Agus Endra Suharno	1.073
8	Endang Purwaningsih, SH.	108
9	Eko Bagianto	36
10	Abd. Aziz, M.Pd.	324
Total Perolehan Suara Partai		8.105

**Total Perolehan
Suara Partai NASDEM**

28.319

7	PARTAI BERKARYA	Jumlah
KLOJEN		191
1	Dra. Tinuk Dyah Susanti	166
2	Udi Setiono, S.Sos.	145
3	Sunaryo, SE.	44
4	Hj. Mudah Tri Jumawati	122
5	Sadhana Devi	34
Total Perolehan Suara Partai		702

7	PARTAI BERKARYA	Jumlah
KEDUNGKANDANG		435
1	Agus Subiyakto	432
2	Drs. H. Zainal Fatah	486
3	Erlanda Natasha Subroto, S.Pd.	51
4	Ir. Ferry Moedjiono	43
5	Makbul Suseno	72
6	Sri Rejeki	143
Total Perolehan Suara Partai		1.662

7	PARTAI BERKARYA	Jumlah
LOWOKWARU		500
1	Eddy Santoso, SE.	154
2	Arga Wicaksono Daryadi, SE.	277
3	Tri Nur Santy	80
4	Mochamad Suyadi, S.Sos.	118
5	Sudijono	187
6	iin lidiawati	39
7	Drs. Surya Budhi Rahardjo	62
8	Rizma Dwi Nurlina, S.ST.	48
Total Perolehan Suara Partai		1.465

7	PARTAI BERKARYA	Jumlah
BLIMBING		414
1	Budy Edy Tedjo Utomo, SH., M.Si.	430
2	R.A. Hartati	96
3	Heri Mriyanto	103
4	Rita Rokhana, SE.	102
5	Jaya Yuniarti, SH.	58
6	Ika Hartini Rawis	38
7	Victor Pangemanan, SH.	41
Total Perolehan Suara Partai		1.282

7	PARTAI BERKARYA	Jumlah
SUKUN		447
1	Sukatno	466
2	Udjik Suhernanik	129
3	Dwi Wijayanto	45
4	Ida Romlah	83
5	Ir. F. Firmansyah Tayibnapis	61
6	Rini Astuti	34
7	Chamim Tohari	320
8	Citra Meifany Nectariana	26
Total Perolehan Suara Partai		1.611

**Total Perolehan
Suara Partai BERKARYA**

6.722

8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Jumlah
KLOJEN		1.375
1	H. Bayu Rekso Aji	2.821
2	Nanang Windarto	179
3	Dewi Ratna Mutu Manikam, SE.	345
4	Cholid	858
5	Novita Dewi, S.Kep.Ns.	302
6	Muhammad Nabil, S.IP.	1.166
Total Perolehan Suara Partai		7.046

8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Jumlah
KEDUNGKANDANG		2.028
1	H. Akhdiyati Syabrill Ulum, S.Kom., MM.	1.914
2	Hizbiyatul Islamiyah, S.Ars.	854
3	H. Sunarto	336
4	Rika Hastaningrum	434
5	Hildan Ma'arief., S.Pd.	280
6	Kiki Krisdian Wahyu Sulistiawan	93
7	M. Sigit Hendi Prabowo	117
8	Margiyani, S.Sos.	197
9	Dwi Hariyadi, S.Pd.	549
Total Perolehan Suara Partai		6.802

8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Jumlah
LOWOKWARU		2.748
1	Chaidar Danial Zakki, SE.	1.931
2	dr. Martina Slyviarni Suryawidarti	1.246
3	H. Riyadi	2.082
4	H. Heru Pamungkas, SH., M.AP.	1.199
5	Shofura Hanifah	227
6	Ahmad Fuad Rahman, SE.	2.353
7	Trio Agus Purwono, STP.	2.847
8	Hasnak Laili, S.S.	289
Total Perolehan Suara Partai		14.922
Total Perolehan Suara Partai PKS		50.037

8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Jumlah
BLIMBING		2.487
1	Herman Ali Sadikin, ST.	2.492
2	Sri Juniati madjid, SE., M.Pd.	792
3	H. Asmualik	2.969
4	Kamid, STP.	490
5	Wafa' Amatul Azizah	415
6	Aris Rendra Kurniawan, SE.	385
7	Reza Adi Pratama, SP.	209
8	Asnik Yanatun, S.Pd.	199
9	Miftakul Huda	233
Total Perolehan Suara Partai		10.662

8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	Jumlah
SUKUN		2.085
1	Ernanto Djoko Purnomo	1.271
2	H. Rokmad, S.Sos.	1.962
3	Nurul Arba'ati, S.Pt., M.AP.	744
4	Timen Amir	1.351
5	Lilik Hidayat	554
6	H. Agus Cahyono, SE.	287
7	Hartatik Purwaningtyas	102
8	Ir. H. Achmad Zainuddin	1.815
9	Deni Wahyono	169
10	Sulistyo, SH.	265
Total Perolehan Suara Partai		10.605

**Total Perolehan
Suara Partai PKS**

50.037

9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	Jumlah
KLOJEN		517
1	Hariadi Soetrisno, ST.	312
2	Sapto Liyantoro, SE.	416
3	Lusiasih Kalam	81
4	Mohammad Sahrowi	203
5	Rusmiati BA.	96
6	Petrus Paulus Wahimun, SS., SH., MH.	734
Total Perolehan Suara Partai		2.359

9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	Jumlah
KEDUNGKANDANG		1.174
1	Laily Fitriyah Liza Min Nelly	1.793
2	Reza Bayu Setyawan, S.Kep.	135
3	Ilham Juliansyah Kabul Pamuji, SE., MM.	198
4	Andri Krestian Sugeng, SE.	107
5	Sugeng Wahyudi, ST.	91
6	Dewi Iriana Salmayati	123
7	Ahmad Sana'i	102
8	Hellas Marwanto Prahara, A.Md., SP.	38
9	H. Drs. Masduqi	214
Total Perolehan Suara Partai		3.975

9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	Jumlah
LOWOKWARU		926
1	Hidayat Udigunarsa	267
2	Moch. Azhar Bhakti, SH.	203
3	Dian Aromita	106
4	RM. Prayoga Bambang P., SH.	156
5	Istyarini	95
6	Heni Siswanto	85
7	Sri Utami	114
8	R. Aryono Widodo, S.Sos.	65
9	Arif Moertono	47
Total Perolehan Suara Partai		2.064

9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	Jumlah
BLIMBING		1.259
1	H. Dian Indra Tjahja, SE.	662
2	Chandra Adi Irawan	178
3	Nur Anifa, SE.	161
4	DR. H. Rumadi, SH., M.Hum.	294
5	Fransiscus Setyadji, SH.	1.293
6	Retno Wulan, SE., MM.	136
7	I Wayan Utama, SH.	99
8	Evi Handajani, SE.	104
9	Sandi Prasetyo	156
10	Roni Agustinus Tri Prasetyo	49
Total Perolehan Suara Partai		4.391

9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	Jumlah
SUKUN		1.328
1	Alkasa Sulima Priyantono, SE.	909
2	Niken Wugari, SE.	365
3	Agus Wahyudi	174
4	Bambang Suyarso, Drs., M.Pd.	739
5	Sukartini	194
6	bambang Soewidi Poelianto, S.Pd., S.Psi.	507
7	Retno Runtiani	75
8	Randy Ferdinand Banteng, SE.	111
9	Mohamad Sugianto	258
10	Waluyo Santoso, BA., SIP., M.Si.	172
Total Perolehan Suara Partai		4.832

**Total Perolehan
Suara Partai PERINDO**

17.621

10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Jumlah
Klojen		156
1	Suradi	65
2	Ina Faradila Anthasari, S.Pd.	53
3	Achmad Wahyudi	64
4	Chulfiya Ningsih	86
Total Perolehan Suara Partai		424

10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Jumlah
KEDUNGKANDANG		765
1	H. Abd. Rozaq SM.	2.043
2	Wagiman, S.Pd.I.	1.177
3	Rininda Ayu Puspita	74
4	Solikhul hadi Sarwan	58
5	Nuning Yurniawati, S.Psi.	66
6	Khairul Anwar	99
7	Sumantri	24
8	Fitri Yudawastuning	76
Total Perolehan Suara Partai		4.382

10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Jumlah
LOWOKWARU		373
1	Asia Iriani, SE.	109
2	Sri Yulistiyani	71
3	Siendhy Larasati	41
4	Ninik Yuliani	174
5	Rendhy Kautsar Fitrah	44
6	Endro Efendi, SE.	37
Total Perolehan Suara Partai		849

10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Jumlah
BLIMBING		816
1	Syamsul Ma'arif	1.468
2	Nora Susantis, S.Sos	890
3	Muhammad Sholeh	155
4	Tantono Setiyawan	58
5	Nanang Sarjono	42
6	Khoiriyah Lailah, S.Sy.	87
7	Puji Yani Arwanto	59
8	Puji uril Arusta	54
9	Noer Meutia Hidayati, S.Si.	55
10	Achmad Subandiri	184
Total Perolehan Suara Partai		3.868

10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Jumlah
SUKUN		589
1	Drs. H. S. Djathi Koesoemo	141
2	Isrotul Wahidiyah	102
3	Joko Supriono	1.092
4	Gufron Hariyanto, ST.	63
5	Ida Iriani	86
Total Perolehan Suara Partai		2.073

**Total Perolehan
Suara Partai PPP**

11.596

11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	Jumlah
KLOJEN		1.966
1	Jimmi Mohamad Suryansyah, ST.	595
2	Tri Murti Handayani	596
3	Azhar Dika Winarto, ST., MT.	256
Total Perolehan Suara Partai		3.413

11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	Jumlah
BLIMBING		2.218
1	Bangun Eko Priyo Nugroho, S.Kom.	784
2	Farida Wulandari, SH.	770
3	Vicky Whirba Erischana	407
Total Perolehan Suara Partai		4.179

11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	Jumlah
KEDUNGKANDANG		1.220
1	Hendri Bambang Irwanto, ST.	713
2	Samuil Yuliadi, S.Mn.	155
3	Susiati	267
Total Perolehan Suara Partai		2.355

11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	Jumlah
SUKUN		2.160
1	Reni Purwati, S.Pd.	682
2	M. Sutomo Oktoputra, S.Sos., MM.	287
3	Yanki Dermawan	245
4	Kristina Yanuarti, SS.	1.013
5	Sumardiroto	117
6	Dwi Asnawi Nurhananto, MP.	58
Total Perolehan Suara Partai		4.562

11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	Jumlah
LOWOKWARU		2.014
1	Achmad Faried, ST.	827
2	Dina Aulia	684
3	DR. Jose Rizal Joesoef	1.413
Total Perolehan Suara Partai		4.938

**Total Perolehan
Suara Partai PSI**

19.447

12	PARTAI AMANAT NASIONAL	Jumlah
KLOJEN		498
1	Ferry Adha Adianto	1.256
2	Zakiyah Mahdi	195
3	Uzlifah, SS.	728
4	Wahyuriadi	189
5	M. Machrus	59
6	Ammar Mustofa Basyaeb	105
Total Perolehan Suara Partai		3.030

12	PARTAI AMANAT NASIONAL	Jumlah
KEDUNGKANDANG		852
1	H. Lookh Makhfudz, SS.	2.888
2	Moden Kaiden, SH.	163
3	Wiwiek Sulistyowati	589
4	Anwar Mansyur, S.Ag.	970
5	Yuning Kartika Sari	354
6	Wawan Yusbiantono	530
7	Dra. Dijah Pantjaningroem	39
8	M. Hilal Nurdiansyah, ST.	77
9	David Rosiano, ST.	86
Total Perolehan Suara Partai		6.548

12	PARTAI AMANAT NASIONAL	Jumlah
LOWOKWARU		1.135
1	H. Pudjianto, SE., M.Hum	2.232
2	Dito Arief Nurakhmadi, S.AP.	2.225
3	Dessy Ariani, SE.	165
4	Rofiq Awali	1.331
5	H. Amir Mukminin	333
6	Sulaihah, S.Pd.	43
7	Apik Syamsul Rijal, S.Sos.	111
8	Susi Nurul Hudaningrum	28
9	Fahmi Andryansyah Katili	917
Total Perolehan Suara Partai		8.520

12	PARTAI AMANAT NASIONAL	Jumlah
BLIMBING		1.191
1	H. Eko Hadi Purnomo, SH.	2.542
2	Ali Said	1.840
3	Mei Nafisha	81
4	Camalia, SH.	76
5	M. Nasrul Hamzah, S.Sy., SH., MH.	347
6	Ir. Supri Hadi Wardoyo	0
7	Eriek Herawati, A.Md.	33
8	Umar Faruk, S.Pd.	956
9	Satriya Nugraha, S.P.	55
10	Agus Alam Jaya, SE., MM.	46
Total Perolehan Suara Partai		7.167

12	PARTAI AMANAT NASIONAL	Jumlah
SUKUN		820
1	Harun Prasojo, SH.	0
2	Siska Arichlawati, A.Md. RMIK.	145
3	Ir. RR. Dyah Ratna Nurul	249
4	Yuli Eka Rini	922
5	RR. Candra Kusumawati, S.Sos., M.Si.	136
6	Hasan	61
7	Dwi Heryanto, S.Sos.	123
8	Saifuddin	58
Total Perolehan Suara Partai		2.514

**Total Perolehan
Suara Partai PPP**

27.779

13	PARTAI HATI NURANI KARYAT	Jumlah
KLOJEN		72
1	Afdhal Fauza, SE.	28
2	Robertus Dharma Surya	798
3	Meity Alvita Sari, A.Md.	89
4	Ir. Mumpuni Andayani	23
5	Fernaldy Askar Pratama R.	47
Total Perolehan Suara Partai		1.057

13	PARTAI HATI NURANI KARYAT	Jumlah
KEDUNGKANDANG		98
1	Iwan Setiawan	147
2	Theresia Dharma Kartika	152
3	Dholin Efendi, SH.	108
4	Febi Tri Ardiansyah	17
5	Mulik Djauharotul Arofah, SH.	72
6	Noeroel Fa'izah	28
7	Chairul Farida	29
Total Perolehan Suara Partai		651

13	PARTAI HATI NURANI KARYAT	Jumlah
LOWOKWARU		101
1	Drs. Imam Ghozali	64
2	Anita Nofarina, A.Md.	144
3	H. Arif Sucahyo Dwi S.P., MM.	127
4	Rita Sukma Kumala, SE.	66
5	Fransisca Sembodro	48
6	Maryanto, S.Sos.	13
7	Ati Kusminanto	45
Total Perolehan Suara Partai		608

13	PARTAI HATI NURANI KARYAT	Jumlah
BLIMBING		103
1	Siti Kosiyah	204
2	Dedet Himawan Bayu Widagdo	41
3	Ronny Purnomo Sidi	37
4	Erik Panandian Hudus M. T.	106
5	Nanda Permata Lisnawati, S.KM.	15
6	Lili Ulifah	22
7	Sulia Ulfa	16
8	Ardhianto Irawan	21
Total Perolehan Suara Partai		565

13	PARTAI HATI NURANI KARYAT	Jumlah
SUKUN		292
1	Sugeng	348
2	Nirma Chris Nindya, SH.	1.719
3	Nanil Widya N., SE.	148
4	Nicolia Mundzir, ST., MM.	814
5	Mario David H. L. Tobing, ST.	64
6	Hariyanto	38
7	Heri Budiyanto	66
8	Fery Kris Wahyudi, SH.	95
Total Perolehan Suara Partai		3.584

**Total Perolehan
Suara Partai HANURA**

6.465

14	PARTAI DEMOKRAT	Jumlah
KLOJEN		791
1	Hj. Sulastri, A.Md., Keb.	1.611
2	Andhi Widiono	131
3	Tulus Widodo, A.Md.	113
4	RR. Ruli harweni Sinta Dewi, A.Md.	122
5	NH Djoko Sriyoso	140
6	Abdul Hakim, ST.	580
Total Perolehan Suara Partai		3.488

14	PARTAI DEMOKRAT	Jumlah
KEDUNGKANDANG		1.714
1	Nawang Nugraning Widhi, SH.	1.917
2	Suharno, S.TP.	212
3	Dra. Mudma'innah, MH.	285
4	Muhammad Ali Akbar	332
5	Adi Priatama	798
6	Wahyu Ida H.	1.053
7	Sugeng Hariadi, S.Pd.	131
8	Suadi	2.545
9	Umatul Choiriah	138
10	H. Imron	2.767
Total Perolehan Suara Partai		11.892

14	PARTAI DEMOKRAT	Jumlah
LOWOKWARU		1.511
1	Ir. H. Arif Darmawan	1.427
2	Ir. Indra Tjahyono, MM.	297
3	Ninik Suryantani	354
4	H.M. Sukris	343
5	Ade Rahmawani, SE.	115
6	Bambang Warsito	148
7	Almira Dea Devita, S.Pd.	227
Total Perolehan Suara Partai		4.422

14	PARTAI DEMOKRAT	Jumlah
BLIMBING		1.931
1	Adi Sancoko	672
2	Dra. Fransiska Rahayu Budiwiarti	971
3	Wisnu Murti Wibowo, SH.	311
4	Agung Widhi Nugroho	178
5	Dra. Anik Anggraini	653
6	Drs. Teguh Hariyono	319
7	Drs. H. Suwanto, MM.	677
8	Indah Nurdiana, S.T.P	2.160
Total Perolehan Suara Partai		7.872

14	PARTAI DEMOKRAT	Jumlah
SUKUN		1.853
1	Arfandy, SE.	1.047
2	Achmad Anang Fatoni	590
3	Nanik Qurrata Akyunin, SST., M.Sos.	2.086
4	Ahmad Hermono Pratikto, SE.	225
5	Budi Seroyo	938
6	Wiwik Sulaiha	3.018
7	Drs. Sugeng Nugroho	81
8	Hela Narulita, SE.	133
9	H. Muh. Hisbullah Huda, SH.	1.427
Total Perolehan Suara Partai		11.398

**Total Perolehan
Suara Partai DEMOKRAT**

39.072

19	PARTAI BULAN BINTANG	Jumlah
Klojen		70
1	Drs. Syamsul Huda Binrubai, SH., M.Hum.	85
2	Khittoh Dararatu, SH.	12
3	Syaishar Qoris Fadhlullah 'Aisy	13
4	Nafisah Al Muhtadiyah	15
5	Juna Erdana Mutawatir, S.Sos.	8
Total Perolehan Suara Partai		203

19	PARTAI BULAN BINTANG	Jumlah
Blimbing		146
1	Bezar Gunadi	82
2	Dra. Hj. Ernawati hasan	36
3	Anis Suyanti, S.Pd.	69
4	Ipong Tegar Pribadi, S.Pd.	10
5	Haris Budi Kuncocahyo, S.Ag., M.Si.	31
Total Perolehan Suara Partai		374

19	PARTAI BULAN BINTANG	Jumlah
KEDUNGKANDANG		113
1	Afifah Raudloh Anni'mah	64
2	Suharianto, SS., M.Si.	47
3	Lilla Ika Fitri, A.Md.	33
Total Perolehan Suara Partai		257

19	PARTAI BULAN BINTANG	Jumlah
SUKUN		112
1	Junita Sofie Wijayati, S.M.	39
2	Khasanudin, S.Pi.	33
3	Titik Sulistyowati	15
4	Faris Wardana	27
Total Perolehan Suara Partai		226

19	PARTAI BULAN BINTANG	Jumlah
LOWOKWARU		238
1	Muhamad Kamdani, STP.	810
2	Miftakhul Muniroh, SE.	162
3	Drs. Sudijar	179
4	Siti Fatonah, A.Md.	121
Total Perolehan Suara Partai		1.501

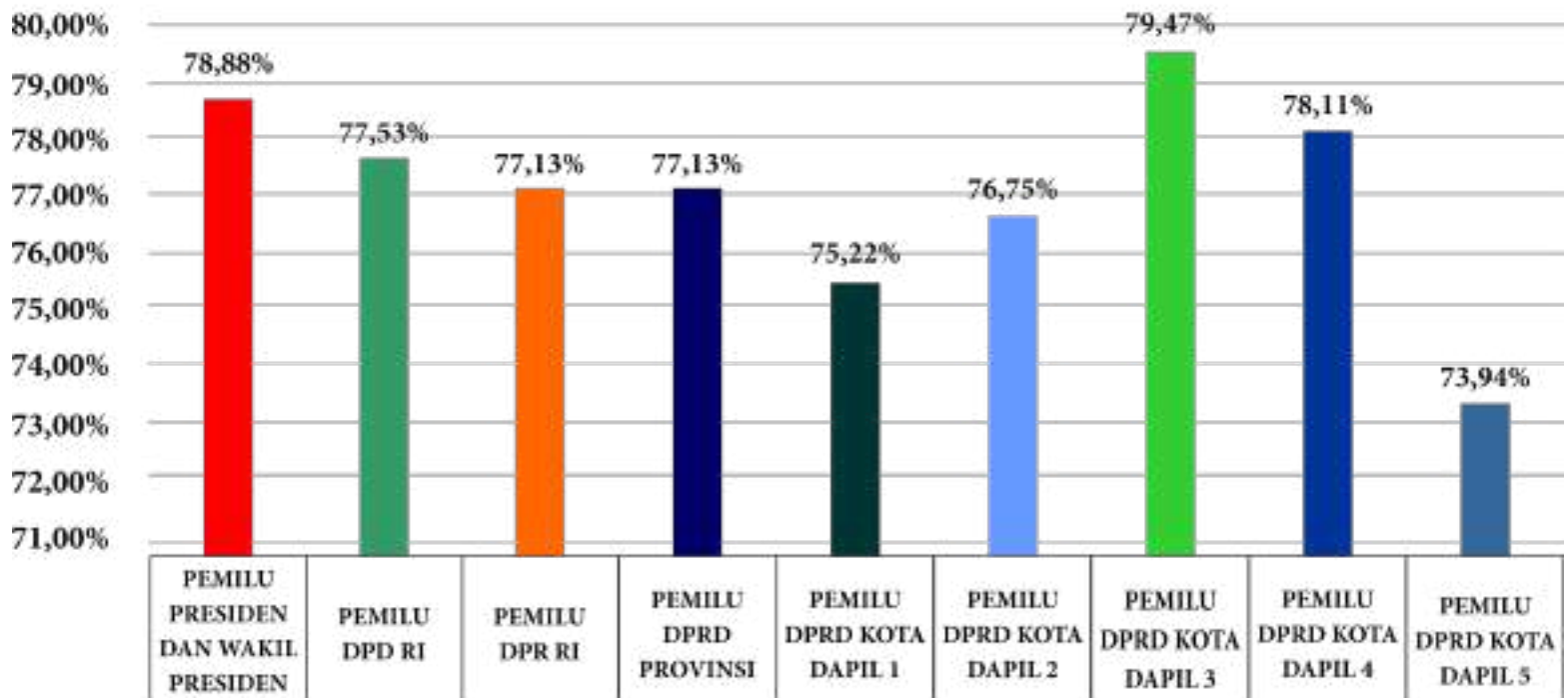
**Total Perolehan
Suara Partai PBB**

2.570

DATA PENGGUNA HAK PILIH DI KOTA MALANG PEMILU 2019

JENIS KELAMIN	PWWP	DPR	DPD	DPR Provinsi	DPRD Kota
Laki-laki	249.284	244.323	245.310	244.323	243.460
Perempuan	274.692	267.987	269.686	267.987	267.515
JUMLAH	523.976	512.310	514.996	512.310	510.975

PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILU SERENTAK 2019 KOTA MALANG







Penyerahan Dokumen Salinan Hasil Rekapitulasi Kepada Bawaslu, Saksi Peserta Pemilu (Partai Politik, Saksi DPD dan Saksi PPWP)



Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU) dan FORPIMDA



KPU dan Peserta Pemilu (Parpol)

**Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi DPRD Kab/Kota
Serta Keterwakilan Perempuan di Tiap Dapil Kota Malang Pemilu 2019**

No.	Partai Politik	DAPIL 1			DAPIL 2			DAPIL 3			DAPIL 4			DAPIL 5			Jumlah Akhir	
		Perolehan Suara	Perolehan Kursi		Perolehan Suara	Perolehan Kursi		Perolehan Suara	Perolehan Kursi		Perolehan Suara	Perolehan Kursi		Perolehan Suara	Perolehan Kursi		Suara	Kursi
			L	P		L	P		L	P		L	P		L	P		
1	PKB	7.908	1	-	14.341	1	1	21.169	1	1	12.684	1	-	9.507	1	-	65.609	7
2	GERINDRA	5.351	1	-	10.522	1	-	13.400	-	1	9.827	1	-	6.298	-	1	45.398	5
3	PDI-P	10.912	1	-	22.945	2	1	22.553	1	2	30.017	2	1	22.574	1	1	109.001	12
4	GOLKAR	3.770	1	-	8.911	1	-	7.968	1	-	6.423	1	-	7.633	-	1	34.705	5
5	NASDEM	7.017	1	-	4.372	-	-	4.476	-	-	8.105	1	-	4.349	-	-	28.319	2
6	GARUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	BERKARYA	702	-	-	1.282	-	-	1.662	-	-	1.611	-	-	1.465	-	-	6.722	0
8	PKS	7.046	1	-	10.662	1	-	6.802	1	-	10.605	1	-	14.922	2	-	50.037	6
9	PERINDO	2.359	-	-	4.391	-	-	3.975	-	-	4.832	1	-	2.064	-	-	17.621	1
10	PPP	424	-	-	3.868	-	-	4.382	-	-	2.073	-	-	849	-	-	11.596	0
11	PSI	3.413	-	-	4.179	-	-	2.355	-	-	4.562	-	-	4.938	1	-	19.447	1
12	PAN	3.030	-	-	7.167	1	-	6.548	1	-	2.514	-	-	8.520	1	-	27.779	3
13	HANURA	1.507	-	-	565	-	-	651	-	-	3.584	-	-	608	-	-	6.465	0
14	DEMOKRAT	3.488	-	-	7.872	-	1	11.892	1	-	11.398	-	1	4.422	-	-	39.072	3
19	PBB	203	-	-	374	-	-	257	-	-	226	-	-	1.510	-	-	2.570	0
20	PKPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah		56.680	6	-	101.451	7	3	108.090	6	4	108.461	8	2	89.659	6	3	464.361	45
JUMLAH PRESENTASE KETERWAKILAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN %			100	-		70	30		60	40		80	20		67	33		100

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU



PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu (dalam hal ini Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dan perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Kegiatan penyelesaian kasus hukum pemilu secara umum dimaksudkan untuk memfasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Presiden dan Wakil Presiden Serentak 2019.

KPU Kota Malang melaksanakan kegiatan penyelesaian kasus hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dengan berbagai langkah, yaitu:

1. Tahapan Persiapan, dengan:
 - a. Rapat koordinasi internal antara Komisioner KPU Kota Malang dan jajaran Sekretariat KPU Kota Malang
 - b. Melakukan inventarisasi masalah bersama dengan KPU Provinsi Jawa Timur
 - c. Menghadiri pelaksanaan kegiatan konsolidasi nasional dengan KPU diseluruh Indonesia
 - d. Melakukan klarifikasi, supervisi, dan monitoring penyelesaian sengketa hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum terkait pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta Anggota DPR
 - e. Menghadiri pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/
 2. Tahapan Pelaksanaan, dengan Menghadiri Sidang di Mahkamah Konstitusi dalam rangka Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Tahun 2019.
 - f. Pemilu serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- Pemilu serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- f. Membentuk tim kelompok kerja dalam rangka penyelesaian sengketa hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

KPU Kota Malang memberikan dukungan selama proses penyelesaian PHPU dengan uraian tugas yang meliputi:

- a. Menerima informasi dari Tim PHPU Provinsi Jawa Timur mengenai pokok permohonan yang dipersoalkan berkaitan dengan proses Pemilu di wilayah Kota Malang
- b. Menyusun Kronologi, Daftar Alat Bukti (DAB), dan Alat Bukti dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Tim PHPU Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya disampaikan kepada Tim PHPU Provinsi Jawa Timur
- c. Berkoordinasi dengan Tim PHPU Provinsi Jawa Timur terkait dengan informasi dan perkembangan informasi selama proses PHPU
- d. Melakukan penyempurnaan dan perbaikan Alat Bukti untuk diserahkan kembali kepada Tim PHPU Provinsi Jawa Timur
- e. Menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim PHPU Provinsi Jawa Timur
- f. Tim PHPU Kota Malang menyerahkan Alat Bukti

kepada Tim Helpdesk KPU melalui Tim PHPU Provinsi sebagai berikut:

- i. Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 12 (dua belas) rangkap, yang terdiri dari 1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dileges dan 11 (sebelas) rangkap fotokopi dari leges; dan
- ii. Perkara PHPU DPR diserahkan sebanyak 4 (empat) rangkap, yang terdiri dari 1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dileges dan 3 (tiga) rangkap fotokopi dari leges.

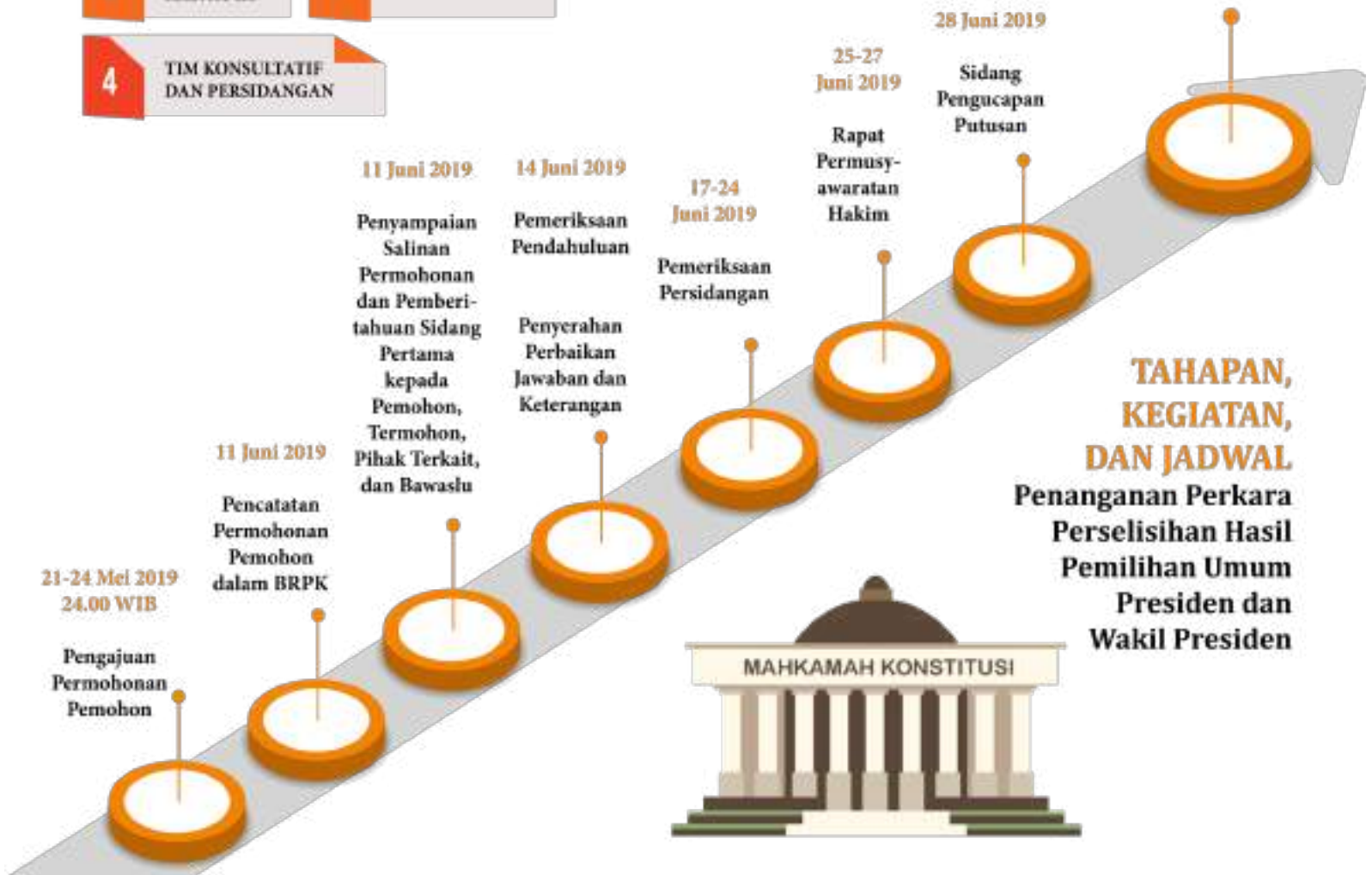
Mekanisme penyusunan dan penyampaian Kronologis dan Daftar Alat Bukti yang dilakukan oleh KPU Kota Malang adalah sebagai berikut :

1. Tim PHPU KPU Kota Malang menyusun dokumen Kronologi dan Draft DAB berdasarkan tempat terjadinya permasalahan (locus).
2. Kronologi yang disusun paling kurang memuat informasi jenis Pemilu, tempat, waktu dan obyek yang dipermasalahkan, serta subjek yang melakukan suatu tahapan yang dipermasalahkan/didalilkan dalam Permohonan.
3. Draft DAB merupakan suatu daftar yang memuat alat bukti apa saja yang dapat mendukung Kronologi, paling kurang memuat informasi kode alat bukti, judul alat bukti, dan keterangan fungsi alat bukti untuk membuktikan apa.
4. Selanjutnya, Tim PHPU KPU Kota Malang menyiapkan alat bukti sesuai dengan DAB yang telah disusun.
5. Tim PHPU KPU Kota Malang menyampaikan Kronologi dan Draft DAB dalam bentuk soft file (format Ms. Office Word) kepada Tim PHPU KPU Provinsi Jawa Timur melalui surat elektronik (email).
6. Tim PHPU KPU Provinsi Jawa Timur melakukan supervisi penyusunan Kronologi dan Draft DAB yang

dilakukan oleh Tim PHPU KPU Kota Malang.

7. Tim PHPU KPU Provinsi Jawa Timur segera menyampaikan Kronologi dan Draft DAB dari Tim PHPU KPU Kota Malang kepada Tim Helpdesk KPU melalui surat elektronik (email).
8. Tim Helpdesk menyampaikan Kronologi dan Draft DAB dari Tim PHPU Provinsi kepada Tim Pengacara melalui Tim LO KPU.
9. Tim Pengacara melakukan verifikasi Draft DAB yang disampaikan oleh Tim PHPU KPU Provinsi Jawa Timur.
10. Tim Pengacara menyampaikan Draft DAB yang telah diverifikasi kepada Tim PHPU Provinsi Jawa Timur melalui Tim LO dan Tim Helpdesk, untuk selanjutnya diteruskan kepada Tim PHPU KPU Kota Malang.
11. Tim PHPU KPU Kota Malang menyiapkan Alat Bukti yang berada di Kota Malang, sesuai dengan DAB yang telah diverifikasi oleh Tim Pengacara.
12. Tim PHPU KPU Kota Malang menyerahkan DAB dan alat bukti kepada Tim PHPU KPU Provinsi Jawa Timur dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Tim Helpdesk KPU untuk dilakukan verifikasi kelengkapan, pengkodean alat bukti, serta kesesuaian antara DAB dan alat bukti yang diserahkan.

Mekanisme SOP PHPU



Secara garis besar mekanisme Penyelesaian PPHU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan PPHU Pemilu Anggota DPR hampir sama, hanya saja terdapat perbedaan pada jadwal tahapan dan jumlah dokumen yang digandakan berbeda. Berikut ini adalah daftar perbedaan daftar alat bukti dan jadwal tahapan PPHU Presiden dan Wakil Presiden serta DPR.

Peraturan MK No. 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara PPHU di MK

Tahapan	Pilpres	Pileg
Pengajuan Permohonan Pemohon	23-25 MEI	8-25 MEI
Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan		8-26 MEI
Perbaikan Kelengkapan Permohonan		9-31 MEI
Pencatatan Permohonan dalam BRPK	11 JUNI	1 JULI
Penyampaian Salinan Permohonan dan Pemberitahuan Sidang	11 JUNI	1 JULI
Jawaban & Alat Bukti Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu	12 JUNI	5-12 JULI
Perbaikan Jawaban dan Keterangan	13 JUNI	11-26 JULI
Pemeriksaan Pendahuluan	14 JUNI	9-12 JULI
Pemeriksaan Persidangan: Pemeriksaan Saksi dan Alat Bukti	17-21 JUNI	15-30 JULI
RPH	24-27 JUNI	31 JULI-5 AGUSTUS
Putusan	28 JUNI	6-9 AGUSTUS

Lampiran Dokumen Pelaksanaan Tahapan Pemilu Sebagai Bahan Alat Bukti Pendukung Jawaban Termohon

TAHAP PEMILIHAN	PILPRES	PILEG
TAHAP REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KECAMATAN	DAA1 PLANO. PPWP	DAA1 PLANO DPR DAA1 PLANO DPD DAA1 PLANO DPR, PROP, DPRP, DPRPB, DPRA (REKAP TINGKAT KECAMATAN DAA1 PLANO DIGANTI MENJADI DA1 PLANO)
	DAA1.PPWP	DAA1.DPR DAA1.DPD DAA1.DPRD, PROP, DPRA, DPRP, DPORPB
	DA1 PLANO.PPWP DA1.PPWP	DAA1.DPRD KAB KOTA (REKAP TINGKAT DESA/KELURAHAN, UNTUK TINGKAT KECAMATAN DAA1 DIGANTI MENJADI DA1)
	DA-KPU (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019)	
	DA2.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019)	
	DA.TT-KPU (Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019)	
	DA.DH-KPU (Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019)	
	DA.BAST-KPU (Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari PPS Pemilihan Umum Tahun 2019)	
	DA.UND-KPU (Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019)	
D.C6-KPU (Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap TPS dalam Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2019)		

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif



PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Beberapa permasalahan timbul pada Tahapan Penyelesaian Permohonan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, di antaranya:

1. Setiap tahapan adalah berpotensi menjadi gugatan atau sengketa hukum
2. Baik peserta dan penyelenggara pemilu di tingkat Badan Ad Hoc banyak yang belum menyadari bahwa kegiatan atau tahapan yang dilalui beresiko memiliki akibat hukum
3. Hubungan KPU dengan stakeholder dibidang Hukum belum terjalin disetiap tahapan pemilihan umum
4. Jangka waktu manajemen penanganan perkara PHPU yang terlalu singkat
5. Belum terakomodirnya anggaran untuk memfasilitasi pelaksanaan advokasi atau bantuan hukum di setiap tahapan pemilihan umum

Terkait permasalahan yang timbul, KPU Kota Malang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dikarenakan setiap tahapan pemilu adalah peristiwa hukum dan menghasilkan produk hukum, seperti keputusan yang berpotensi menjadi objek sengketa Hukum, maka sebaiknya Divisi Hukum selalu mengintensifkan kegiatan konsultasi dan advokasi di setiap tahapannya dengan pihak konsultan hukum yang mengerti tahapan kepemiluan
2. Menyelenggarakan kajian hukum secara intensif dan berkesinambungan terkait tahapan di kepemiluan, baik bagi peserta dan penyelenggara pemilu, untuk kemudian disosialisasikan dalam bentuk kalimat atau pesan singkat untuk mempermudah sosialisasi
3. Membangun hubungan komunikasi yang baik dari akademisi dan praktisi, untuk dapat dijadikan narasumber penerjemah dalam setiap kegiatan. Sehingga, dapat sewaktu – waktu dihubungi apabila terjadi permasalahan Hukum Kepemiluan
4. Penambahan jangka waktu mempersiapkan kronologi dan alat bukti apabila menjadi daerah yang terpapar PHPU dengan menyesuaikan substansi dan kuantitas Daftar Alat Bukti yang diminta pada saat persidangan



Rapat koordinasi persiapan PHPU



Menghadiri Sidang PHBU di MK



Konsultasi dan Pengarahan dari Tim Kuasa Hukum KPU



Hakim membacakan putusan



PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH

Di Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/ Kota Menetapkan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (1) sampai dengan (5) menyatakan:

1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap Partai Politik pada masing-masing Dapil dalam rapat pleno terbuka dengan ketentuan:
 - a. Menetapkan jumlah suara sah setiap Partai Politik di setiap Dapil sebagai suara sah setiap Partai Politik
 - b. Membagi suara sah setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bilangan pembagi 1 (satu), dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh) dan seterusnya
 - c. Hasil pembagian sebagaimana dimaksud dalam huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak
 - d. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi pada Dapil yang bersangkutan habis terbagi
2. Dalam hal hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menghasilkan angka pecahan, angka pecahan tersebut tetap diperhitungkan sebagai 2 (dua) angka desimal
3. Dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada Partai Politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang
4. Dalam hal berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir diberikan kepada Partai Politik yang lebih banyak suaranya pada lebih banyak TPS
5. Dalam hal terdapat Partai Politik yang memperoleh suara tetapi tidak memiliki calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dalam DCT Partai Politik di suatu Dapil, tidak diikutkan dalam penghitungan alokasi kursi pada Dapil yang bersangkutan

KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan penghitungan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model E-KPU Kab/Kota.

KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU/ KIP Kabupaten/Kota, berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



Proses Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Pemilihan Umum 2019 di Kota Malang:

1. KPU Kota Malang melakukan rapat pleno Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik untuk anggota DPRD Kota Malang
2. Menuangkan hasil penghitungan perolehan kursi partai politik untuk anggota DPRD Kota Malang kedalam Berita Acara Model E-KPU Kab/Kota
3. Menetapkan perolehan kursi partai politik untuk anggota DPRD Kota Malang dengan Keputusan KPU
4. Rapat pleno terbuka KPU Kota Malang untuk menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kota Malang
5. Menuangkan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Malang di setiap daerah pemilihan ke dalam formulir Model E1.2-DPRD Kab/Kota
6. Menuangkan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Malang sesuai dengan formulir Model E1.2 DPRD Kab/Kota ke dalam Berita Acara formulir Model E-KPU Kab/Kota
7. Menetapkan calon terpilih Anggota DPRD Kota Malang dengan Keputusan KPU Kota Malang
8. Menyampaikan salinan Berita Acara dan salinan Surat Keputusan Penetapan Calon Terpilih pada Partai Politik, dan Bawaslu Kota Malang.
9. KPU Kota Malang mengumumkan calon terpilih anggota DPRD Kota Malang melalui media cetak
10. KPU Kota Malang menyampaikan salinan Berita Acara dan salinan Surat Keputusan Penetapan Calon Terpilih kepada KPU dalam bentuk softcopy melalui aplikasi SITUNG dan hardcopy melalui KPU Propinsi.
11. KPU Kota Malang memberikan surat pemberitahuan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Malang kepada pengurus partai politik dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.
12. KPU Kota Malang mengusulkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Malang untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur Jawa Timur melalui Walikota Malang

**DATA PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD KOTA MALANG 2019**

No	Partai Politik	Perolehan Suara				
		Dapil 1 (Klojen)	Dapil 2 (Blimbing)	Dapil 3 (Kedungkandang)	Dapil 4 (Sukun)	Dapil 5 (Lowokwaru)
1	PKB	7.908	14.341	21.169	12.684	9.507
2	GERINDRA	5.351	10.522	13.400	9.827	6.298
3	PDI-P	10.912	22.945	22.553	30.017	22.574
4	GOLKAR	3.770	8.911	7.968	6.423	7.633
5	NASDEM	7.017	4.372	4.476	8.105	4.349
6	GARUDA	-	-	-	-	-
7	BERKARYA	702	1.282	1.662	1.611	1.465
8	PKS	7.046	10.662	6.802	10.605	14.922
9	PERINDO	2.359	4.391	3.975	4.832	2.064
10	PPP	424	3.868	4.382	2.073	849
11	PSI	3.413	4.179	2.355	4.562	4.938
12	PAN	3.030	7.167	6.548	2.514	8.520
13	HANURA	1.507	565	651	3.584	608
14	DEMOKRAT	3.488	7.872	11.892	11.398	4.422
19	PBB	203	374	257	226	1.510
20	PKPI	-	-	-	-	-
Jumlah		56.680	101.451	108.090	108.461	89.659

DATA PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TIAP DAPIL

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI					JUMLAH
		DAPIL 1 (KLOJEN)	DAPIL 2 (BLIMBING)	DAPIL 3 (KEDUNGKANDANG)	DAPIL 4 (SUKUN)	DAPIL 5 (LOWOKWARU)	
1	PKB	1	2	2	1	1	7
2	GERINDRA	1	1	1	1	1	5
3	PDI-P	1	3	3	3	2	12
4	GOLKAR	1	1	1	1	1	5
5	NASDEM	1	-	-	1	-	2
6	GARUDA	-	-	-	-	-	0
7	BERKARYA	-	-	-	-	-	0
8	PKS	1	1	1	1	2	6
9	PERINDO	-	-	-	1	-	1
10	PPP	-	-	-	-	-	0
11	PSI	-	-	-	-	1	1
12	PAN	-	1	1	-	1	3
13	HANURA	-	-	-	-	-	0
14	DEMOKRAT	-	1	1	1	-	3
15	PBB	-	-	-	-	-	0
16	PKPI	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		6	10	10	10	9	45



DATA PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TIAP DAPIL

DAPIL 1 (KLOJEN)

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PKB	Arief Wahyudi, SH.	1.787	1
2	GERINDRA	Rimzah	2.327	1
3	PDI Perjuangan	Iwan Mahendra, S.Sos., M.AP.	2.965	1
4	GOLKAR	Moh Arif Budiarmo, ST	1.158	1
5	NASDEM	Gagah Soeryo Pamoekti	3.781	1
6	PKS	H. Bayu Rekso Aji	2.821	1

DAPIL 2 (BLIMBING)

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PKB	Abdurrochman, SH.	3.154	1
2	PKB	Hartatik, SE.	1.607	2
3	GERINDRA	Kol (Purn.) Drs. Djoko Hirtono SSTF, M.Si.	1.860	1
4	PDI Perjuangan	Harvad Kurniawan R., SH.	3.251	1
5	PDI Perjuangan	Eko Herdiyanto	2.496	2
6	PDI Perjuangan	Wiwiek Sukesie, D.Rr., Dra., M.Si.	1.689	3
7	GOLKAR	Eddy Widjanarko, S.AP.	1.259	1
8	PKS	H. Asmualik	2.969	1
9	PAN	H. Eko Hadi Purnomo, SH.	2.542	1
10	DEMOKRAT	Indah Nurdiana, S.T.P	2.160	1

DAPIL 3 (KEDUNGKANDANG)

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PKB	Ike Kisnawati	3.701	1
2	PKB	Abd. Wahid	3.663	2
3	GERINDRA	Nurul Faridawati	3.719	1
4	PDI Perjuangan	Amithya Ratnangani Sirraduhita, S.S.	3.808	1
5	PDI Perjuangan	Drs. Agoes Marhaenta, MH.	2.905	2
6	PDI Perjuangan	Luluk Zuhriyah	2.166	3
7	GOLKAR	Suryadi, S.Pd.	1.620	1
8	PKS	H. Akhdiyati Syabil Ulum, S.Kom., MM.	1.914	1
9	PAN	H. Lookh Makhfudz, S.S.	2.888	1
10	DEMOKRAT	H. Imron	2.767	1

DAPIL 4 (SUKUN)

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PKB	Drs. H. Fathol Arifin, M.H.	3.638	1
2	GERINDRA	Randy Gaung Kumaraning Al Islam	2.704	1
3	PDI Perjuangan	H. Wanedi	6.030	1
4	PDI Perjuangan	Lea Mahdarina, ST.	3.958	2
5	PDI Perjuangan	Ferry Kurniawan	2.696	3
6	GOLKAR	Drs. H. Rahman Nurmala, MM.	1.010	1
7	NASDEM	Drs. Suyadi, MM.	2.879	1
8	PERINDO	Alkasa Sulima Priyantono, SE.	909	1
9	PKS	H. Rokhmad S.Sos.	1.962	1
10	DEMOKRAT	Wiwik Sulaiha	3.018	1

DAPIL 5 (LOWOKWARU)

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	PKB	Ahmad Farih Sulaiman, S.Pd.	2.141	1
2	GERINDRA	Lelly Therisiyawati	614	1
3	PDI Perjuangan	I Made Rian Diana Kartika, SE.	5.849	1
4	PDI Perjuangan	Nurul Setyowati, SE.	3.793	2
5	GOLKAR	Hj. Retno Sumarah, SE., MM.	2.467	1
6	PKS	Trio Agus Purwono, STP.	2.847	1
7	PKS	Ahmad Fuad Rahman, SE.	2.353	2
8	PSI	Dr. Jose Rizal Jofoef	1.413	1
9	PAN	H. Pujianto, SE., M.Hum.	2.232	1

**DAFTAR CALON TERPILIH PEREMPUAN
ANGGOTA DPRD KOTA MALANG PEMILU 2019**

No	Partai Politik	Dapil	No. Urut Calon	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	PKB	2	3	Hartatik, SE.	1.607	2
2	PDI-P	2	9	Wiwiek Sukesie, D.Rr., Dra., M.Si.	1.689	3
3	DEMOKRAT	2	8	Indah Nurdiana, S.T.P.	2.160	1
4	PKB	3	9	Ike Kisnawati	3.701	1
5	GERINDRA	3	4	Nuru; Faridawati	3.719	1
6	PDI-P	3	8	Amithya Ratnanggani SIRRADUHITA, S.S.	3.808	1
7	PDI-P	3	2	Luluk Zuhriyah	2.166	3
8	PDI-P	4	3	Lea Mahdarina, ST.	3.985	2
9	DEMOKRAT	4	6	Wiwik Sulaiha	3.018	1
10	GERINDRA	5	2	Lelly Thresiyawati	614	1
11	PDI-P	5	3	Nurul Setyowati, SE.	3.793	2
12	GOLKAR	5	1	Hj. Retno Sumarah, SE., MM.	2.467	1

**Persentase Caleg Terpilih
DPRD Kota Malang
dalam Pemilu 2019**

Laki-Laki	Perempuan
33 (73%)	12 (27%)





ANGGOTA DPRD KOTA MALANG TERPILIH



DAPIL 1

1
PKB



Arief Wahyudi

2
GERINDRA



Rimzah

3
PDI-P



Iwan Mahendra

4
GOLKAR



Moh Arif Budirarso

5
NASDEM



Gagah Soeryo Pamoekti

8
PKS



H. Bayu Rekso Aji

DAPIL 2

1
PKB



Abdurrochman

2
GERINDRA



Hartatik

3
PDI-P



Djoko Hirtono



Eko Herdiyanto



Harvad Kurniawan



Wiwiek Sukesie

4
GOLKAR



Eddy Widjanarko

8
PKS



Asmualik

12
PAN



H. Eko Adi Purnomo

14
DEMOKRAT



Indah Nurdiana

DAPIL 3

1
PKB



Abd. Wahid

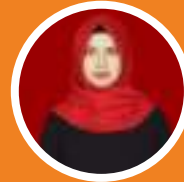


Ike Kisnawati

2
GERINDRA



Nurul Faridawati

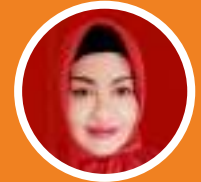


Amithya Ratnangani S.

3
PDI-P



Agoes Marhaenta



Luluk Zuhriyah

4
GOLKAR



Suryadi

8
PKS



H. Akhdiyat Syabril U. S.

12
PAN



H. Lookh Makhfudz

14
DEMOKRAT



H. Imron

DAPIL 4

1
PKB



H. Fathol Arifin

2
GERINDRA



Randy Gaung K. Al Islam

3
PDI-P



H. Wanedi

4
GOLKAR



H. Rahman Nurmala

5
NASDEM



Suryadi

8
PKS



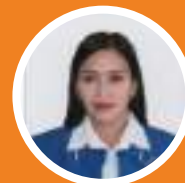
H. Rokhmad

9
PERINDO



Alkasa Sulima Priyantono

14
DEMOKRAT



Wiwik Sulaiha

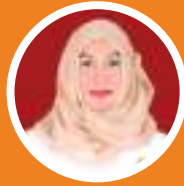
DAPIL 5

1
PKB



Ahmad Farih Sulaiman

2
GERINDRA



Lelly Thresiyawati

3
PDI-P

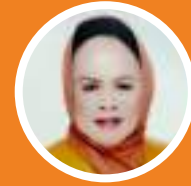


I Made Rian Diana Kartika



Nurul Setyowati

4
GOLKAR



Hj. Retno Sumarah

8
PKS



Ahmad Fuad Rahman



Trio Agus Purwono

11
PSI



Jose Rizal Joesoef

12
PAN



H. Pujiyanto

PENUTUP



Pemilihan Umum (pemilu) sejatinya adalah pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pemilu merupakan indikator kepedulian warga negara untuk menggunakan hak serta menjalankan kewajiban, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilu merupakan proses politik untuk menghasilkan kepemimpinan yang legal dan formal maka pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu bentuk tanggungjawab tersebut adalah pemilu harus akuntabel.

Akuntabilitas pemilu dapat dicapai, antara lain dengan memastikan penyelenggaraan pemilu betul-betul bersifat LUBER dan JURDIL. Untuk memastikan hal tersebut maka penyelenggara pemilu (KPU dan BAWASLU) harus memiliki integritas, kredibilitas dan kapabilitas yang teruji.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang sebagai penyelenggara pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Malang, telah melaksanakan amanat undang-undang tentang pelaksanaan pemilu 2019, baik secara teknis maupun administratif. Penyelenggaraan pemilu 2019 di Kota Malang berpedoman pada Undang-Undang

Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pada pasal 18 huruf (k) menjelaskan bahwa salah satu tugas KPU Kabupaten/ Kota adalah melakukan evaluasi dan membuat laporan atas setiap tahapan pemilu. Buku infografis Demokrasi di Kota Malang: Jejak Pemilu 2019 ini merupakan realisasi atas spirit isi pasal tersebut.

Dengan adanya buku infografis ini, diharapkan terbangun pemahaman tentang tahapan, program dan jadwal pemilu serentak 2019. Harapannya, stakeholder, utamanya masyarakat umum, memiliki pengertian yang komprehensif tentang pelaksanaan pemilu serentak 2019, sehingga mereka dapat turut serta menyampaikan usulan, saran dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang.

Akhirnya, sesuai peribahasa tidak ada gading yang tak retak, maka kritik dan saran yang produktif dan konstruktif kami harapkan untuk optimalisasi buku infografis ini.

Salam KPU Kota Malang:

Gak nyoblos, gak mbois Ker....!!!

